RENCANA STRATEGIS

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2025 – 2029

@dispusipjakarta
dispusip.jakarta.go.id
DISPUSIP JAKARTA
dispusip@jakarta.go.id

Jl. Perintis Kemerdekaan No.1
Pulo Gadung-Jakarta Timur

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 diselesaikan tepat waktu.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan untuk memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan urusan Perpustakaan dan Kearsipan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan kearsipan dan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program urusan Perpustakaan dan Kearsipan yang terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2025–2029.

Dalam rangka menuju Jakarta kota Global, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki peran strategis dalam menopang transformasi kota, mendorong literasi informasi di tengah masyarakat, perpustakaan tidak hanya sebagai tempat meminjam buku, tetapi sebagai ruang publik yang memperkuat keterhubungan sosial, kolaborasi komunitas, dan inovasi pengetahuan, sedangkan untuk kearsipan harus menjadi penjaga integritas pemerintahan melalui tata kelola dokumen yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029, semoga dokumen ini dapat bermanfaat.

Jakarta, September 2025

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi DKI Jakarta,

Nasruddin Djoko Surjono
NIP. 197306201999031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang **1**

1.2 Dasar hukum penyusunan **5**

1.3 Maksud dan Tujuan **9**

1.4 Sistematika Penulisan **10**

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 12

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan **12**

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 12

2.1.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 22

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 37

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan 82

2.2. Permasalahan dan Isu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan **93**

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 93

2.2.2 Isu-isu Strategis 98

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 113

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan **113**

3.2 Strategi **120**

3.3 Arah Kebijakan **125**

3.3.1 Urusan Perpustakaan 125

3.3.2 Urusan Kearsipan 127

3.4 Penyusunan Pohon Kinerja **136**

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 159

4.1 Uraian Program Kegiatan dan Subkegiatan **159**

4.2 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah **190**

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) **195**

4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) 198
4.5 Mekanisme Penilaian dan Sumber Data 201
BAB V PENUTUP..... 202

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi kualifikasi ASN Dinas Perpustakaan & Kearsipan Tahun 2025 25
Tabel 2. 2 Jabatan Fungsional Tahun 2025 26
Tabel 2. 3 Gedung Kantor, Perpustakaan, Depo Arsip dan Depo Transit 27
Tabel 2. 4 Jenis Perpustakaan 28
Tabel 2. 5 Jumlah Koleksi Bahan Perpustakaan 29
Tabel 2. 6 Jumlah Koleksi Berdasarkan Klasifikasi 29
Tabel 2. 7 Jumlah Armada Layanan Perpustakaan Tahun 2025 30
Tabel 2. 8 Jumlah Armada Kearsipan Tahun 2025 30
Tabel 2. 9 Koleksi Naskah Kuno Terdata Dispusip 31
Tabel 2. 10 Koleksi Arsip Statis pada Lembaga Kearsipan Daerah 32
Tabel 2. 11 Jumlah Arsip Tersimpan Tahun 2024 33
Tabel 2. 12 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dispusip Tahun 2020-2024 38
Tabel 2. 13 Indikator Penyusun Budaya Literasi 40
Tabel 2. 14 Tingkat Literasi Kota/Kabupaten Administrasi 41
Tabel 2. 15 Tingkat Kegemaran Membaca DKI Jakarta 43
Tabel 2. 16 Aktivitas Membaca DKI Jakarta 43
Tabel 2. 17 Skor TGM Berdasarkan Kota/Kabupaten Administrasi 43
Tabel 2. 18 UPLM dan IPLM DKI Jakarta Tahun 2024 46
Tabel 2. 19 Rekapitulasi data UPLM per Kabupaten/Kota 46
Tabel 2. 20 Perbandingan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 48
Tabel 2. 21 Survey Kepuasan Layanan Kearsipan 50
Tabel 2. 22 Rumus Perhitungan dan Capaian Tingkat Ketersediaan Arsip 51
Tabel 2. 23 Rumus Perhitungan dan Capaian Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 53
Tabel 2. 24 Realisasi Kinerja Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020-2024 62
Tabel 2. 25 Anggaran dan Realisasi Tahun 2020 66
Tabel 2. 26 Anggaran dan Realisasi Tahun 2021 dan 2022 67
Tabel 2. 27 Anggaran dan Realisasi Tahun 2023 dan 2024 68
Tabel 2. 28 Rumusan Arah Kebijakan Menurut Misi RPJMD Tahun 2025 - 2029 107
Tabel 3. 1 Keterkaitan RPJMD dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 116
Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan KearsipanTahun 2025-2029 119
Tabel 3. 3 Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 130
Tabel 3. 4 Merumuskan Tujuan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Isu Strategis 139
Tabel 3. 5 Merumuskan Sasaran Renstra berdasarkan CSF Tujuan Renstra 141
Tabel 3. 6 Mengidentifikasi Program Perangkat Daerah dan Program Pendukung Lainnya berdasarkan CSF Sasaran Renstra 147
Tabel 4. 1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan 159
Tabel 4. 2 Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Fokus Pelaksanaan dan Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 163
Tabel 4. 3 Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan 171

Tabel 4. 4 Penentuan Program Prioritas Tujuan 190
Tabel 4. 5 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 196
Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2039 197
Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 2029 200

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan Kinerja pada RPJMD dan Renstra 4
Gambar 1. 2 Hubungan Antara Renstra dan Dokumen Perencanaan Lainnya 4
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dispusip 21
Gambar 2. 2 Penempatan ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 22
Gambar 2. 3 ASN Dispusip Berdasarkan Golongan 22
Gambar 2. 4 ASN Berdasarkan Pendidikan 23
Gambar 2. 5 ASN Berdasarkan Jabatan 24
Gambar 2. 6 Jumlah ASN Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin 24
Gambar 2. 7 Aplikasi Naskah Dinas Elektronik E-Office 35
Gambar 2. 8 Jaklitera 35
Gambar 2. 9 Sistem Informasi Aplikasi Perpustakaan Jakarta (Siapjak) 36
Gambar 2. 10 Tahapan Proses Pengelolaan Arsip Dinamis (Arjuna) 37
Gambar 2. 11 Website Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 37
Gambar 2. 12 Grafik Perkembangan Nilai Budaya Literasi 40
Gambar 2. 13 Grafik Perbandingan Tingkat Literasi Kota/Kabupaten 41
Gambar 2. 14 Tingkat Kegemaran Membaca Tahun 2020-2024 42
Gambar 2. 15 Grafik Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Berdasarkan Kota/Kabupaten Administrasi 44
Gambar 2. 16 Grafik Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 45
Gambar 2. 17 Grafik Perbandingan Indeks Pembangunan 47
Gambar 2. 18 Grafik Nilai Hasil Pengawasan Tahun 2020-2024 48
Gambar 2. 19 Grafik Indeks Kepuasan Layanan Kearsipan 49
Gambar 2. 20 Grafik Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009) Tahun 2020-2024 52
Gambar 2. 21 Grafik Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Tahun 2020-2024 54
Gambar 2. 22 Grafik Anggaran dan Realisasi Tahun 2020-2024 65
Gambar 3. 1 Penahapan Renstra Tahun 2025-2029 120
Gambar 3. 2 Proses Penyusunan Pohon Kinerja 136
Gambar 3. 3 Pohon Kinerja Rencana Strategis Dispusip Urusan Perpustakaan 137
Gambar 3. 4 Pohon Kinerja Rencana Strategis Dispusip Urusan Kearsipan 138

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah. Penyusunan Renstra diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta disusun dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0014 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dan Surat Edaran Gubernur Nomor e-0003/SE/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga merupakan dokumen perencanaan untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, secara terinci disusun program dan indikator dalam kurun waktu lima tahun. Kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Perencanaan Strategis ini dalam sistem perencanaan pembangunan, Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta menjadi bagian yang selaras dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Untuk selanjutnya, dokumen Renstra akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas yang akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta (Dispusip) merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan otonomi bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan pembagian kewenangan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Perubahan status Jakarta dari Ibu Kota Negara menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bukanlah sekadar perubahan nomenklatur administratif. Ini adalah transformasi historis yang mencerminkan dinamika geopolitik, pergeseran peran strategis, serta arah baru pembangunan nasional dan daerah. Perubahan ini membawa konsekuensi multidimensional yang harus

dibaca secara mendalam, tidak hanya dari aspek politik dan hukum, tetapi juga dari sisi sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, hingga struktur pemerintahan dan pelayanan publik.

Jakarta sebagai Kota Global yang artinya, kota ini harus mampu bersaing dengan kota-kota besar dunia dalam hal daya tarik investasi, kualitas SDM, infrastruktur, sistem transportasi, lingkungan hidup, serta ekosistem inovasi. Perpustakaan dan kearsipan, yang selama ini berada di pinggir wacana pembangunan kota, kini harus diarusutamakan sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing kota. Kota global memerlukan warga yang melek informasi, pemerintah yang akuntabel, dan sistem dokumentasi sejarah yang kuat. Semua ini tidak mungkin terwujud tanpa reformasi dalam pengelolaan literasi dan arsip. Tantangan besar juga hadir dari cepatnya perkembangan teknologi. Era digital menuntut setiap institusi publik untuk bertransformasi menjadi entitas yang agile, berbasis data, dan responsif terhadap perubahan. Perpustakaan dan lembaga kearsipan harus keluar dari paradigma lama sebagai tempat penyimpanan menjadi pusat pengetahuan dinamis dan ruang interaksi publik. Ini berarti tidak hanya memperluas koleksi digital atau membangun gedung baru, tetapi mengubah cara pandang, budaya kerja, dan orientasi layanan. Dalam konteks ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta memiliki peran strategis dalam menopang transformasi kota. Lembaga ini harus menjadi pendorong literasi informasi di tengah masyarakat urban yang penuh distraksi digital. Peran perpustakaan tidak hanya sebagai tempat meminjam buku, tetapi sebagai ruang publik yang memperkuat keterhubungan sosial, kolaborasi komunitas, dan inovasi pengetahuan. Sementara itu, lembaga kearsipan harus menjadi penjaga integritas pemerintahan melalui tata kelola dokumen yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Renstra Dispusip disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan Renstra;
b. penyusunan rancangan Renstra;
c. rancangan akhir Renstra; dan
d. penetapan Renstra.

Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan RPJMD dan Renstra perangkat daerah dapat dilihat pada gambar berikut.

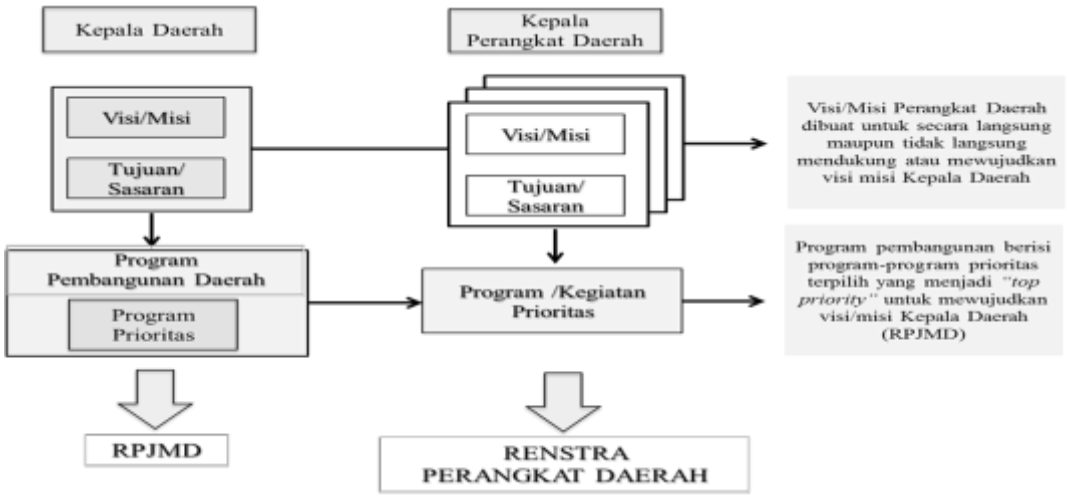

Gambar 1. 1 Keterkaitan Kinerja pada RPJMD dan Renstra

Sedangkan hubungan dan keterkaitan Renstra Dispusip Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah dapat dilihat pada gambar berikut.

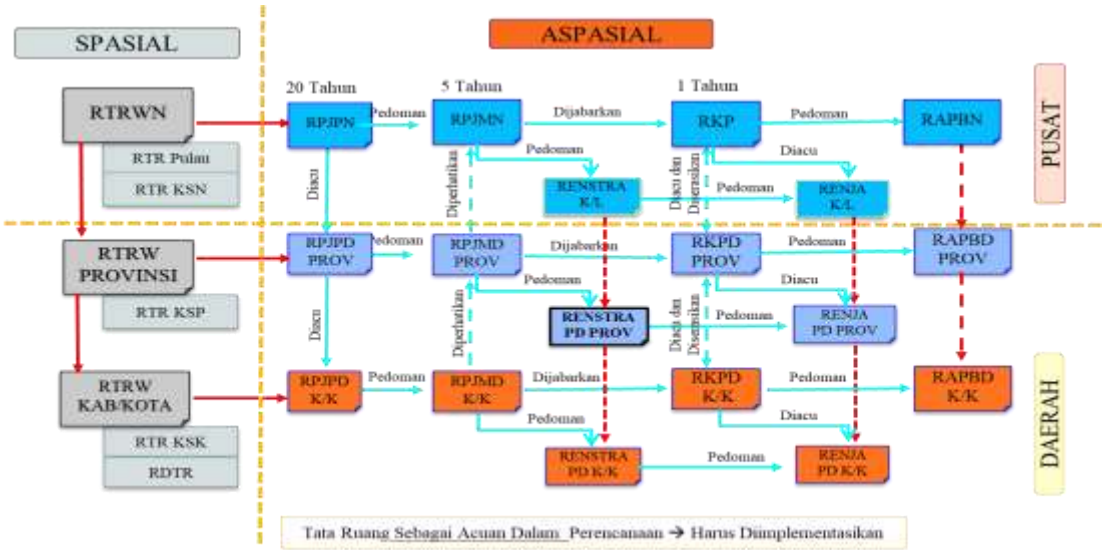

Gambar 1. 2 Hubungan Antara Renstra dan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Dasar hukum penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan;
25. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Provinsi;
27. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

29. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah /Madrasah;
30. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Serah Simpan karya Cetak dan Karya Rekam;
34. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
35. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
36. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah;
37. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

38. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044;
40. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
41. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
42. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perpustakaan Elektronik iJakarta;
43. Peraturan Gubernur Nomor 180 Tahun 2016 tentang Perpustakaan Khusus;
44. Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2016 tentang Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
45. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
46. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca;
47. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2018 tentang Program Arsip Vital;
48. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum;
49. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
50. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kearsipan;

51. Keputusan Gubernur Nomor 213 Tahun 2007 tentang Penetapan Hari Anak Jakarta Membaca;
52. Keputusan Gubernur Nomor 1785 Tahun 2017 tentang Standarisasi Peralatan Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
53. Keputusan Gubernur Nomor 294 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (Dua Puluh) Besar Kota Global Dunia;
54. Surat Edaran Gubernur Nomor e-0003/SE/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dispusip adalah merumuskan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan lingkup Dispusip dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai dengan tugas dan fungsi Dispusip yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Provinsi DKI Jakarta yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Diharapkan program dan kegiatan menjadi lebih efisien dan efektif berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan bidang perpustakaan dan kearsipan untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Maksud penyusunan renstra Dispusip adalah sebagai dokumen resmi dirancang secara konseptual, realistis dan rasional bagi Dispusip dalam melaksanakan tugas dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan Renstra Tahun 2025-2029 adalah :

a. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan Dispusip dengan tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program Rencana Pembangunan Daerah Provinsi;
b. Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
c. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan Dispusip untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Provinsi DKI Jakarta di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
d. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dispusip serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan urusan wajib bidang perpustakaan dan kearsipan.
e. Pedoman untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahun.
f. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dispusip.
g. Sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja
h. Untuk mencapai sasaran yang meliputi kebijaksanaan program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dispusip Tahun 2025-2029 ini terdiri dari 5 (lima) bagian sesuai dengan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Surat Edaran Gubernur Nomor e-0003/SE/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Substansi pokok bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum; maksud dan tujuan; dan sistematika penulisan Renstra Dispusip.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Substansi pokok bab ini berisi tentang uraian tugas, fungsi, dan struktur organisasi; sumber daya perangkat daerah mencakup SDM, aset/modal; kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan capaian sasaran/target Renstra periode sebelumnya; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan serta identifikasi permasalahan dan isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Substansi pokok bab ini berisi tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dispusip.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Substansi pokok bab ini berisi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja

BAB V PENUTUP

Substansi pokok bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1. Tugas

   Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan daerah.

2. Fungsi
   a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
   b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
   c. perumusan dan pelaksanaan proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
   d. pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan perpustakaan dan kearsipan daerah;

e. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
f. perencanaan, pelayanan, pengembangan, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi perpustakaan dan kearsipan;
g. pembinaan perpustakaan dan arsip terhadap perangkat daerah;
h. pelaksanaan retensi arsip dan/atau buku;
i. pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional tertentu pustakawan dan Arsiparis;
j. pengelolaan teknologi sistem informasi serta transformasi digital perpustakaan dan kearsipan;
k. pemeliharaan, perawatan dan pelestarian dokumen sastra HB Jassin;
l. penggalian dan penelusuran arsip dan bahan perpustakaan;
m. penyelenggaraan hubungan kerja sama di bidang perpustakaan dan kearsipan
n. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang perpustakaan dan kearsipan;
o. pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dan kearsipan daerah;
p. pemasyarakatan perpustakaan dan kearsipan;
q. akuisisi, penyusunan naskah sumber dan penyimpanan arsip;
r. pembinaan perpustakaan yang dikelola masyarakat termasuk perpustakaan keagamaan;
s. penegakan peraturan perundang-undangan dibidang perpustakaan dan kearsipan;
t. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
u. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
v. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

3. Kelembagaan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut:

a. Sekretariat Dinas

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

1) pengoordinasian perumusan proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
2) pengelolaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, dan barang milik daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
3) pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan, dan kehumasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
4) pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah; dan
5) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Sekretariat Dinas terdiri atas :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan;
3) Sub Bagian Sarana dan Prasarana.

b. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kearsipan;

2) pengoordinasian dan pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kearsipan;
3) pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kearsipan;
4) pelaksanaan penilaian hasil pengawasan kearsipan;
5) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Naskah Dinas Elektronik pada PD/UKPD;
6) penyelenggaraan supervisi, pendampingan, bimbingan teknis, sosialisasi, penyuluhan, dan konsultasi pengelolaan kearsipan;
7) penyusunan usulan, penilaian, dan/atau pemberian penghargaan pengelolaan kearsipan;
8) pelaksanaan Audit Kearsipan pada Perangkat Daerah dan BUMD;
9) pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM kearsipan;
10) penilaian kinerja dan prestasi kerja Arsiparis;
11) penyusunan kebutuhan jabatan fungsional Arsiparis;
12) pelaksanaan pembinaan forum komunikasi atau asosiasi Arsiparis; dan
13) pelaksanaan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kearsipan.

c. Bidang Pengelolaan Arsip dan Layanan;

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Arsip dan Layanan menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan arsip, layanan dan pemanfaatan arsip;
2) pelaksanaan alih media dan reproduksi arsip;
3) pelaksanaan usulan pemusnahan arsip;
4) pelaksanaan akuisisi arsip;
5) pelaksanaan pengolahan arsip;
6) pelaksanaan preservasi arsip;
7) pelaksanaan pengelolaan duplikasi arsip vital PD;

8) pelaksanaan pelayanan informasi kearsipan;
9) pelaksanaan pelayanan dan pemanfaatan arsip;
10) pelaksanaan penyusutan arsip perangkat daerah dan Lembaga Kearsipan Daerah;
11) pelaksanaan tindak lanjut usulan pemindahan arsip inaktif perangkat daerah;
12) pelaksanaan pengelolaan arsip inaktif perangkat daerah dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dan arsip statis;
13) pelaksanaan wawancara sejarah lisan, penelusuran pencarian dan penerimaan penyerahan arsip statis;
14) pelaksanaan penelusuran, penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip;
15) pelaksanaan penanganan arsip pasca bencana;
16) pelaksanaan layanan digitalisasi arsip masyarakat; dan
17) pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana kearsipan.

d. Bidang Deposit dan Pengembangan Perpustakaan

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Deposit dan Pengembangan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan bahan kebijakan teknis pelaksanaan deposit dan kearifan lokal, pengembangan koleksi, pengembangan perpustakaan, kerja sama dan pengendalian mutu perpustakaan;
2) pengoordinasian dan pelaksanaan deposit dan kearifan lokal, pengembangan koleksi, pengembangan perpustakaan, kerja sama dan pengendalian mutu perpustakaan;
3) pelaksanaan deposit meliputi penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pemantauan karya cetak dan karya rekam, penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah serta penyusunan literatur sekunder;

4) pelaksanaan konservasi meliputi pelestarian fisik bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui perawatan dan restorasi serta pembuatan sarana penyimpanan bahan perpustakaan;
5) pelaksanaan alih media meliputi pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui alih media dan pemeliharaan serta penyimpanan master informasi digital;
6) pelaksanaan perbaikan dan perawatan bahan perpustakaan meliputi penjilidan bahan perpustakaan;
7) pendataan, preservasi, konservasi dan akuisisi koleksi naskah kuno dan kearifan lokal;
8) pelaksanaan pengembangan koleksi meliputi penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan bahan perpustakaan, inventarisasi, dan pengembangan koleksi daerah (local content) serta pelaksanaan kajian kebutuhan pemustaka;
9) pelaksanaan pengolahan bahan perpustakaan meliputi deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan perpustakaan, verifikasi, validasi, pemasukan data ke basis data;
10) pelaksanaan Pengembangan Perpustakaan meliputi penyusunan regulasi perpustakaan, peta jalan (road map) perpustakaan, pengkajian dan pengembangan lembaga dan SDM Perpustakaan;
11) penyusunan dan pengorganisasian kebijakan urusan perpustakaan;
12) pelaksanaan kerja sama dan promosi perpustakaan; dan
13) pelaksanaan pengendalian mutu perpustakaan meliputi SNP, NSPK, pendampingan akreditasi, sertifikasi, dan evaluasi kinerja perpustakaan.

e. Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
2) pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan perpustakaan, pengelolaan tenaga perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca; dan
4) penyusunan dan pengoordinasian kebijakan urusan perpustakaan.

f. Bidang Teknologi Informasi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan data center dan sistem informasi perpustakaan dan kearsipan;
2) pengoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan data center dan sistem informasi perpustakaan dan kearsipan;
3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan data center dan sistem informasi perpustakaan dan kearsipan;
4) pembangunan, pengembangan dan pengintegrasian data center dan sistem informasi perpustakaan dan kearsipan;
5) pemeliharaan dan perawatan data center dan system informasi perpustakaan dan kearsipan;
6) pengembangan aplikasi pendukung pelayanan perpustakaan, kearsipan dan kesekretariatan;
7) pengelolaan jaringan teknologi informasi dan infrastruktur jaringan; dan
8) pengelolaan transformasi digital penyelenggaraan layanan perpustakaan dan kearsipan.

g. Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi

Dalam melaksanakan tugas, Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi menyelenggarakan fungsi:

1) pelaksanaan pembinaan perpustakaan dan kearsipan di wilayah Kota Administrasi;
2) pelaksanaan pengawasan perpustakaan dan kearsipan di wilayah Kota Administrasi;
3) pelaksanaan pengendalian perpustakaan dan kearsipan di wilayah Kota Administrasi;
4) pelaksanaan pemasyarakatan perpustakaan dan kearsipan di wilayah Kota Administrasi;
5) pelaksanaan layanan perpustakaan daerah dan kearsipan daerah di wilayah Kota Administrasi;
6) pelaksanaan pengembangan perpustakaan di wilayah Kota Administrasi;
7) pelaksanaan penyediaan bahan dan sarana perpustakaan kota, kecamatan, perpustakaan kelurahan dan perpustakaan masyarakat di wilayah Kota Administrasi;
8) pelaksanaan pelestarian, perawatan serta penyimpanan bahan perpustakaan di wilayah Kota Administrasi;
9) pelaksanaan asistensi dalam rangka penilaian, pemindahan dan penataan arsip di wilayah Kota Administrasi;
10) penyusunan kemas ulang informasi di wilayah Kota Administrasi;
11) fasilitasi penyelenggaraan teknis perpustakaan di wilayah Kota Administrasi;
12) pelaksanaan pengolahan bahan perpustakaan di wilayah Kota Administrasi;
13) penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perpustakaan daerah dan kearsipan daerah di wilayah Kota Administrasi;

14) pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Suku Dinas Kota Administrasi; dan
15) penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi.

Sudin Pusip Kota Administrasi, terdiri atas:

1) Subbagian Tata Usaha;
2) Seksi Perpustakaan; dan
3) Seksi Kearsipan.

h. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas Unit Pengelola Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HB Jassin

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HB Jassin menyelenggarakan fungsi:

1) pengelolaan Perpustakaan Jakarta;
2) pengelolaan Pusat Dokumen Sastra HB Jassin;
3) penyelenggaraan layanan Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HB Jassin;
4) penyusunan statistik perpustakaan;
5) pelaksanaan bimbingan pemustaka;
6) pelaksanaan pengelolaan pemasaran dan promosi layanan;
7) pelaksanaan alih media dokumen sastra Pusat Dokumen Sastra HB Jassin;
8) pelaksanaan preservasi dan konservasi dokumen sastra;
9) pelaksanaan pendokumentasian dan penerbitan karya cipta sastra;
10) pelaksanaan pelestarian bahan koleksi HB Jassin;
11) pelaksanaan penataan dan penyimpanan dokumen asli HB Jassin;
12) pelaksanaan kegiatan kemas ulang informasi dokumen sastra HB Jassin; dan

13) pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Unit Pengelola Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HB Jassin

Unit Pengelola Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HB Jassin membawahi Subbagian Tata Usaha

i. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dispusip

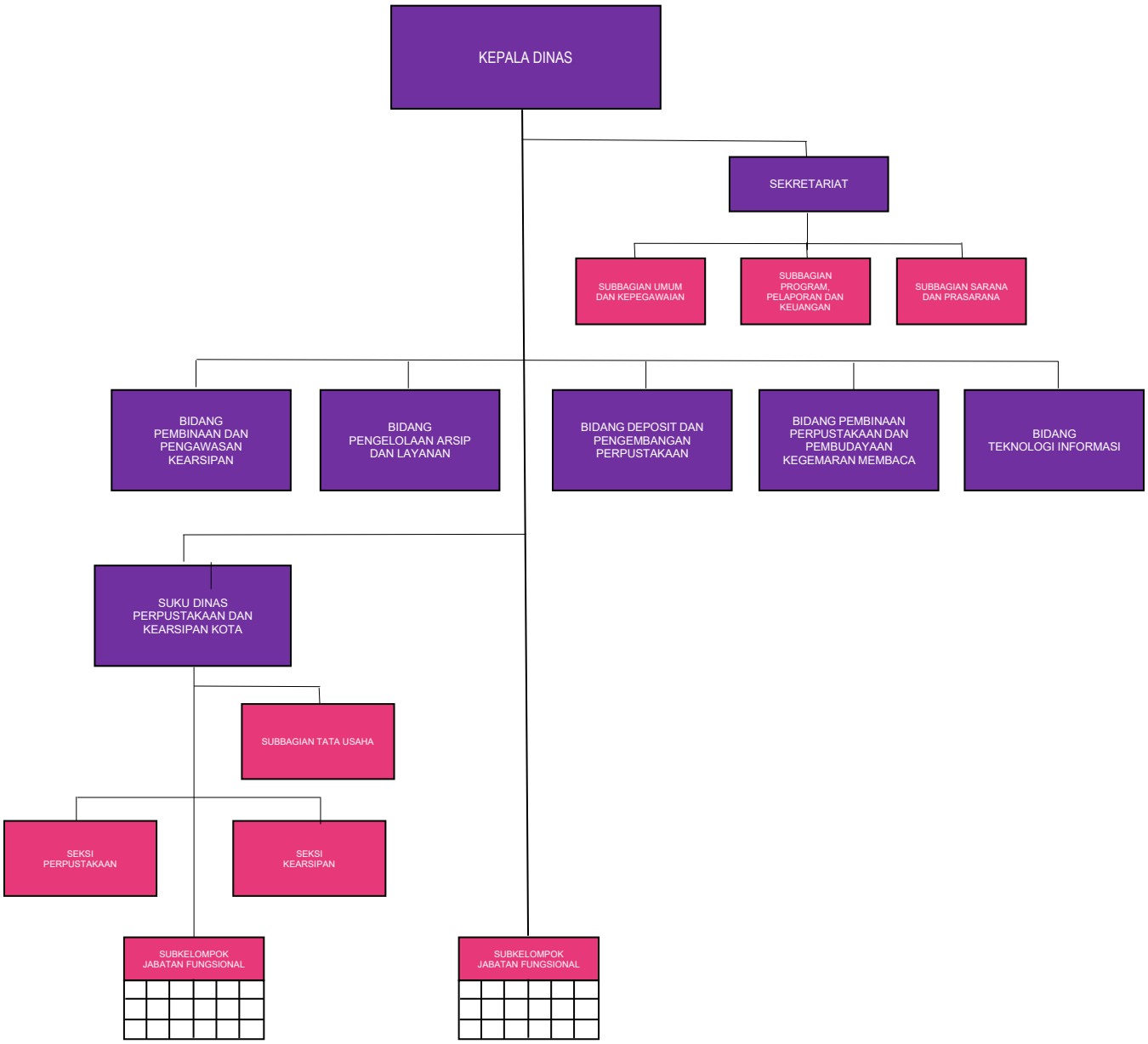

2.1.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) didukung oleh sumber daya aparatur sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.2. Berdasarkan data dari Subbagian Umum dan Kepegawaian per September 2025, jumlah keseluruhan pegawai tercatat sebanyak 238 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 127 orang (53,36%) bertugas di lingkungan Dinas, 86 orang (36,13%) ditugaskan pada Suku Dinas, dan 25 orang (10,5%) ditugaskan di Unit Pengelola Perpustakaan Jakarta dan PDS HB Jassin.

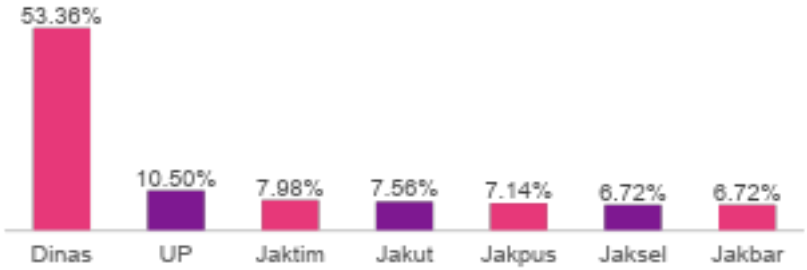

Gambar 2. 2 Penempatan ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Berdasarkan Gambar 2.3, mayoritas pegawai berada pada Golongan III, yaitu sebanyak 151 orang atau sebesar 63.45% dari total keseluruhan. Golongan II menempati urutan kedua terbanyak dengan jumlah 49 orang (20.59%), diikuti oleh Golongan IV sebanyak 26 orang (10.92%). Sementara itu, Golongan VII tercatat sebanyak 2 orang (0.84%) dan Golongan IX sebanyak 10 orang (4.20%). Secara keseluruhan, jumlah pegawai yang berada pada Golongan III dan IV mencapai 177 orang atau sebesar 74.37%.

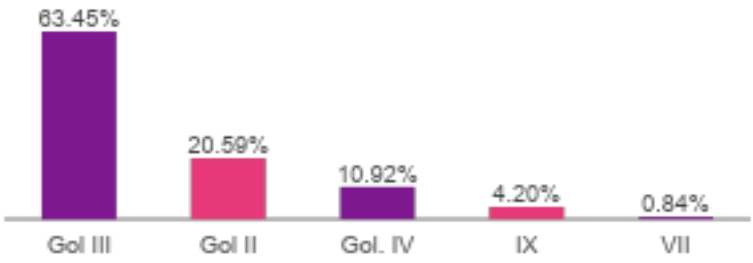

Gambar 2. 3 ASN Dispusip Berdasarkan Golongan

Gambar 2.4 memperlihatkan distribusi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan Strata 1 (S1) ke atas. Jumlah pegawai dengan pendidikan S1 tercatat sebanyak 127 orang (53,36%), sementara pegawai dengan pendidikan Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) berjumlah 34 orang (14,29%). Adapun pegawai dengan jenjang pendidikan Diploma dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) masing-masing berjumlah 45 orang (18,91%) dan 32 orang (13,45%). Data ini mencerminkan bahwa mayoritas sumber daya aparatur Dispusip telah menempuh pendidikan tinggi, yang berpotensi mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja kelembagaan.

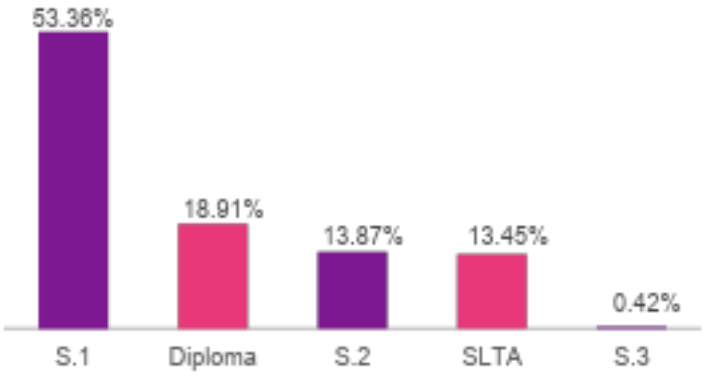

Gambar 2. 4 ASN Berdasarkan Pendidikan

Gambar 2.5 menggambarkan struktur organisasi Dispusip yang terdiri atas berbagai jenis jabatan. Jumlah jabatan struktural tercatat sebanyak 42 posisi. Di samping itu, terdapat 42 orang yang menduduki jabatan fungsional pustakawan, 34 orang sebagai arsiparis, 3 orang sebagai pranata komputer, dan 2 orang sebagai pranata humas. Sementara itu, jumlah pegawai yang berperan sebagai pelaksana mencapai 118 orang. Komposisi ini mencerminkan keberagaman peran dan fungsi dalam mendukung operasional serta pencapaian tujuan organisasi.

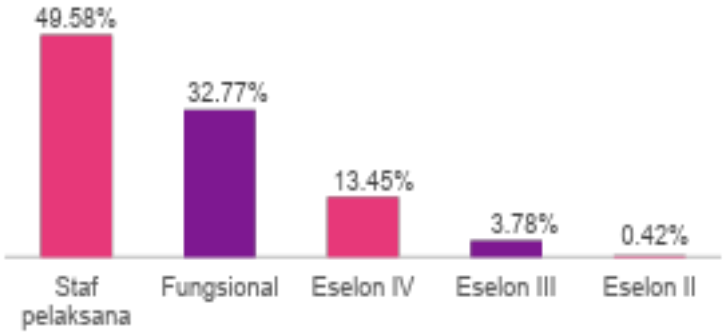

Gambar 2. 5 ASN Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Gambar 2.6, mayoritas pegawai berada dalam kelompok usia di atas 30 tahun, yaitu sebanyak 193 orang atau sebesar 81.09% dari total keseluruhan. Sementara itu, kelompok usia di bawah 30 tahun tercatat sebanyak 45 orang atau sebesar 18.91%, menjadikannya sebagai kelompok usia dengan jumlah pegawai paling sedikit. Selain itu, data tersebut juga menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, terdapat 8.82% pegawai yang diperkirakan akan memasuki masa pensiun.

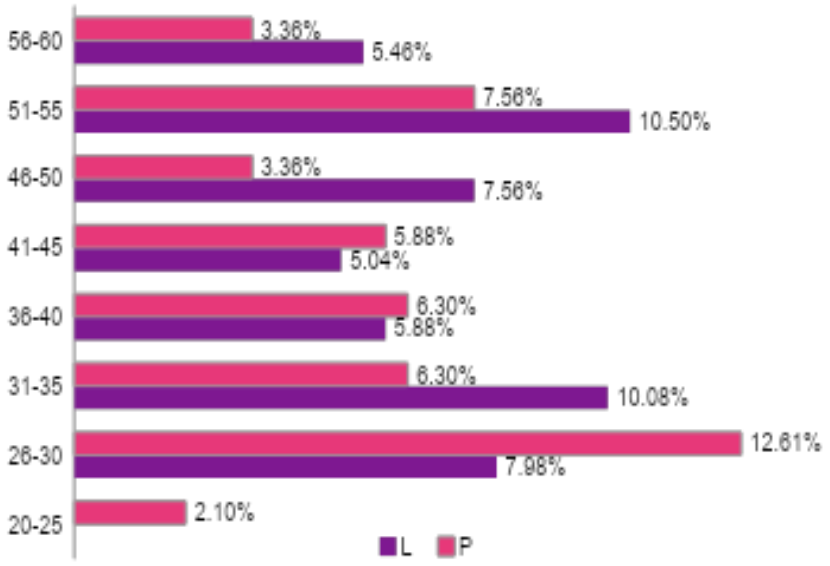

Gambar 2. 6 Jumlah ASN Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Tabel 2. 1 Rekapitulasi kualifikasi ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025

No	Kualifikasi	Dinas	SUDIN					UPPJ & PDS HB Jassin	Jumlah
			Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur		
A.	**Golongan**								
1	Gol. IV	15	3	2	3	2	-	1	**26**
2	Gol III	79	11	9	10	11	16	15	**151**
3	Gol II	30	2	7	3	2	2	3	**49**
4	Gol I	-	-	-	-	-	-	-	**-**
5	IX	3	1	-	-	-	-	6	**10**
6	VII	-	-	-	-	1	1	-	**2**
Jumlah		**127**	**17**	**18**	**16**	**16**	**19**	**25**	**238**
B.	**Eselon**								
1	Eselon II	1	-	-	-	-	-	-	**1**
2	Eselon III	5	-	1	1	1		1	**9**
3	Eselon IV	18	3	3	2	2	3	1	**32**
4	Fungsional	38	5	5	6	6	6	12	**78**
5	Staf pelaksana	65	9	9	7	7	10	11	**118**
Jumlah		**127**	**17**	**18**	**16**	**16**	**19**	**25**	**238**
C.	**Pendidikan**								
1	S.3	1	-	-	-	-	-	-	**1**
2	S.2	18	4	3	2	3	1	2	**33**
3	S.1	64	9	7	11	10	9	17	**127**
4	Diploma	33	-	3	2	2	2	3	**45**
5	SLTA	11	4	5	1	1	7	3	**32**
6	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	**-**
7	SD	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Jumlah		**127**	**17**	**18**	**16**	**16**	**19**	**25**	**238**

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian

Tabel 2. 2 Jabatan Fungsional Tahun 2025

No	Jenjang Jabatan	Golongan												Jumlah
		VII	IX	IIa	II.b	II.c	II.d	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b	
1	**Pustakawan**													
	Pelaksana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pelaksana Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyelia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tingkat Ahli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pertama	-	8	-	-	-	-	14	4	-	-	-	-	**26**
	Muda	-	-	-	-	-	-	-	-	6	14	-	-	**20**
	Madya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		**2**
	Utama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	**Arsiparis**													
	Pelaksana	2	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	**8**
	Pelaksana Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyelia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	**1**
	Tingkat Ahli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pertama	-	-	-	-	-	-	12	3	-	-	-	-	**15**
	Muda	-	1	-	-	-	-	-	1	-	12	1	-	**15**
	Madya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	**1**
	Utama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	**Pranata Komputer**													
	Tingkat Terampil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pelaksana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pelaksana Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyelia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tingkat Ahli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pertama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Muda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	**3**
	Madya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Utama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	**Pranata Humas**													
	Tingkat Terampil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pelaksana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pelaksana Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyelia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tingkat Ahli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pertama	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	**2**
	Muda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		**2**	**9**	**0**	**0**	**5**	**1**	**28**	**8**	**6**	**28**	**5**	**0**	**93**

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian

2. Aset/Modal dan Pelayanan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dispusip dapat berjalan dengan baik tidak hanya apabila didukung oleh personil SDM yang terampil, tetapi juga ketersediaan prasarana dan sarana yang digunakan memadai. Adapun kondisi aset sarana dan prasarana di Dispusip adalah sebagai berikut:

a. Gedung Kantor, Perpustakaan, Depo Arsip dan Depo Transit

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan saat ini menempati gedung kantor dan depo arsip di Komplek Gudang Induk Pulomas Badan Pengelola Aset Daerah, sedangkan untuk perpustakaan umum Tingkat Provinsi berada di Komplek Taman Ismail Marzuki Cikini. Untuk Kantor Suku Dinas, Perpustakaan Umum Tingkat Kota dan Depo Arsip berada sesuai dengan lokasi masing-masing sebagaimana daftar di bawah ini.

Tabel 2. 3 Gedung Kantor, Perpustakaan, Depo Arsip dan Depo Transit

No.	Penggunaan	Alamat	Luas (m2)
1.	Gedung Kantor Dispusip	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Pulogadung Jakarta Timur	4.878
2.	Gedung Depo Arsip	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Pulogadung Jakarta Timur	11.654
3.	Perpustakaan Umum Provinsi	Komplek Taman Ismail Marzuki Jl. Raya Cikini No. 7 Jakarta Pusat	6.080
4.	Perpustakaan Umum Provinsi	Gedung Nyia Ageng Serang lt. 7-8 Jl. HR. Rasuna Said No.Kav C-22, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan,	1.432
5.	Perpustakaan Umum dan Depo Transit Kota Jakarta Pusat	Jl. Tanah Abang I, Kebon Jahe – Jakarta Pusat.	1.750
6.	Perpustakaan Umum Kota Jakarta Utara	Jl. Logistik, Simpang lima Semper – Jakarta Utara.	1.060
7.	Depo Transit Kota Jakarta Utara	Jl. Gereja Tugu Jakarta Utara	783

No.	Penggunaan	Alamat	Luas (m2)
8.	Perpustakaan Umum dan Depo Transit Kota Jakarta Barat	Jl. Tanjung Duren Barat No. 23 – Jakarta Barat.	3.349
9.	Perpustakaan Umum dan Depo Transit Kota Jakarta Selatan	Jl. Gandaria Tengah V/3 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan.	2.731
10.	Perpustakaan Umum Kota Jakarta Timur	Komp. Pendidikan Rawa Bunga Jl. Jatinegara IV Jatinegara Jakarta Timur	2.800

Sumber : Subbag Sarana dan Prasarana

b. Jenis Perpustakaan

Tabel 2. 4 Jenis Perpustakaan

No	Jenis Perpustakaan	Jumlah
1.	Perpustakaan Umum	
	a. Provinsi	1
	b. Kota/Kabupaten	6
	c. Kecamatan	-
	d. Kelurahan/RPTRA	324
2	Perpustakaan Sekolah	
	a. SD/MI	2.237
	b. SMP/MTs	1.082
	c. SMA/K/MA	1.071
	d. SLB	88
3.	Perpustakaan Perguruan Tinggi	252
4.	Perpustakaan Khusus	302
Total		**5363**

Sumber : Bidang Pembinaan, Perpustakaan dan Pemberdayaan Kegemaran Membaca

c. Koleksi Buku Perpustakaan

Koleksi bahan perpustakaan mencakup buku cetak/konvensional dan buku elektronik (e-book) s.d. akhir tahun 2024 secara keseluruhan berjumlah 1.567.414 eksemplar.

Tabel 2. 5 Jumlah Koleksi Perpustakaan

No.	Perpustakaan	Jumlah	
		Judul	Eksemp.
1.	Provinsi	-	-
	- Buku cetak	115,678	419,302
	- Buku elektronik (E-Book)	8,051	132,717
2.	Kota Jakarta Pusat	50,387	228,227
3.	Kota Jakarta Utara	42,550	182,361
4.	Kota Jakarta Barat	69,632	199,509
5.	Kota Jakarta Selatan	47,328	184,502
6.	Kota Jakarta Timur	70,207	220,796
7.	Perpustakaan PDS HB Jassin	0	0
	Total	**403,833**	**1,567,414**

Sumber : Bidang Deposit dan Pengembangan Perpustakaan

Tabel 2. 6 Jumlah Koleksi Perpustakaan Berdasarkan Klasifikasi

No.	Klasifikasi	Jumlah	
		Judul	Eksemp.
1	000 Karya Umum	23,346	78,052
2	100 Filsafat	20,239	93,950
3.	200 Agama	43,443	200,196
4.	300 Pengetahuan Sosial	64,652	252,573
5.	400 Bahasa	9,763	37,210
6.	500 Pengetahuan Murni	15,552	62,082
7.	600 Pengetahuan Praktis	49,039	206,347
8.	700 Kesenian	33,508	133,402
9.	800 Kesusastraan	80,309	362,937
10.	900 Sejarah	21,740	89,373
11.	Tidak terkategori	42,242	51,292
	Total	**403,833**	**1,567,414**

Sumber : Bidang Deposit dan Pengembangan Perpustakaan

d. Armada untuk Layanan Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 2. 7 Jumlah Armada Layanan Perpustakaan Tahun 2025

PD/UKPD	Kontainer Permata	Mobil Pusling	Gerobak Motor	Motor Perpus	Mobil Internet	Jumlah
Dispusip	2	-	-	-	-	2
Sudin Jakpus	-	12	2	2	1	17
Sudin Jakut	-	13	2	6	1	22
Sudin Jakbar	-	16	-	2	-	18
Sudin Jaksel	-	12	2	-	-	14
Sudin Jaktim	-	16	2	-	-	18
Cikini	-	**1**	-	-	-	1
Total	**2**	**70**	**8**	**10**	**2**	**92**

Sumber : Bidang Deposit dan Pengembangan Perpustakaan

Tabel 2. 8 Jumlah Armada Kearsipan Tahun 2025

PERANGKAT DAERAH/UKPD	Truk Angkut Arsip	Mobil Layanan Arsip	Mobil Penyuluhan Arsip	Motor Liputan Arsip	JUMLAH
Dispusip	2	1	-	1	4
Sudin Jakpus	-	1	-	-	1
Sudin Jakut	-	1	1	-	2
Sudin Jakbar	-	-	-	-	-
Sudin Jaksel	-	-	-	-	-
Sudin Jaktim	-	1	-	-	1
Total	**2**	**4**	**1**	**1**	**8**

Sumber : Bidang Pengelolaan Arsip dan Layanan

e. Naskah Kuno

Naskah kuno merupakan salah satu warisan intelektual bangsa yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan, adat, kepercayaan, hukum, serta kearifan lokal yang tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, naskah kuno termasuk ke dalam koleksi khusus yang wajib dilestarikan oleh perpustakaan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 23 ayat (2) yang menyebutkan bahwa perpustakaan berkewajiban untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, pelestarian, dan penyediaan akses terhadap naskah kuno sebagai bagian dari sumber informasi dan kebudayaan bangsa.

Tabel 2. 9 Koleksi Naskah Kuno Terdata Dispusip

No	Jenis	Kondisi	Jumlah		Lokasi
1	Naskah Kuno Baru	Sedang	23	Naskah	Dispusip
2	Naskah Kuno Lontar	Sedang	1	Naskah	Dispusip
3	Naskah Kuno Pacenongan	Sedang	33	Naskah	PNRI
4	Naskah Tulisan Tangan Sastra	Sedang	155	Naskah	Dispusip

Sumber : Bidang Deposit dan Pengembangan Perpustakaan

Dalam konteks Provinsi DKI Jakarta, pelestarian naskah kuno menjadi bagian penting dari upaya menjaga identitas dan sejarah kota yang menjadi pusat peradaban Nusantara sejak masa lalu. Melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta, program pelestarian naskah kuno dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, akademisi, komunitas, maupun masyarakat luas. Sampai dengan tahun 2025 telah dilaksanakan upaya pelestarian naskah kuno dengan data sebagai berikut :

f. Arsip Statis

Arsip statis adalah arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, bersifat permanen, dan telah habis masa retensinya sehingga wajib diserahkan kepada lembaga kearsipan sebagai bukti autentik penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memori kolektif bangsa. Proses akuisisi arsip statis dilaksanakan melalui mekanisme serah terima dari pencipta arsip kepada Lembaga Kearsipan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Arsip Statis. Hingga akhir tahun 2024, jumlah arsip statis yang telah berhasil dihimpun dan tersimpan berjumlah 6.641 berkas arsip, yang seluruhnya telah melalui proses pengolahan, mendapat tindakan preservasi, serta disediakan aksesnya untuk mendukung pemanfaatan oleh masyarakat.

Tabel 2. 10 Koleksi Arsip Statis pada Lembaga Kearsipan Daerah

No	Nama Pencipta Arsip	Jumlah Arsip	Keterangan	Tahun BAST
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9	Reguler	2021
2	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	859	MONAS	2021
3	PT Foodstation Tjipinang Jaya	29	Reguler	2022
4	Badan Kepegawaian Daerah	173	Reguler	2023
5	Kota Administrasi Jakarta Selatan	21	Reguler	2023
6	Badan Pengelola Keuangan Daerah	4203	Reguler	2023
7	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	192	Reguler	2024
8	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	4	Reguler	2024
9	Kota Administrasi Jakarta Pusat	40	Reguler	2024
10	Kota Administrasi Jakarta Barat	71	Reguler	2024
11	Kota Administrasi Jakarta Timur	41	BKT	2024
12	Kota Administrasi Jakarta Selatan	49	COVID	2024
13	Dinas Perhubungan	130	COVID	2024
14	Sekretariat DPRD	52	COVID	2024
15	Kota Administrasi Jakarta Utara	398	COVID	2024
16	Perumda Pasar Jaya	68	COVID	2024
17	Biro Kerja Sama Daerah	302	BKSP JABODETABEK-JUR	2024
	JUMLAH	6641		

g. Arsip Tersimpan

Arsip/dokumen penting daerah yang berhasil dihimpun dan disimpan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi DKI Jakarta sampai tahun 2025 berjumlah 303.372 boks terdiri dari arsip statis dan vital serta arsip inaktif.

Tabel 2. 11 Jumlah Arsip Tersimpan Tahun 2025

NO.	URAIAN	ARSIP TERSIMPAN						Jumlah
		1930-1980	1980-1990	1991-2000	2001-2014	2015-2017	2021-2025	
1	Gubernur dan Wakil Gubernur	184	333	-	-	-	-	517
2	Sekretaris Daerah & Asisten	1.750	305	386	-	-	-	2441
3	Sekretariat DPRD	140	-	230	-	375	-	745
4	Biro Administrasi Wilayah	-	11	30	-	-	-	41
5	Biro Hukum	61	-	98	-	-	-	159
6	Biro Umum	56	1.934	3.419	1.908	-	-	7317
7	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	-	6	219	12	-	-	237
8	Biro Keuangan	451	-	27.208	33.966	-	-	61625
9	Dinas Trantib & Linmas	62	780	22	-	-	-	864
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	410	284	-	117	-	811
11	Dinas Pariwisata	9	95	183	-	273	892	1.452
12	Dinas Pendapatan Daerah	-	1.136	-	-	-	-	1136
13	Dinas Pekerjaan Umum	-	-	155	-	-	-	155
14	Dinas Tata Kota	440	1.021	771	-	-	-	2232
15	Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan	5.196	16.535	3.257	44.783	-	-	69771
16	Dinas Perhubungan	-	110	192	-	37	5304	5.643
17	Dinas Kebersihan	1	173	140	-	-	-	314
18	Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi	24	206	93	-	-	-	323
19	Dinas Kesehatan	5	79	-	-	-	-	84
20	Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial	-	7	463	-	-	-	470
21	Dinas Olah Raga dan Pemuda	-	4	-	-	-	-	4
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6	956	288	-	-	-	1250
23	Dinas Perumahan	-	211	88	-	-	-	299
24	Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah	-	-	99	-	-	-	99
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	36	-	359	255	-	-	650
26	Kanpenko Jak-Sel	-	120	-	-	-	-	120
27	Kanpeko Jak-Tim	-	80	-	-	-	-	80
28	Kanpeko Jak-Pus	-	110	-	-	-	-	110
29	Kanpeko Jak-Ut	-	75	-	-	-	-	75
30	Kanpeko Jak-Bar	-	76	-	-	-	-	76

NO.	URAIAN	ARSIP TERSIMPAN						Jumlah
		1930-1980	1980-1990	1991-2000	2001-2014	2015-2017	2021-2025	
31	Kanpeko Kab.Kep. Seribu	-	75	-	-	-	-	75
32	Badan Pengawasan Daerah	-	139	130	-	-	-	269
33	Badan Kepegawaian Daerah	371	677	-	12	-	-	1060
34	Badan Kesatuan Bangsa	244	-	155	-	57	-	456
35	BKPMD & PKUD	-	3	70	-	-	-	73
36	Badan Pemberdayaan Masyarakat	1	55	-	-	-	-	56
37	BKKBD	-	163	396	-	-	-	559
38	Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah	-	-	335	1.289	690	-	2314
39	Kantor Pelayanan Pemamakan	2	1	70	-	-	-	73
40	Kantor Arsip Daerah	-	36	-	-	-	-	36
41	Walikota Madya Jakarta Pusat	-	65	54	-	-	-	119
42	Walikota Madya Jakarta Utara	-	56		-	-	-	56
43	Walikota Madya Jakarta Barat	170	-	174	-	-	-	344
44	Walikota Madya Jakarta Selatan	-	444	65	-	-	197	706
45	Kecamatan Pasar Minggu	-	452	-	-	-	-	452
46	Walikota Madya Jakarta Timur	-	61	45	-	-	32	138
47	PD. Pasar Jaya	259	160	297	11	-	-	727
48	PD. Air Minum	-	1.071	958	-	-	-	2029
49	PT. Jakarta Internasional Expo	-	-	-	24	-	-	24
50	PT. Jakarta Propertindo	97	873	270	-	-	-	1240
51	Kanwil Pekerjaan Umum	-	169	-	-	-	-	169
52	Kanwil Deppen	-	68	-	-	-	-	68
53	Kanwil Deptrans	-	12	-	-	-	-	12
54	Kanwil Sosial	-	-	199	-	-	-	199
55	Kanwil Perindag	-	-	39	-	-	-	39
56	Kanwil Diknas	-	15	-	-	-	-	15
57	Kanwil Perhubungan	-	30	-	-	-	-	30
58	Kanwil Kehutanan	-	100	-	-	-	-	100
59	Kanwil Parpostel	-	27	-	-	-	-	27
60	Kanwil Pertanian. Depnaker	-	239	-	-	-	-	239
61	BPN Jakarta Selatan	-	163	-	-	-	-	163
62	BPN Jakarta Utara	-	565	-	-	-	-	565
63	BP7 Provinsi dan 5 Wilayah	-	-	393	-	-	-	393
64	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	1306	1306
65	BPPBJ	-	-	-	-	-	711	711
66	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	654	654
67	BPKD	-	-	-	-	-	127.033	127.033
68	Satpol PP	-	-	-	-	-	1743	1743
	Jumlah	**9.565**	**30.492**	**41.634**	**82.260**	**1.549**	**137.872**	**303.372**

Sumber : Bidang Pengelolaan Arsip dan Layanan

h. Aplikasi

1) Aplikasi e-Office

Tata kelola persuratan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan responsif dilakukan melalui penerapan aplikasi naskah dinas elektronik *(e-office*) surat masuk guna mewujudkan pemerintahan *e-government.*

Gambar 2. 7 Aplikasi Naskah Dinas Elektronik E-Office

2) Aplikasi Jaklitera

Peningkatan layanan perpustakaan melalui pengembangan aplikasi rekayasa sistem informasi Pemustaka untuk meminjam buku yang ada di daftar koleksi di seluruh perpustakaan yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan dapat mengembalikan di lokasi yang sesuai kebutuhan pemustaka dan kedepannya pemustaka dapat meminjam dan mengembalikan buku dengan memanfaatkan jasa ojek *online*.

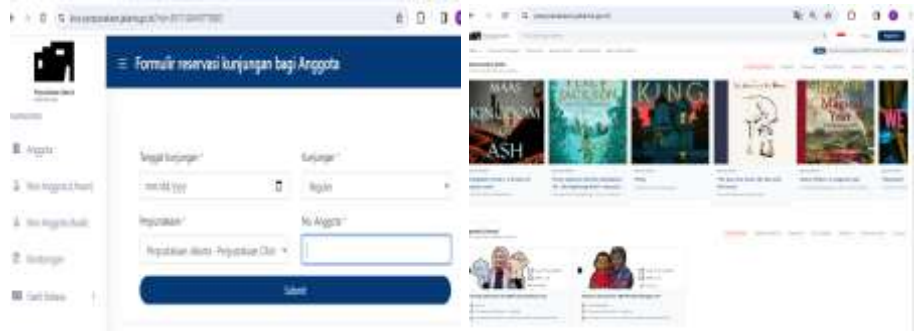

Gambar 2. 8 Jaklitera

3) Aplikasi SiapJak

Sistem Informasi Akreditasi Perpustakaan Jakarta (SiapJak) sebagai jawaban atas kebutuhan layanan untuk mengakomodir kebutuhan pembinaan perpustakaan yang komprehensif, yang bertujuan sebagai salah satu penentu arah kebijakan yang berhubungan dengan manajemen perpustakaan yang meliputi pendataan, akreditasi, pelaporan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Di samping itu Dispusip sebagai lembaga pembina perpustakaan dan juga sebagai lembaga akreditasi perpustakaan daerah mempunyai kewajiban untuk mendorong lembaga binaannya untuk mencapai standar perpustakaan

Gambar 2. 9 Sistem Informasi Aplikasi Perpustakaan Jakarta (Siapjak)

4) Aplikasi Arjuna

Untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan arsip dinamis yang terintegrasi dari penciptaan sampai dengan penyusutan sebagaimana ketentuan undang-undang, diperlukan pengembangan aplikasi kearsipan dinamis untuk melengkapi fungsi aplikasi *e-Office* yang saat ini baru mengakomodir penciptaan naskah dinas saja dan belum dilengkapi dengan fungsi lainnya yaitu pemanfaatan, pengelolaan dan penyusutan. Pengembangan aplikasi kearsipan dinamis dengan nama Arjuna yang terintegrasi dengan aplikasi *e-Office*.

Gambar 2. 10 Tahapan Proses Pengelolaan Arsip Dinamis (Arjuna)

5) Website Dispusip

Website ini berisikan berbagai informasi terkait perpustakaan dan kearsipan, alamat dan kontak, berita terkini, tutorial, artikel & opini, *event* & kalender serta tautan ke media sosial milik Dispusip.

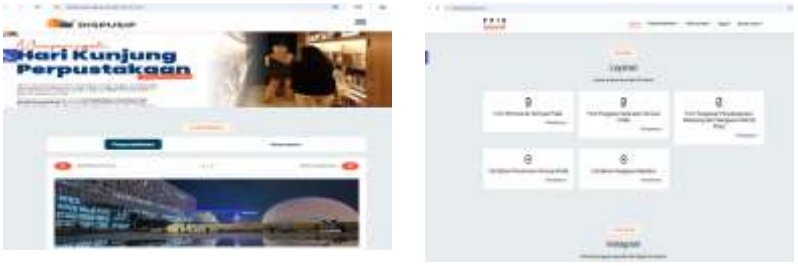

Gambar 2. 11 Website Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Untuk melihat keberhasilan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui indikator kinerja dan realisasi penyerapan anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2020-2024.

1. Capaian Indikator Kinerja

Adapun tingkat capaian kinerja Dispusip berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 12 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dispusip Tahun 2020-2024

No	Indikator KInerja	Satuan	Target Kinerja pada Tahun					Realisasi Kinerja pada Tahun					Capaian Kinerja pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Budaya Literasi	Nilai	-	-	32.85	71.3	71.4	77.35	67,11	68.64	71.37	72.09	-	-	208.95	100.10	100.97
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	73.2	71.8	72.31	72.61	72.91	71.39	72.31	72.36	72.68	72.93	97.53	100.71	100.07	100.10	100.03
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	-	-	-	19.51	19.71	18.91	19.31	80.87	19.57	19.78	-	-	-	100.31	100.36
4	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	-	-	80	87.64	90.06	83,15	80,32	90,98	90.06	93.11	-	-	109.55	102.76	103.39
5	Indeks Kepuasan Layanan Kearsipan	Indeks	3.5	3.5	88.5	88.5	92.45	3.48	4	96.56	92.45	93.61	99.43	114.29	109.11	104.46	101.25
6	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	Persentase	-	-	-	-	-	48.84	59.85	61.74	61.91	70.62	-	-	-	-	-
7	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung-jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persentase	-	-	-	-	-	33.33	100	100	100	97.97	-	-	-	-	-

Evaluasi capaian pelaksanaan urusan Perpustakaan dan Kearsipan yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

a. **Nilai Budaya Literasi**

   Nilai Budaya Literasi merupakan dimensi dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan yang memuat aktivitas serta sarana/prasarana pendukung dalam memperoleh, menguji kesahihan, dan menghasilkan informasi dan pengetahuan untuk pemberdayaan kecakapan masyarakat. Angka yang menunjukkan rata-rata dari:

   1) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir,
   2) Persentase Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dan
   3) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat.

   Pengukuran Nilai Budaya Literasi telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bapennas dan Badan Pusat Statistik. Untuk skor nilai Budaya Literasi Provinsi DKI Jakarta dalam lima tahun terakhir (2018-2023) sebagai berikut: 71.20 (tahun 2018), 75.60 (tahun 2019), 77.35 (tahun 2020), 67.11 (tahun 2021), 68.64 (tahun 2022) dan 70,58 (2023).

Gambar 2. 13 Grafik Perkembangan Nilai Budaya Literasi

Nilai budaya literasi menjadi indikator kinerja tujuan pada Renstra Tahun 2023-2026 dengan pengukuran yang dilaksanakan oleh Tenaga Ahli dari Universitas Indonesia. Berdasarkan hasil pengukuran untuk tahun 2024 menunjukan skor keseluruhan sebesar 72,9 dari target indikator kinerja sebesar 71,4 sehingga capaian kinerjanya 100,97%. Jika dibandingkan dengan skor tahun 2023 memperlihatkan adanya kenaikan nilai sebesar 0,72 poin.

Tabel 2. 13 Indikator Penyusun Budaya Literasi

No	Indikator	Nilai 2023	Nilai 2024
1	Penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir, (persen)	63.95	75.47
2	Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet (persen)	97.25	96.1
3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat (persen)	52.90	44.7
		71.37	72.09

Variasi tingkat literasi di enam Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta dengan skor tertinggi dicapai oleh Jakarta Selatan diperoleh nilai 75.89, Jakarta Timur 73.32, Jakarta Barat 71.89, Jakarta Pusat 70.73, dan Jakarta Utara 66.25. Untuk Kepulauan Seribu mencatat skor terendah sebesar 58.33. Variasi skor ini mencerminkan adanya perbedaan akses, infrastruktur dan program literasi di masing-masing wilayah, yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan budaya literasi secara lebih merata di seluruh provinsi.

Tabel 2. 14 Tingkat Literasi Kota/Kabupaten Administrasi

No	Wilayah	2023	2024	Keterangan
1	Kota Adm. Jakarta Selatan	72.41	75,89	
2	Kota Adm. Jakarta Timur	71.98,	73,32	
3	Kota Adm. Jakarta Barat	71.69	71,89	
4	Kota Adm. Jakarta Pusat	70.97	70,73	
5	Kota Adm. Jakarta Utara	69.25	66,25	
6	Kabupaten Adm. Kep. Seribu	69.14	58,33	

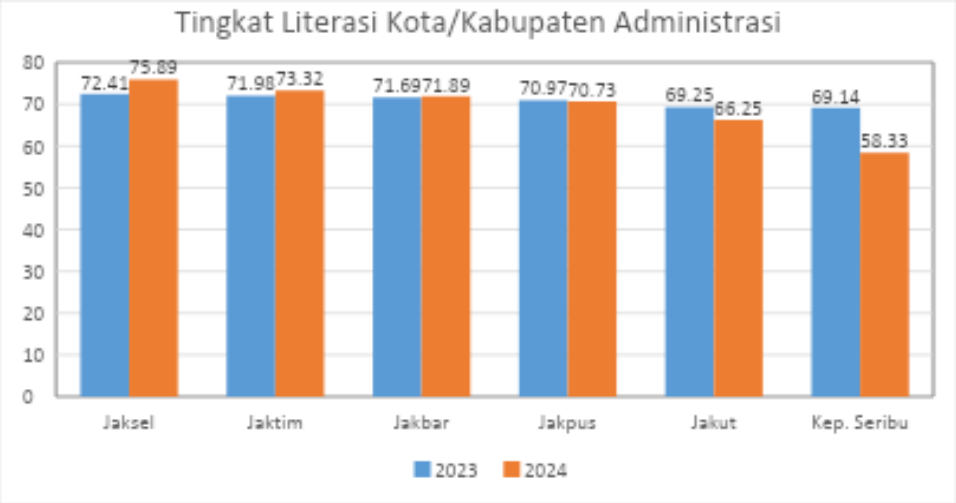

Gambar 2. 13 Grafik Perbandingan Tingkat Literasi Kota/Kabupaten

b. **Nilai Tingkat Kegemaran Membaca**

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi dan pengetahuan dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran tingkat kegemaran membaca diperoleh dari hasil penghitungan 5 (lima) indikator utama, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, yakni: 1. Frekuensi membaca per minggu 2. Durasi membaca per hari 3. Jumlah bahan bacaan yang dibaca per tiga bulan 4. Frekuensi akses internet per minggu 5. Durasi akses internet per hari.

Nilai Tingkat Kegemaran Membaca dijadikan indikator untuk Renstra Tahun 2018-2022 dan 2023-2026. Untuk penjelasan hasil pengukuran yang dilakukan dalam 2 tahun terakhir (tahun 2023 dan 2024) adalah hasil pengukuran tingkat kegemaran membaca tahun 2023 adalah 72,68 dengan kategori tinggi, kemudian untuk hasil tahun 2024 adalah 72,93 dari target sebesar kinerja 72,91 sehingga capaian Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Tahun 2024 adalah 100,03 %. Ada kenaikan yang sangat tipis dari tahun sebelumnya.

Gambar 2. 14 Tingkat Kegemaran Membaca Tahun 2020-2024

Tabel 2. 15 Tingkat Kegemaran Membaca DKI Jakarta

Interval TGM	Kategori TGM	Jumlah Responden	Persentase
0-20	Sangat Rendah	3	0.2
20,01-40	Rendah	186	10.3
40,01-60	Sedang	392	21.6
60,01-80	Tinggi	283	15.6
80,01-100	Sangat Tinggi	950	52.4
Grand Total		1814	100.0

Tabel 2. 16 Aktivitas Membaca DKI Jakarta

No	Aktivitas Membaca	2023	2024	Ket
1	Frekuensi membaca	79.987	74,12	
2	Durasi Membaca	69.851	75,76	
3	Jumlah Bahan Bacaan	67.576	68,99	
4	Frekuensi Akses Internet	83.528	79,31	
5	Durasi Akses Internet	65.595	86,03	
	TGM	**72.68**	**72.93**	

Tabel 2. 17 Skor TGM Berdasarkan Kota/Kabupaten Administrasi

Kota Administrasi	TGM	FB	DB	JBB	FAI	DAI
Jakarta Barat	71.24	75.93	73.76	63.00	79.85	68.78
Jakarta Pusat	71.91	69.97	78.66	69.51	73.78	55.64
Jakarta Selatan	73.99	76.00	75.50	69.08	83.76	72.54
Jakarta Timur	75.08	74.36	76.11	75.80	78.98	64.92
Jakarta Utara	71.67	71.81	77.65	66.51	76.48	61.14
Kep. Seribu	42.81	40.63	34.38	53.13	50.00	37.50
Grand Total	72.93	74.12	75.76	68.99	79.31	66.03

Gambar 2. 15 Grafik Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Berdasarkan Kota/Kabupaten Administrasi

c. **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**

Pengukuran terhadap usaha yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat dalam mencapai budaya literasi masyarakat, pengukuran dilakukan berdasarkan unsur pembangunan literasi Masyarakat (UPLM) (Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi Perpustakaan, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan, Perpustakaan ber SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan Promosi, Anggota Perpustakaan) dan aspek masyarakat(AM).

Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)

UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan

UPLM 2 = Ketercukupan koleksi

UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan

UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke Perpustakaan

UPLM 5 = Perpustakaan ber-SN

PUPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan

UPLM 7 = Anggota perpustakaan

$$\text{Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat} = \sum \frac{UPLM}{ALM} \times 100$$

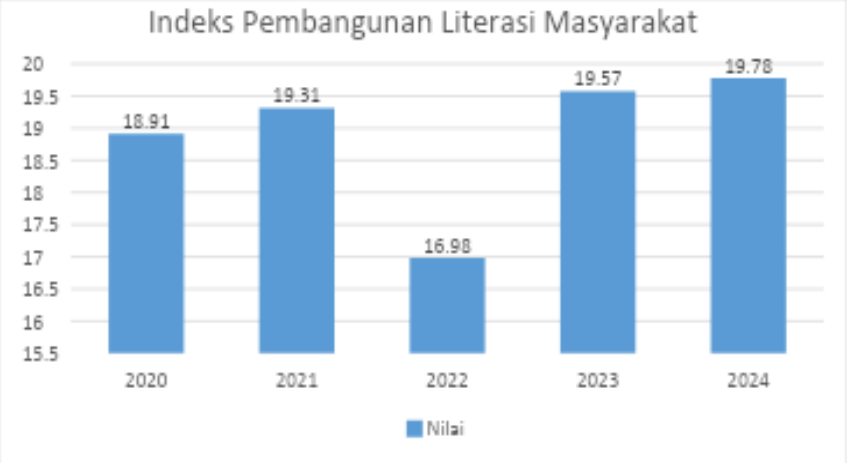

Gambar 2. 16 Grafik Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Berdasarkan hasil pengumpulan data UPLM, maka dilakukan perhitungan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sesuai dengan buku Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional RI Tahun 2021. Adapun hasil perhitungan menghasilkan nilai IPLM seperti pada Tabel berikut :

Tabel 2. 18 UPLM dan IPLM DKI Jakarta Tahun 2024

No	Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat	2023	2024
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	0.0046	0,0046
2	Ketercukupan Koleksi (UPLM2)	1.1479	1,1778
3	Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	0.0067	0,0067
4	Tingkat Kunjungan Masyarakat/ Hari (UPLM4)	0.3248	0,3628
5	Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)	3.9355	3,9355
6	Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi (UPLM6)	0.3986	0,3993
7	Anggota Perpustakaan (UPLM7)	0.7039	0,7044
Nilai IPLM		**93.17 atau dikonversi 19.57**	**93.17 atau dikonversi 19.57**

Tabel 2. 19 Rekapitulasi data UPLM per Kabupaten/Kota

KAB/KOTA	UPLM1	UPLM2	UPLM3	UPLM4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	IPLM	Konversi
Kepulauan Seribu	0,0052	1,8113	0,0052	0,2681	2,7086	0,8131	0,6916	*90,04*	18,92
Kota Jakarta Barat	0,0047	1,7138	0,0074	0,6118	3,0744	0,2012	0,8232	*91,95*	19,32
Kota Jakarta Pusat	0,0049	0,2010	0,0071	0,3699	4,7223	0,5092	0,6356	*92,14*	19,36
Kota Jakarta Selatan	0,0040	0,6338	0,0067	0,3206	4,2066	0,2197	1,0672	*92,26*	19,38
Kota Jakarta Timur	0,0040	1,4327	0,0061	0,3189	4,4576	0,2306	0,4503	*98,57*	20,71
Kota Jakarta Utara	0,0048	1,2741	0,0077	0,2864	4,4434	0,4219	0,5588	*99,96*	21,00

Pada Tabel terlihat hasil pengukuran di tahun 2024, dimana bahwa Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan wilayah dengan nilai IPLM terendah yaitu sebesar 18,92 dan Kota Jakarta Utara memiliki nilai IPLM tertinggi yaitu 21.00. Kabupaten/kota di provinsi DKI Jakarta seluruhnya memiliki kategori “Sangat Tinggi”.

Gambar 2. 17 Grafik Perbandingan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

d. **Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan**

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi: Kebijakan Kearsipan, Organisasi Kearsipan, SDM Kearsipan, Pengelolaan Arsip, Pendanaan, dan Sarana Prasarana. Target yang akan dicapai pada Tahun 2024 adalah 92,45, Hasil pengawasan Kearsipan Eksternal dan Verifikasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024

pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia adalah sebesar 93,11 meningkat dari 90,06 pada tahun sebelumnya dengan kategori "AA (Sangat Memuaskan)" berdasarkan pengumuman Kepala Pusat Akreditasi ANRI Nomor AK.01.00/28/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024. Berdasarkan data target dan realisasi Hasil Pengawasan Kearsipan, maka capaian kinerjanya adalah 103,11%. Untuk pengawasan kearsipan tahun 2024, sasaran pengukuran kinerja penyelenggaraan kearsipan melalui pengawasan kearsipan adalah produk kinerja dan *outcome* yang dihasilkan. Adapun rincian Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022, 2023 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 20 Perbandingan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022, 2023 dan 2024

No	Nilai	NHP			Bobot	NHP x Bobot		
		2022	2023	2024		2022	2023	2024
1	Eksternal	83,06	89,04	92,09	60%	49,84	53,42	55,25
2	Internal	94,50	91,58	94,63	40%	37,80	36,63	37,86
	Akumulasi					90.98	90,06	93,11

Gambar 2. 18 Grafik Nilai Hasil Pengawasan Tahun 2020-2024

e. **Indeks Kepuasan Layanan Kearsipan**

Dasar pelaksanaan survey adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat di Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survey dilaksanakan terhadap responden yang menerima layanan pembinaan/konsultasi kearsipan (Perangkat Daerah dan BUMD) dan layanan pemanfaatan/penggunaan arsip (masyarakat).

Gambar 2. 19 Grafik Indeks Kepuasan Layanan Kearsipan Tahun 2020-2024

Survey dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan antara lain: pendampingan kearsipan pada Perangkat Daerah, BUMD, Perusahaan dan Organisasi Masyarakat, Gerakan Sadar dan Tertib Arsip, Optimalisasi Kearsipan Dinamis, Pembinaan Arsiparis, Kepuasan Layanan Kearsipan, Berdasarkan hasil survey diperoleh Indeks Kepuasan sebesar 93,61 dari target 92,45 sehingga capaian kinerjanya 101,25%. Hasil survei sebagai berikut:

Tabel 2. 21 Survey Kepuasan Layanan Kearsipan

No	Kegiatan Survey	Hasil Survey
1	Survey Kepuasan Pembinaan Kearsipan	94,22
2	Survey Kepuasan Layanan Kearsipan	93,00
Rata - rata nilai		93,61 (Sangat Baik)

f. **Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)**

Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan). Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana JIKN, Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI.

T = (a + i + s + j)/4 T

a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip;

i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip;

s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik;

j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN.

Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, telah menetapkan Peraturan Gubernur tentang tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Pengelolaan arsip statis dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang meliputi: akuisisi arsip statis, pengolahan arsip statis, preservasi arsip statis dan akses arsip statis. Hasil penghitungan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 22 Rumus Perhitungan dan Capaian Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja

No	Uraian	Rumus Perhitungan	Jumlah		Persentase
1.	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip (a)	Arsip Aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	360770	X 100	82,18
		Arsip aktif	438991		
2.	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip (i)	Arsip Inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	38500	X 100	100,00
		Arsip Inaktif	38500		
3.	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik (s)	Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	1045	X 100	100,00
		Arsip Statis	1045		
4.	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN (j)	Arsip yang dimasukkan dalam SIKN dan JIKN	1479	X 100	0,31
		Arsip Dinamis dan arsip Statis	478536		
Jumlah		**T = (a + i + s + j) / 4**			**70,62**

Gambar 2. 20 Grafik Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009) Tahun 2020-2024

g. **Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat**

Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat, dengan menggunakan penghitungan rumus yang telah disiapkan.

T = (m + b + g + a + c + i)/6

T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban

m = Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip Dengan NSPK

b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK

g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau

dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK

a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK

c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK

i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK

Tabel 2. 23 Rumus Perhitungan dan Capaian Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

No	Uraian	Rumus Perhitungan	Jumlah		(%)
1.	Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip Dengan NSPK	Jumlah arsip PD yang diajukan permohonan pemusnahan arsip Jumlah pemusnahan arsip sesuai NSPK	36369 41402	X 100	87,84
2.	Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	Jumlah perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana Jumlah kegiatan perlindungan arsip dari bencana sesuai NSPK	20 20	X 100	100
3.	Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK	Jumlah Kegiatan akuisisi arsip dari Dinas Jumlah kegiatan akuisisi arsip sesuai NSPK	1 1	X 100	100
4.	Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	Jumlah autentifikasi arsip statis dan hasil alih media Jumlah autentifikasi arsip statis dan hasil alih media sesuai NSPK	20 20	X 100	100

No	Uraian	Rumus Perhitungan	Jumlah		(%)
5.	Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	Jumlah kegiatan pencarian arsip statis	1	X 100	100
		Jumlah kegiatan pencarian arsip statis sesuai NSPK	1		
6.	Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	Jumlah kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	5	X 100	100
		Jumlah kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK	5		
Jumlah		**T = (m + b + g + a + c + i)/6**			**97,97**

Gambar 2. 21 Grafik Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Tahun 2020-2024

2. Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun 2020-2024

Program pada Renstra tahun 2018-2022 terdiri atas 4 program yaitu: Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan, Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perpustakaan, Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perpustakaan dan Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk nomenklatur program distandarkan. Untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdapat 3 Program yaitu Program Pembinaan Perpustakaan, Program Pengelolaan Arsip dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Untuk Renstra Tahun 2023-2026 terdapat program baru yaitu Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno. Untuk realisasi indikator kinerja sebagai berikut:

a. Rasio pengunjung perpustakaan

   Untuk indikator rasio pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan dengan dengan realisasi rasio 7,3 % pada tahun 2020, kemudian di tahun 2021 meningkat 16,81%. Untuk tahun 2022 targetnya 24,60% sampai dengan akhir tahun 2022 terealisasi sebesar 35,31% atau sebanyak 3.967.721 orang.

b. Persentase perpustakaan binaan yang memenuhi SNP (Standar Nasional Perpustakaan)

   Pada tahun 2020 pemenuhan target perpustakaan SNP adalah 55 %, meningkat di tahun 2021 menjadi 75 %. Realisasi pada tahun 2022 adalah sebesar 115% atau sejumlah 15 perpustakaan umum, kelurahan/kecamatan yang memenuhi SNP dengan mendapatkan Akreditasi dari Perpustakaan Nasional.

c. Persentase pengelolaan kearsipan di SKPD/UKPD dan BUMD sesuai standar

   Kegiatan pengawasan kearsipan melalui audit penyelenggaraan kearsipan pada Perangkat Daerah dan BUMD dengan realisasi kinerja tahun 2020 telah tercapai 62,99 %, meningkat di tahun 2021 menjadi 85,2%. Sampai tahun 2022 telah terealisasi kinerja 100% dengan jumlah Perangkat Daerah dan BUMD yang telah berkinerja sesuai Standar Kearsipan sebanyak 27 lembaga.

d. Persentase arsip yang siap layan (e-arsip)

   Realisasi persentase arsip yang siap layan (e-arsip) pada tahun 2020 sebesar 59,52%, meningkat di tahun 2021 sebesar 80,63%. Sampai akhir tahun 2022 telah terealisasi sebesar 100,42% atau 45.189 boks arsip dari target 45.000 boks arsip siap layan (e-arsip).

e. Indeks kepuasan pelayanan kantor

   Survey kepuasan pelayanan kantor terhadap ketersediaan antara lain: alat tulis kantor, peralatan rumah tangga, cetakan dan penggandaan, dan penyediaan makanan dan minuman dilaksanakan setiap triwulan dengan Indikator program Indeks kepuasan pelayanan kantor dengan target kinerja 4 indeks. Berdasarkan hasil Survei yang dilaksanakan mendapat skor 3,649 dengan nilai persepsi 4 (sangat baik). Sehingga terealisasi 4 indeks sehingga capaian indikator program tahun 2022 adalah 100%.

f. Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional

   Survey kepuasan terhadap pelayanan kendaraan operasional dilaksanakan setiap triwulan kepada pegawai di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan beserta Suku Dinas di 5 (lima) wilayah DKI Jakarta, dengan Indeks survey didapatkan dari nilai rata-rata akumulasi survey

kepuasan pelayanan kendaraan operasional. Target Indikator program Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional kantor adalah 4 indeks dengan realisasi 4 indeks. Berdasarkan Survei dilaksanakan mendapat skor 3,61 dengan nilai persepsi 4 (sangat baik), sehingga capaian indikator program pada tahun 2022 adalah 100%.

g. Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat

   Realisasi kinerja indikator tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat pada tahun 2023 adalah 34,8% atau 3.918.306 orang. Untuk tahun 2024 dengan target 25% atau 2.831.960 kunjungan. Realisasi kunjungan pada Perpustakaan Cikini dan PDS HB Jassin dan 5 Perpustakaan Wilayah Kota Administrasi serta aktivitas literasi berbasis *online*. Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan pada tahun 2024 sebanyak 3.365.903 orang atau tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat tercapai 29,71 % sehingga capaiannya 118,84%.

h. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk

   Penghitungan rasio ketercukupan koleksi merupakan dari jumlah koleksi dibagi 2 (dua) kali jumlah penduduk (berdasarkan IFLA). Jumlah koleksi pada akhir 2022 adalah 1.221.314 eksemplar atau 0.0545 dari jumlah penduduk sebanyak 11.204.714 orang. Untuk tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi 1.356.552 eksemplar atau rasio koleksi perpustakaan dibandingkan dengan jumlah penduduk menjadi 0,0605. Tahun 2024 rasionya meningkat menjadi 0,0634 dari target kinerja 0,0625 atau realisasinya mencapai 101,4%, ada penambahan koleksi sebanyak 125.757 eksemplar sehingga menjadi 1.438.414 ekspemplar dibandingkan dengan jumlah pendudduk 11.327.838 orang,

sehingga rasio kecukupan koleksi adalah 1:0,06 artinya setiap 100 orang memiliki akses terhadap 6 judul buku.

i. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk
Sampai dengan tahun 2022 telah dilaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dibina dan dikembangkan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) sebanyak 1.429 orang atau dengan rasion 0.0001 dibandingkan jumlah penduduk 10.748.230. Pada tahun 2024 rasio ditargetkan meningkat menjadi 0.0003, sampai dengan akhir tahun 2024 telah dilaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan menuju Standar Nasional Perpustakaan sebanyak 1.727 orang sehingga jumlah keseluruhan menjadi 3.156 orang atau rasio 0.0003 dari jumlah penduduk.

j. Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar
Sampai dengan tahun 2022 Perpustakaan yang telah memenuhi standar nasional perpustakaan adalah 4,9 %, kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 8,14%. Pada tahun 2024, target kumulatif 9,9% dari 280 Perpustakaan RPTRA yaitu 28 Perpustakaan RPTRA yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Sampai dengan akhir 2024 telah tercapai 11,4% dari target yang ditetapkan sebesar 9,9%.

k. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca
Hasil pengukuran tingkat kegemaran membaca tahun 2023 adalah 72,68 dengan kategori tinggi, kemudian untuk hasil tahun 2024 adalah 72,93 dari target sebesar kinerja 72,91 sehingga capaian Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Tahun 2024 adalah 100,03 %. Ada kenaikan yang sangat tipis dari tahun sebelumnya.

l. Persentase Capaian Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang menjadi Koleksi Daerah

Karya Cetak dan Karya Rekam adalah karya intelektual dan atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak atau rekam yang diperuntukkan bagi umum (Sumber : UU 13 Tahun 2018). Untuk menghitung ketercapaian kinerja program ini dengan Jumlah KCKR yang dilestarikan dibagi jumlah KCKR yang diterbitkan pada tahun berjalan dikali 100%. Target tahun 2024 adalah 25,5% yang setara dengan 5.500 eksemplar. Penambahan koleksi KCKR yang diterima, diolah dan siap layan adalah 5.517 eksemplar atau 27,79% dengan capaian kinerja 107%.

m. Persentase Capaian Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan

Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. (UU 43 Tahun 2007).

Untuk menghitung capaian kinerja melalui Naskah Kuno Milik Daerah yang dimanfaatkan dibagi naskah kuno yang dimiliki dikali 100%. Target tahun 2024 adalah 20% atau 50 naskah kuno kunci, dengan realisasi 20% sehingga kinerjanya 100%.

n. Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan

Berdasarkan perhitungan capaian Indikator: Ketersediaan arsip siap layan yang didapat dari komponen data daftar arsip aktif, data daftar arsip inaktif, data sarana bantu temu balik dan penginputan arsip pada SIKN telah terealisasi sebesar 43,21 dari target kinerja 39,20% sehingga capaian

kinerjanya 109,9, ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi target dan kinerja tahun 2023 yaitu 37,97% dari target 36,91% dengan presentase capaian kinerja sebesar 102,88%.

o. Persentase Lembaga (OPD,BUMD) yang mengelola arsip sesuai dengan NSPK Penerapan Arsip Sesuai Pengukuran Lembaga (OPD,BUMD) yang mengelola arsip sesuai dengan NSPK dilakukan melalui kegiatan pengawasan kearsipan dengan audit penyelenggaraan kearsipan pada Perangkat Daerah dan BUMD yang ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 899 Tahun 2021 tentang Tim Pengawas Kearsipan. Audit kearsipan dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disediakan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berupa Form ASKI (Audit Sistem Kearsipan Internal) dan Form ASKE (Audit Sistem Kearsipan Eksternal). Target kinerja Indikator program sampai dengan tahun 2024 adalah 74.07 %, sampai dengan akhir tahun 2024 telah terealisasi kinerja 74,07 % atau jumlah Perangkat Daerah dan BUMD yang telah berkinerja sesuai Standar Kearsipan sebanyak 40 lembaga. atau ada penambahan 4 lembaga yaitu Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk dan Perumda Dharma Jaya sehingga kinerjanya tercapai 100 %.

p. Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Survey kepuasan pelayanan kantor terhadap ketersediaan antara lain: alat tulis kantor, peralatan rumah tangga, cetakan dan penggandaan, dan penyediaan makanan dan minuman dilaksanakan setiap triwulan dengan Indikator

program Indeks kepuasan pelayanan kantor dengan target kinerja 4 indeks. Berdasarkan hasil Survei yang dilaksanakan kepada pegawai di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan beserta Suku Dinas di 5 wilayah DKI Jakarta dengan mendapat skor 3,649 dengan nilai persepsi 4 (sangat baik). Sehingga terealisasi 4 indeks sehingga capaian indikator program tahun 2024 adalah 100%. Indeks survey didapatkan dari nilai rata-rata akumulasi survey kepuasan pelayanan kantor Dinas dan Sudin Lima wilayah Kota

Tabel 2. 24 Realisasi Kinerja Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020-2024

No	Indikator KInerja	Satuan	Target Kinerja pada Tahun					Realisasi Kinerja pada Tahun					Capaian Kinerja pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio pengunjung perpustakaan	Persen	28,58	10.55	24.6	-	-	7,3	16.81	35.3	-	-	25,68	159.34	143.50	-	-
2	Persentase perpustakaan binaan yang memenuhi SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	Persen	55	75	100	-	-	55	75	115	-	-	100	100	115	-	-
3	Persentase Pengelolaan Kearsipan di SKPD/UKPD dan BUMD sesuai standar	Persen	62,96	81.48	100	-	-	62,96	85.2	100	-	-	100	104.56	100	-	-
4	Persentase Arsip yang Siap Layan (e-Arsip)	Persen	56,67	77.78	100	-	-	59,52	80.63	100.42	-	-	105,03	103.66	100.42	-	-
5	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4	4	-	-	4	4	4	-	-	100	100	100	-	-
6	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4	4	-	-	4	4	4	-	-	100	100	100	-	-

No	Indikator KInerja	Satuan	Target Kinerja pada Tahun					Realisasi Kinerja pada Tahun					Capaian Kinerja pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
7	Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	Persen	-	-	-	24.8	25	-	-	-	34.8	29.71	-	-	-	120	118.84
8	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Dengan Penduduk	Rasio	-	-	-	0.0588	0.0625	-	-	-	0.0605	0.0634	-	-	-	102.89	101.44
9	Persentase Peningkatan Perpustakaan Sesuai Standar	Persen	-	-	-	7.4	9.9	-	-	-	8.14	11.4	-	-	-	110	115.15
10	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	-	-	-	72.61	72.91	-	-	-	72.68	72.93	-	-	-	100.10	100.03
11	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan Dengan Penduduk	Rasio	-	-	-	0.0003	0.0004	-	-	-	0.0003	0.00047	-	-	-	100	117.50
12	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	-	-	-	4	4	-	-	-	4	4	-	-	-	100	100.00

No	Indikator KInerja	Satuan	Target Kinerja pada Tahun					Realisasi Kinerja pada Tahun					Capaian Kinerja pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
13	Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan	Persen	-	-	-	36.91	39.36	-	-	-	37.97	43.21	-	-	-	102.87	109.78
14	Persentase Lembaga (Opd,Bumd) Yang Mengelola Arsip Sesuai Dengan Nspk	Persen	-	-	-	61.11	74.07	-	-	-	61.11	74.07	-	-	-	100	100.00
15	Persentase Capaian Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam Yang Menjadi Koleksi Daerah	Persen	-	-	-	25	27.5	-	-	-	26.75	27.79	-	-	-	107	101.05
16	Persentase Capaian Naskah Kuno Milik Daerah Yang Dilestarikan	Persen	-	-	-	10	20	-	-	-	10	20	-	-	-	100	100.00

3. Realisasi Anggaran

Sumber daya anggaran untuk belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia serta sumber pembiayaan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data bahwa, anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam lima tahun terakhir yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta setiap tahun mengalami kenaikan termasuk juga realisasinya.

Gambar 2. 22 Grafik Anggaran dan Realisasi Tahun 2020-2024

Untuk tahun 2020 anggaran penetapan sebesar Rp. 152.871.572.493 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 81.833.088.000 dan belanja langsung Rp. 71.038.4.84.493. Tahun 2020 merupakan awal terjadinya covid-19, adanya *realokasi* dan *refocusing* anggaran sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat

dan Perekonomian Nasional dari anggaran Rp. 152.871.572.493 direfocusing menjadi Rp. 93.639.501.649 (38,75 %) dengan realisasi Rp. 88.289.324.584 atau 90,98%.

Tabel 2. 25 Anggaran dan Realisasi Tahun 2020

No	Belanja/Urusan/ Program	APBD	Refocusing	Perubahan APBD	Realisasi	%
A	**Belanja Tidak Langsung**	**81.833.088.000**	**55.069.970.000**	**57.630.539.717**	49.860.483.881	86,52
B	**Belanja Langsung**	**71.038.484.493**	**38.569.531.649**	**39.416.632.299**	**38.428.840.703**	**97,49**
a	Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan	34.987.969.111	12.755.326.422	12.547.860.788	12.273.740.507	97,82
b	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perpustakaan	23.414.844.142	18.947.040.408	20.028.666.022	19.460.273.771	97,16
c	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perpustakaan	1.233.575.025	390.718.411	363.659.081	345.884.931	95,11
a	Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan	11.402.096.215	6.476.446.408	6.476.446.408	6.348.941.494	98,03
	TOTAL	**152.871.572.493**	**93.639.501.649**	**97.047.172.016**	**88.289.324.584**	90,**98**

Untuk anggaran penetapan tahun 2021 sebesar Rp. 137.013.776.426 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 135.965.412.742 dan Belanja Modal Rp. 1.048.363.684. Untuk anggaran Perubahan APBD menjadi Rp. 118.339.160.635 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 117.412.260.711 dan Belanja Modal Rp. 926.899.924. Realisasi anggaran pada akhir tahun Rp. 115.445.477.108 atau 97,55%.

Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 168.069.820.317 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 143.663.997.226 dan Belanja Modal Rp. 24.405.823.091. Untuk anggaran pada Pergeseran ke- 7 APBD Tahun 2022 menjadiRp. 168.585.365.775 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 145.420.654.443 dan Belanja Modal Rp. 23.164.711.332. dengan capaian realisasi anggaran pada akhir tahun Rp. 152.795.688.576 atau 90,63%.

Tabel 2. 26 Anggaran dan Realisasi Tahun 2021 dan 2022

No	Program	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
1	Program Pembinaan Perpustakaan	11.696.336.945	11.356.787.332	97,1	46.353.089.710	43.495.117.912	93,83
3	Program Pengelolaan Arsip	6.406.821.966	6.282.163.310	98,05	8.884.310.118	8.428.560.928	94,87
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100.236.001.724	97.806.526.466	97,58	113.347.965.947	100.872.009.736	88,99
	TOTAL	**118.339.160.635**	**115.445.477.108**	**97,55**	168.585.365.775	**152.795.688.576**	**90,63**

Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta pada saat penetapan APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 276.237.973.367 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 194.327.275.976 dan Belanja Modal Rp. 81.910.697.391. Untuk anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2023 menjadi Rp. 229.643.136.284 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 190.374.677.571 dan Belanja Modal Rp. 39.268.458.713. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 218.858.342.236 atau 95,30 %.

Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta pada saat penetapan APBD Tahun 2024 sebesar Rp, 272,697,101,664,00 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp, 217,296,802,129,00 dan Belanja Modal Rp, 55,400,299,535,00, Untuk anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2024 menjadi Rp, 267,358,178,114 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp, 211,734,838,652,00 dan Belanja Modal Rp, 55,623,339,462,00, Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp, 258,090,634,345,00 atau 96,53 %.

Tabel 2. 27 Anggaran dan Realisasi Tahun 2023 dan 2024

No	Program	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
1	Program Pembinaan Perpustakaan	79,584,724,206	75,512,618,584	94.88	101,982,713,647	99,355,089,311	97,42
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	645,624,820	631,365,406	97.79	890,107,782	885,681,919	99,5
3	Program Pengelolaan Arsip	26,480,579,239	24,049,442,564	90.82	21,945,831,318	20,747,197,995	94,54
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	122,932,208,019	118,664,915,682	96.53	142,539,525,367	137,102,665,120	96,19
	TOTAL	229,643,136,284	218,858,342,236	95.30	267,358,178,114	258,090,634,345	96,53

4. Analisis keberhasilan dan kegagalan,

   Faktor-faktor pendorong pencapaian kinerja pada urusan perpustakaan antara lain:

   a. Perkembangan teknologi memungkinkan akses mudah ke sumber informasi sehingga dapat menjadi faktor pendorong budaya literasi, peran masyarakat dan komunitas juga dapat memperluas kemudahan pemerintah dalam meningkatkan budaya literasi di masyarakat.
   b. tersedianya perpustakaan masyarakat (perpustakaan RPTRA, TBM, iJakarta) dan perputakaan keliling untuk mendekatkan akses bahan bacaan ke masyarakat, optimalisasi media sosial sebagai kanal literasi

   Faktor Penghambat pendorong pencapaian kinerja pada urusan perpustakaan:

   a. Kurangnya minat baca: Kurangnya minat dan motivasi untuk membaca dapat menjadi penghambat utama budaya literasi.

b. Keterbatasan kemampuan membaca: Keterbatasan kemampuan membaca, baik karena kurangnya pendidikan atau kesulitan belajar, dapat menghambat seseorang untuk menikmati kegiatan membaca.
c. Kurangnya kesadaran akan pentingnya literasi: Kurangnya kesadaran akan pentingnya literasi dalam kehidupan sehari-hari dapat membuat seseorang tidak tertarik untuk membaca.

Untuk keberhasilan pencapaian kinerja urusan perpustakaan dengan jumlah sumber daya manusia yang tersebar di Bidang-bidang, Suku Dinas dan Unit Pengelola Perpustakaan sebanyak 353 orang yang terdiri atas eselon 3 sebanyak 2 Orang, eselon 4 sebanyak 10 Orang, Pustakawan 42 Orang, Pelaksana 29 orang, penyedia jasa lainnya perorangan layanan perpustakaan stasioner 198 orang, layanan perpustakaan keliling 71 Orang. Dalam pemanfaatan sumber daya teknologi didukung dengan sumber daya manusia yang terdiri dari 16 aparatur sipil negara dan 12 tenaga ahli yang diberdayakan untuk pengembangan aplikasi, pengelolaan jaringan dan pengelolaan data center.

Faktor pendorong tercapainya indikator sasaran pada urusan kearsipan:

a. Kebijakan kearsipan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sosialisasi terhadap seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
b. Pembinaan dalam hal pendampingan pengelolaan arsip dinamis terhadap seluruh perangkat daerah dengan menghasilkan daftar arsip dinamis.
c. Melaksanakan kegiatan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan kearsipan dengan organisasi masyarakat, BUMD dan perusahaan swasta.
d. Penggunaan aplikasi pengelolaan arsip dinamis (E-Office) untuk pembuatan dan penerimaan naskah dinas.
e. Pengolahan arsip inaktif pada *record centre*.

f. Pemindahan arsip dari satuan kerja ke lembaga kearsipan, dan penyerahan arsip statis.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat pada urusan kearsipan:

a. Pengelolaan arsip terjaga belum terhimpun sehingga perlu dilakukan inventarisasi dan pendampingan secara khusus.
b. Belum terdapat penyampaian salinan autentik arsip terjaga ke ANRI serta penerapan seluruh sasaran tertib GNSTA.
c. Aplikasi bidang kearsipan dinamis yang digunakan belum mencakup keseluruhan proses bisnis kearsipan.
d. Pelaksanaan pemusnahan arsip yang tidak lagi bernilai guna belum dilakukan secara rutin.
e. Arsip statis yang diserahkan kepada lembaga kearsipan masih sedikit, dan sebagian arsip yang bernilai statis belum dalam kondisi terberkas atau utuh, sehingga informasi yang dapat disajikan kepada masyarakat belum sepenuhnya komprehensif.
f. Pengolahan arsip statis melalui kegiatan penyusunan sarana temu kembali arsip: daftar arsip statis, inventaris dan guide arsip statis perlu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
g. Akses dan penyediaan arsip statis masih dilakukan secara manual, mengingat belum tersedianya sistem atau aplikasi khusus. Saat ini, pemanfaatan akses arsip statis masih mengandalkan SIKN/JIKN yang dikelola oleh ANRI.
h. Belum terpenuhinya pemenuhan jumlah arsiparis dan sertifikasi arsiparis.

Untuk keberhasilan pencapaian kinerja urusan kearsipan dengan jumlah sumber daya manusia yang tersebar di bidang, Suku Dinas dan Unit Pengelola Perpustakaan sebanyak 153 orang yang terdiri atas eselon 3 sebanyak 1 Orang, eselon 4 sebanyak 10 Orang, Arsiparis 34 Orang, Pelaksana 33 orang, penyedia jasa lainnya perorangan layanan perpustakaan stasioner 75 orang. Dalam pemanfaatan sumber daya teknologi didukung dengan sumber daya manusia yang terdiri dari 16 aparatur sipil negara dan 12 tenaga ahli yang diberdayakan untuk pengembangan aplikasi, pengelolaan jaringan dan pengelolaan data center.

5. Penilaian terhadap dampak kinerja *(outcome)*

Penilaian terhadap dampak kinerja Renstra Dispusip 2020–2024 berfokus pada perubahan yang dirasakan pemangku kepentingan (masyarakat, perangkat daerah, dan ekosistem layanan) sebagai hasil dari program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penilaian ini diukur terutama melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dispusip serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan perpustakaan dan kearsipan yang telah ditetapkan bersifat terstandar, obyektif, dan dapat diperbandingkan lintas daerah.

Indikator kinerja

a. Nilai Budaya Literasi

   Capaian kinerja nilai budaya literasi tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang positif. Skor yang diperoleh sebesar 72,9 berhasil melampaui target 71,4 dengan capaian 100,97%. Peningkatan juga tampak pada kebiasaan membaca, di mana persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci naik dari 63,95% pada tahun 2023 menjadi 75,47% pada 2024. Hal ini mencerminkan semakin baiknya kemampuan literasi individu yang menjadi modal penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia.

   Di sisi lain, tingkat pemanfaatan internet sangat tinggi (96,1%) yang memberikan peluang besar dalam memperluas akses informasi, namun juga memunculkan tantangan berupa meningkatnya risiko penyebaran informasi yang tidak akurat. Sementara itu, tingkat kunjungan ke perpustakaan dan taman bacaan masyarakat mengalami penurunan cukup tajam dari 52,90% pada 2023 menjadi 44,7% pada 2024, yang menunjukkan berkurangnya peran sosial perpustakaan sebagai pusat literasi publik. Ketimpangan antar wilayah juga masih terlihat, dengan Jakarta Selatan mencatat skor tertinggi (75,89) dan Kepulauan Seribu terendah (58,33), menandakan belum meratanya pembangunan literasi di seluruh wilayah. Secara umum, peningkatan nilai budaya literasi 2024 memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Indeks

Pembangunan Kebudayaan (IPK) DKI Jakarta dan mendukung arah Renstra 2025–2029. Meski demikian, tantangan berupa menurunnya peran perpustakaan, adanya ketimpangan wilayah, serta dominasi penggunaan internet perlu diantisipasi dengan strategi berkelanjutan. Upaya ini penting agar peningkatan literasi tidak hanya tercapai pada level individu, tetapi juga dapat diperkuat secara kolektif melalui fasilitas publik dan pemerataan program literasi di seluruh Jakarta**.**

b. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca

Hasil pengukuran Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) masyarakat DKI Jakarta pada tahun 2024 mencapai skor 72,93, sedikit meningkat dibandingkan 2023 (72,68) dan melampaui target 72,91 dengan capaian kinerja 100,03%. Meskipun kenaikannya tipis, hal ini mencerminkan konsistensi perilaku membaca masyarakat yang berada dalam kategori tinggi. Data juga menunjukkan dinamika menarik, di mana frekuensi membaca menurun, namun durasi membaca meningkat, disertai kenaikan jumlah bahan bacaan. Kondisi ini mengindikasikan keterlibatan membaca yang lebih mendalam meskipun dilakukan dengan frekuensi lebih sedikit.

Perkembangan literasi digital juga cukup menarik perhatian. Frekuensi akses internet mengalami penurunan, tetapi durasi penggunaannya justru meningkat signifikan, menunjukkan ketergantungan masyarakat pada internet, khususnya melalui smartphone, sebagai sarana utama mengakses informasi. Distribusi responden memperlihatkan lebih dari separuh masyarakat (52,4%) berada pada kategori sangat tinggi dalam kegemaran membaca, sementara hanya sebagian kecil (0,2%) yang berada pada kategori sangat rendah. Namun, ketimpangan antar wilayah masih terlihat, dengan Jakarta Timur mencatat skor tertinggi (75,08), sementara Kepulauan Seribu tertinggal jauh dengan skor 42,81.

Secara keseluruhan, capaian TGM tahun 2024 memberikan dampak positif terhadap pembangunan literasi masyarakat DKI Jakarta. Kenaikan tipis tetap menandakan keberlanjutan minat baca, baik cetak maupun digital. Namun, tantangan yang muncul adalah menurunnya frekuensi membaca, adanya kesenjangan antar wilayah, serta dominasi bacaan digital yang berpotensi mempengaruhi kualitas literasi. Oleh karena itu, strategi peningkatan budaya membaca perlu diarahkan pada pemerataan akses, penguatan fasilitas literasi, dan program yang relevan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

c. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) DKI Jakarta tahun 2024 menunjukkan capaian yang konsisten tinggi dengan nilai 93,17 atau setara konversi 19,57. Hasil ini diperoleh dari pengukuran berbagai unsur pembangunan literasi, seperti pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan, jumlah perpustakaan ber-SNP, keterlibatan masyarakat, serta jumlah anggota perpustakaan. Capaian ini menegaskan bahwa upaya pemerintah provinsi bersama pemerintah kota/kabupaten dalam mengembangkan perpustakaan sebagai pusat literasi masyarakat sudah berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap penguatan budaya literasi di Jakarta.

Jika ditinjau berdasarkan wilayah, terdapat variasi capaian yang cukup mencolok. Jakarta Utara mencatat nilai IPLM tertinggi dengan skor 21,00, diikuti oleh Jakarta Timur dengan 20,71. Sementara itu, Kepulauan Seribu menempati posisi terendah dengan skor 18,92, meskipun masih berada pada kategori “Sangat Tinggi”. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antarwilayah dalam hal pemanfaatan dan pemerataan akses layanan literasi.

Secara keseluruhan, kinerja IPLM DKI Jakarta pada tahun 2024 dapat dinilai berdampak baik karena seluruh wilayah telah masuk kategori “Sangat Tinggi”. Namun, masih diperlukan strategi lanjutan untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah, terutama di Kepulauan Seribu, melalui peningkatan akses layanan perpustakaan, pemerataan koleksi, serta kegiatan literasi berbasis masyarakat. Upaya tersebut penting untuk memastikan pembangunan literasi berjalan inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Jakarta.

d. Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan

Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 menunjukkan capaian yang sangat baik dengan skor 93,11, melampaui target 92,45 dan meningkat dibandingkan 90,06 pada tahun sebelumnya. Dengan capaian 103,11% dan kategori “AA (Sangat Memuaskan)”, hasil ini mencerminkan kinerja pengelolaan kearsipan yang semakin efektif, baik dari aspek kebijakan, organisasi, SDM, maupun pemanfaatan sarana prasarana. Pencapaian ini menjadi bukti adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem kearsipan, meskipun masih terdapat rekomendasi ANRI yang perlu ditindaklanjuti, seperti optimalisasi aplikasi Srikandi, penyusunan kebijakan arsip terjaga, hingga pemenuhan kebutuhan arsiparis bersertifikat.

Di sisi lain, Indeks Kepuasan Layanan Kearsipan juga menunjukkan hasil positif. Pada tahun 2024, nilai survei mencapai 93,61 atau 101,25% dari target, dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini menggambarkan bahwa layanan kearsipan, baik dalam bentuk pembinaan maupun pelayanan langsung kepada masyarakat, dinilai memuaskan. Dampak kinerjanya tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas layanan, tetapi juga memperkuat kesadaran serta kepatuhan perangkat daerah dan masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan arsip secara tertib dan profesional.

Secara keseluruhan, capaian kinerja kearsipan DKI Jakarta tahun 2024 berdampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan. Namun, keberhasilan ini perlu diikuti dengan strategi penguatan kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM agar sistem kearsipan semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu menjawab tantangan pengelolaan arsip di masa mendatang.

6. Rekomendasi langkah strategis untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di masa depan

a. Nilai Budaya Literasi

Berdasarkan hasil pengukuran nilai Budaya Literasi di DKI Jakarta tahun 2024, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan skor budaya literasi:

1) Penguatan Infrastruktur Literasi di Wilayah dengan Skor IBL Rendah

Penguatan infrastruktur literasi di wilayah yang mencatat skor Indeks Budaya Literasi (IBL) rendah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan literasi. Upaya ini dapat diwujudkan dengan memperluas jaringan perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), khususnya di daerah yang minim fasilitas literasi. Selain itu, pengembangan Pojok Literasi di tingkat komunitas, seperti di balai warga, rumah ibadah, atau ruang publik lainnya, dapat menjadi solusi untuk mendekatkan bahan bacaan berkualitas kepada masyarakat. Langkah ini tidak hanya bertujuan menyediakan akses fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan membaca dan belajar bersama. Dengan pendekatan berbasis komunitas, program ini diharapkan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlayani, sekaligus mendorong peningkatan kesadaran literasi di seluruh lapisan masyarakat.

2) Pengembangan Platform Digital dan Literasi Digital

Dispusip mengembangkan platform digital literasi terpadu yang tidak hanya memberikan akses ke koleksi perpustakaan digital, tetapi juga mencakup beragam fitur untuk mendukung aktivitas literasi masyarakat. Platform ini dapat menyediakan layanan seperti katalog buku digital, kegiatan literasi daring, kursus interaktif, video pembelajaran, hingga forum diskusi yang memungkinkan kolaborasi dan berbagi pengetahuan antar pengguna. Selain itu, platform ini dapat diintegrasikan dengan layanan masyarakat lainnya, seperti jadwal kegiatan di perpustakaan umum, kompetisi literasi, dan akses ke materi pembelajaran lokal. Selain itu, Dispusip juga dapat menyelenggarakan program pelatihan literasi digital secara berkala, yang dirancang khusus untuk berbagai segmen masyarakat. Untuk generasi tua, pelatihan ini dapat difokuskan pada pengenalan dasar teknologi, cara mencari informasi secara daring, dan memanfaatkan perangkat digital untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, bagi pekerja non-digital, pelatihan ini dapat diarahkan pada keterampilan menggunakan perangkat lunak dan alat digital untuk meningkatkan produktivitas kerja serta kemampuan literasi informasi di tempat kerja. Program ini dapat diselenggarakan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, komunitas teknologi, dan perusahaan lokal.

3) Program Literasi berbasis Keluarga

Dispusip dapat mengembangan kampanye literasi keluarga dan bimbingan membaca. Kampanye ini bertujuan untuk mendorong keluarga menjadi bagian aktif dalam pengembangan budaya literasi. Program ini mengajak orang tua untuk melibatkan anak-anak dalam berbagai aktivitas literasi seperti membaca bersama, mendongeng, atau menulis jurnal keluarga. Selain itu, kampanye ini juga dapat mencakup penyediaan panduan praktis bagi keluarga tentang cara menciptakan lingkungan yang mendukung literasi di rumah, seperti membangun sudut baca keluarga atau

merancang jadwal membaca rutin. Sementara, kegiatan bimbingan membaca untuk mendukung anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan akses bahan bacaan atau sumber daya Pendidikan. Program ini akan menyediakan mentor baca yang berperan sebagai pendamping anak dalam meningkatkan kemampuan membaca dan minat literasi. Mentor ini bisa berasal dari relawan, guru, atau komunitas literasi lokal. Program ini juga dapat mencakup pemberian akses bahan bacaan berkualitas melalui perpustakaan keliling atau paket buku untuk keluarga kurang mampu, sehingga anak-anak dapat terus belajar dan berkembang meskipun dengan keterbatasan sumber daya.

b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 menghasilkan beberapa rekomendasi antara lain:

1) Rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan pembangunan literasi masyarakat Provinsi DKI Jakarta antara lain:
   a) Prioritas perbaikan pada unsur dengan nilai terkecil dan belum memenuhi standar yang ditetapkan, yaitu :
      - UPLM1 (Pemerataan Layanan Perpustakaan) memiliki nilai terkecil dan jumlah perpustakaan yang tersedia belum memenuhi seluruh kelembagaan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Terdapat kekurangan sebanyak 790 perpustakaan yang perlu dipenuhi agar seluruh kelembagaan (kecamatan, kelurahan, sekolah, Perguruan Tinggi dan instansi daerah) memiliki perpustakaan.
      - UPLM 2 (Ketercukupan Koleksi Perpustakaan), jumlah koleksi yang ada belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh IFLA/UNESCO. Koleksi perpustakaan perlu memenuhi kekurangan koleksi sebanyak

19.424.186 judul buku untuk mencapai target yang ditetapkan oleh IFLA/UNESCO sebesar 2 kali jumlah penduduk.

b) Prioritas perbaikan pada wilayah kabupaten/kota yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, yaitu:
   - Kabupaten Kepulauan Seribu, perlu meningkatkan jumlah koleksi sebanyak 24.469 judul agar memenuhi standar IFLA/UNESCO.
   - Kota Jakarta Barat, perlu meningkatkan jumlah koleksi sebanyak 4.423.822 judul agar memenuhi standar IFLA/UNESCO. Selain itu, perlu meningkatkan jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP untuk memenuhi selisih capaian sebesar 10,46% agar dapat mencapai target Renstra Perpusnas RI.
   - Kota Jakarta Pusat, perlu meningkatkan jumlah koleksi sebanyak 1.974.787 judul agar memenuhi standar IFLA/UNESCO.
   - Kota Jakarta Selatan, perlu meningkatkan jumlah koleksi sebanyak 4.267.286 judul agar memenuhi standar IFLA/UNESCO. Selain itu, perlu meningkatkan jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP untuk memenuhi selisih capaian sebesar 4,57% agar dapat mencapai target Renstra Perpusnas RI.
   - Kota Jakarta Timur, perlu meningkatkan jumlah koleksi sebanyak 5.565.427 judul agar memenuhi standar IFLA/UNESCO.
   - Kota Jakarta Utara, perlu meningkatkan jumlah koleksi sebanyak 3.372.124 judul agar memenuhi standar IFLA/UNESCO.

2) Rekomendasi strategis untuk penyusunan program dan kegiatan berkaitan dengan penambahan jumlah koleksi buku perpustakaan yang tentu saja memerlukan anggaran dalam

pelaksanaannya sehingga perlu adanya peningkatan alokasi anggaran pengadaan koleksi perpustakaan. Hal ini sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan jumlah koleksi buku di seluruh perpustakaan di Provinsi DKI Jakarta.

3) Rekomendasi strategis untuk penyusunan kebijakan/regulasi yang berkaitan dengan pengembangan perpustakaan karena belum ada regulasi tentang pengembangan perpustakaan saat ini di Provinsi DKI Jakarta. Dengan adanya kebijakan/regulasi tersebut, diharapkan semakin menguatkan upaya Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota ataupun Provinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan perpustakaan agar lebih optimal dalam menjalankan perannya sebagai wahana belajar sepanjang hayat dalam mencapai budaya literasi masyarakat DKI Jakarta.
4) Rekomendasi teknis yaitu melakukan pendataan dengan lebih komprehensif menyangkut seluruh unsur pembangunan literasi masyarakat dan melakukan input data ke dalam aplikasi pendataan Perpusnas RI (perpusnas.go.id). Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pendataan unsur IPLM di tahun berikutnya sekaligus juga sebagai proses monitoring terhadap capaian wilayah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta.
5) Penggunaan rumus pedoman IPLM 2024 untuk tahun yang akan datang. Dalam meningkatkan akurasi dan relevansi hasil perhitungan IPLM Provinsi dengan IPLM secara nasional, disarankan agar perhitungan pada tahun mendatang menggunakan rumus pedoman IPLM 2024 yang terbaru. Pemahaman dan penerapan rumus pedoman yang baru juga dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran berdasarkan hasil evaluasi yang lebih valid.

c. Nilai Hasil Pengawasan

Berdasarkan hasil pengawasan ANRI, rekomendasi Kinerja yang perlu ditingkatkan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1) Melanjutkan penyusunan kebijakan pengelolaan arsip terjaga hingga penetapan serta mensosialisasikan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
2) Penyampaian salinan autentik arsip terjaga ke ANRI serta penerapan seluruh sasaran tertib GNSTA;
3) Pemindahan arsip inaktif dengan retensi sekurang kurangnya 10 tahun dari perangkat daerah, penyelenggara pemerintahan daerah provinsi, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, badan usaha milik daerah dan dari swasta yang kegiatannya dibiayai oleh APBD dan perseorangan
4) Penggunaan aplikasi Srikandi secara optimal pada seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
5) Pelaksanaan pemusnahan arsip yang tidak lagi bernilai guna secara rutin dan sesuai prosedur;
6) Akuisisi arsip yang mewakili seluruh fungsi OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI;
7) Penyusunan inventaris dan guide arsip statis sesuai ketentuan yang berlaku; dan
8) Pemenuhan jumlah arsiparis sesuai analisis kebutuhan arsiparis di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI, dan sertifikasi seluruh arsiparis

d. Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

Untuk peningkatan Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat DKI Jakarta merupakan salah satu data dan informasi yang menggambarkan kondisi kegemaran membaca dan perilaku informasi masyarakat DKI Jakarta, maka direkomendasikan :

1) Pengembangan Layanan Berbasis Lokasi dan Format Digital

Hasil pengukuran kajian TGM selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta cenderung lebih memilih rumah sebagai tempat utama dan waktu yang sering digunakan untuk membaca. Berdasarkan temuan ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) DKI Jakarta memiliki peluang untuk mengembangkan layanan perpustakaan yang lebih menyesuaikan diri dengan preferensi masyarakatnya. Salah satu inisiatif yang bisa diambil adalah menyediakan Layanan Pojok Baca/Internet di pemukiman, yang memudahkan akses ke koleksi bahan bacaan langsung di lingkungan tempat tinggal masyarakat. Selain itu, pertimbangkan kolaborasi dengan pengelola ruang publik seperti taman kota, stasiun, dan halte untuk menyediakan Pojok Literasi Digital yang terintegrasi dengan akses internet gratis dan bahan bacaan digital. Gunakan teknologi geotagging untuk memberikan rekomendasi lokasi perpustakaan terdekat atau akses bahan bacaan digital sesuai lokasi pengguna.

Untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan masyarakat Jakarta, Dispusip DKI Jakarta perlu mempertimbangkan beberapa aspek penting. Pertama adalah format bahan bacaan. Dengan meningkatnya penggunaan perangkat digital, ada kebutuhan untuk menyediakan lebih banyak bahan bacaan dalam format digital yang mudah diakses melalui perangkat seperti smartphone dan tablet. Kedua, tema bacaan juga penting. Hasil kajian menunjukkan ketertarikan yang tinggi pada topik kesenian, hiburan, olahraga, dan sastra. Oleh karena itu, koleksi perpustakaan harus mencerminkan minat ini dengan menyediakan beragam bahan bacaan yang relevan dalam kategori-kategori tersebut. Ketiga, pengembangan dan penyediaan aplikasi baca yang ramah pengguna akan sangat membantu. Aplikasi ini harus dirancang dengan antarmuka yang

intuitif dan menyediakan fitur-fitur yang mempermudah pencarian, akses, dan bacaan digital secara nyaman. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, Dispusip DKI Jakarta dapat mengoptimalkan layanannya untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi masyarakat, sekaligus meningkatkan minat baca dan pengetahuan di kalangan warga Jakarta.

2) Optimalisasi Media Sosial sebagai Kanal Literasi

Mengingat tingginya preferensi masyarakat DKI Jakarta dalam menggunakan media sosial sebagai sumber utama informasi mereka, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) DKI Jakarta perlu mengadaptasi dan memperluas konten informasi yang dapat diakses melalui platform ini. Hal ini bisa dilakukan dengan mengembangkan berbagai jenis konten yang menarik dan interaktif, yang dapat meningkatkan keterlibatan pengguna dan menyebarkan informasi secara efektif. Dispusip DKI Jakarta dapat menambahkan program Literacy Influencer dengan melibatkan tokoh lokal, selebriti, atau figur inspiratif yang mempromosikan pentingnya membaca dan memanfaatkan layanan perpustakaan. Selain itu, Dispusip juga dapat memperluas fitur resensi buku dengan konten video singkat (reels) yang mudah dikonsumsi oleh generasi muda. Program lain adalah mengembangkan Podcast Literasi, program podcast yang membahas buku, literasi digital, atau diskusi dengan penulis untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan

1. Literasi dan Arsip sebagai Pilar Peradaban Kota

   Perpustakaan dan kearsipan memegang peran krusial dalam membangun kapasitas intelektual warga dan ketahanan memori kolektif daerah. Di tengah derasnya arus informasi, hoaks, dan polarisasi opini, literasi bukan sekadar kemampuan membaca, tetapi menjadi pertahanan pertama dalam menjaga kejernihan berpikir warga kota.

Demikian pula, arsip tidak lagi dapat dilihat semata-mata sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai warisan dokumenter yang menopang akuntabilitas pemerintahan dan kesinambungan sejarah Jakarta.

Pada dasarnya, peradaban sebuah kota tidak diukur dari seberapa tinggi gedungnya atau seberapa cepat laju ekonominya, tetapi dari sejauh mana kota itu mampu menjaga, mengelola, dan mentransformasikan pengetahuan yang dimilikinya. Literasi dan arsip adalah dua elemen utama dalam infrastruktur pengetahuan tersebut. Di tengah dunia yang penuh distraksi digital dan serbuan informasi instan, kota-kota besar memerlukan sistem literasi yang kuat untuk menjaga kualitas berpikir publik. Literasi mendorong warga untuk berpikir kritis, memilah informasi, membangun argumentasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan kota secara aktif.

Sementara itu, arsip sebagai perekam sejarah dan peristiwa masa lalu menjadi kunci penting dalam menjaga kontinuitas dan akuntabilitas pemerintahan. Kota yang tidak memiliki sistem kearsipan yang kuat akan mudah kehilangan arah, gagal belajar dari kesalahan, dan cenderung mengulang kegagalan yang sama. Di sinilah literasi dan arsip bertemu sebagai dua wajah dari satu komitmen: membangun kota yang sadar sejarah dan berorientasi masa depan.

Jakarta sebagai kota megapolitan yang terus berubah secara cepat membutuhkan strategi pengelolaan literasi dan arsip yang jauh lebih adaptif dan transformatif. Literasi tidak boleh hanya didefinisikan sebagai kemampuan membaca dan menulis secara fungsional. Di era informasi ini, literasi mencakup kemampuan berpikir kritis, literasi digital, literasi media, hingga literasi data. Perpustakaan sebagai pusat literasi harus mampu menyediakan ruang untuk semua itu. Perpustakaan bukan lagi tempat sunyi untuk membaca buku, tetapi menjadi ruang interaktif yang mendukung pembelajaran seumur hidup (lifelong learning), kreativitas, dan keterhubungan sosial.

Peran perpustakaan dalam pembangunan kota modern sangat luas. Perpustakaan dapat berfungsi sebagai pusat komunitas, tempat bertemunya warga dari berbagai latar belakang untuk berdiskusi, belajar, dan berkarya. Dalam konteks Jakarta, perpustakaan juga bisa menjadi tempat belajar bersama bagi kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, anak-anak jalanan, atau komunitas marjinal lainnya. Di sinilah pentingnya pendekatan inklusif. Layanan perpustakaan harus berbasis kebutuhan pengguna, menjangkau mereka yang selama ini tidak didampingi oleh sistem pendidikan formal. Dalam hal ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta harus memainkan peran ganda. Pertama, sebagai penyedia infrastruktur dan layanan literasi. Kedua, sebagai agen perubahan sosial. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah, masyarakat sipil, komunitas literasi, hingga sektor swasta. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan ekosistem literasi yang hidup dan relevan dengan dinamika warga Jakarta.

Di sisi lain, kearsipan juga menghadapi tantangan besar. Banyak orang masih memandang arsip sebagai tumpukan dokumen yang hanya penting bagi birokrasi. Padahal, dalam konteks kota modern, arsip memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Arsip merupakan sumber data, bukti hukum, bahan kajian akademik, hingga fondasi bagi kebijakan publik yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Tanpa arsip yang baik, sejarah kota akan kabur, tata kelola akan rapuh, dan masyarakat akan kehilangan jejaknya.

Perlu digaris bawahi bahwa arsip bukan hanya tanggung jawab lembaga pemerintah. Arsip juga dapat tumbuh dari komunitas, keluarga, bahkan individu. Dalam masyarakat digital, di mana setiap orang bisa menjadi produsen informasi, arsip warga menjadi bagian penting dari memori kolektif kota. Oleh karena itu, strategi pengelolaan arsip ke depan harus mencakup edukasi publik tentang pentingnya arsip dan pelibatan warga dalam proses digitalisasi serta kurasi arsip.

Kota Jakarta juga memiliki kekayaan arsip sejarah yang luar biasa, dari masa kolonial, kemerdekaan, hingga era reformasi. Arsip-arsip ini tidak hanya penting untuk akademisi, tetapi juga dapat menjadi bahan edukasi warga, sumber inspirasi seni dan budaya, serta alat diplomasi budaya ke dunia internasional. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki mandat untuk melestarikan, membuka akses, dan mendayagunakan arsip-arsip ini untuk kepentingan publik.

Penting juga untuk mencatat bahwa literasi dan arsip harus bergerak dalam irama digitalisasi. Literasi digital dan arsip digital harus menjadi prioritas. Jakarta tidak akan mampu menjadi kota global jika tidak memiliki infrastruktur digital literasi dan kearsipan yang solid. Transformasi digital memungkinkan keterjangkauan yang lebih luas, efisiensi layanan, serta pelibatan publik yang lebih besar. Namun, ini juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, investasi teknologi, serta kebijakan perlindungan data yang kuat.

Program-program strategis seperti Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dan implementasi sistem kearsipan digital aplikasi umum kearsipan harus dilihat sebagai bagian dari upaya besar membangun kota yang berpengetahuan. Literasi dan arsip bukan lagi urusan sektor tertentu, melainkan urusan semua pihak. Pemerintah kota harus menjadikan keduanya sebagai komponen penting dalam perencanaan pembangunan kota, sama pentingnya dengan transportasi, pendidikan, atau kesehatan.

Di tengah tekanan urbanisasi, perubahan iklim, dan ketidakpastian global, Jakarta memerlukan narasi kolektif baru yang membangun harapan, solidaritas, dan ketahanan sosial. Literasi dan arsip dapat menjadi fondasi narasi tersebut. Kota yang melek literasi dan sadar arsip adalah kota yang tidak mudah diseret oleh kebisingan media, tidak cepat lupa akan sejarahnya, dan tidak mudah terpecah oleh perbedaan.

Dalam konteks itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan perlu menetapkan visi besar: menjadikan literasi sebagai budaya kota dan arsip sebagai memori kolektif yang hidup. Ini adalah tugas berat, tetapi

bukan tidak mungkin. Dengan strategi yang tepat, dukungan politik yang kuat, dan keterlibatan masyarakat yang luas, Jakarta bisa menjadi contoh kota yang membangun peradabannya dari kekuatan pengetahuan.

Literasi dan arsip bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi panggilan kolektif kita sebagai warga kota. Inilah saatnya menjadikan perpustakaan dan kearsipan sebagai ruang strategis untuk membentuk generasi kritis, komunitas yang terhubung, dan kota yang berkarakter. Karena pada dasarnya, kota yang unggul bukan hanya yang megah secara fisik, tapi yang cerdas secara intelektual dan kuat dalam ingatan sosialnya.

2. Ketertinggalan Digital dan Ketimpangan Akses

   Meskipun Jakarta dikenal sebagai kota dengan infrastruktur digital yang relatif maju, ketimpangan akses informasi masih terjadi secara nyata, terutama pada kelompok masyarakat yang rentan: warga berpenghasilan rendah, lansia, penyandang disabilitas, dan komunitas marjinal di wilayah padat atau pinggiran. Di balik kemajuan teknologi yang ditunjukkan oleh hadirnya Wifi publik, sistem layanan digital, hingga aplikasi layanan warga, masih ada ribuan rumah tangga yang belum memiliki perangkat memadai, koneksi internet yang stabil, atau bahkan literasi digital dasar.

   Literasi digital yang rendah menjadi penghalang utama dalam mengakses berbagai peluang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Dalam konteks Jakarta yang semakin terdigitalisasi, warga yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi digital akan tertinggal dalam banyak aspek kehidupan: dari mengakses pekerjaan formal, mengikuti pembelajaran daring, hingga sekadar memahami informasi layanan kesehatan atau bantuan sosial. Ketimpangan ini menciptakan bentuk baru dari eksklusi sosial, yakni eksklusi digital.

   Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki mandat strategis untuk menjembatani kesenjangan ini. Sebagai institusi publik yang memiliki akar kuat dalam penyebaran informasi dan pendidikan nonformal, dinas

ini dapat memainkan peran penting dalam membangun jembatan digital untuk masyarakat. Namun, menjawab tantangan ini tidak bisa lagi dengan pendekatan konvensional. Model layanan berbasis gedung fisik, jam operasional terbatas, dan orientasi pada pengunjung aktif tidak akan mampu menjangkau kelompok-kelompok yang paling membutuhkan layanan literasi digital dan informasi publik.

Dibutuhkan lompatan paradigma. Perpustakaan dan arsip tidak bisa hanya menunggu dikunjungi. Mereka harus aktif "menjemput bola", keluar dari ruang institusional menuju ruang komunitas, dan hadir di kanal-kanal digital tempat warga sehari-hari berinteraksi. Dalam hal ini, penggunaan teknologi, terutama Kecerdasan Buatan, menjadi sangat relevan.

Kecerdasan Buatan dapat berperan sebagai alat untuk mendemokratisasi informasi. Dengan kemampuan menganalisis data pengguna, Kecerdasan Buatan dapat membantu personalisasi layanan perpustakaan digital, memberikan rekomendasi yang relevan sesuai kebutuhan literasi setiap pengguna. Kecerdasan Buatan juga dapat digunakan untuk membangun sistem pembelajaran mandiri (*self-paced learning*), membantu penyandang disabilitas mengakses koleksi perpustakaan melalui konversi teks-ke-suara, dan menciptakan *chatbot* cerdas yang mampu memberikan informasi layanan publik kepada warga dengan berbagai latar belakang literasi.

Namun untuk menghadirkan Kecerdasan Buatan ke dalam ekosistem layanan publik, termasuk perpustakaan dan kearsipan, diperlukan pondasi digital yang inklusif. Ini berarti membangun konektivitas internet di seluruh wilayah, memastikan ketersediaan perangkat, mengembangkan kurikulum literasi digital yang kontekstual, serta melatih SDM perpustakaan dan arsip untuk memahami dan memanfaatkan teknologi baru secara efektif.

Ketimpangan digital di Jakarta juga memiliki dimensi spasial. Kawasan-kawasan pusat bisnis dan administratif umumnya memiliki infrastruktur digital yang baik, tetapi wilayah pinggiran atau padat penduduk sering

kali tertinggal. Inilah mengapa pendekatan teritorial harus diterapkan dalam perencanaan program literasi digital. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat bermitra dengan kelurahan, RPTRA, dan komunitas lokal untuk membuka pusat-pusat literasi digital berbasis masyarakat.

Selain dimensi geografis, ada juga dimensi demografis. Kelompok lansia, misalnya, memiliki kebutuhan literasi digital yang berbeda dengan anak muda. Begitu pula penyandang disabilitas memerlukan pendekatan aksesibilitas yang lebih sensitif. Oleh karena itu, desain layanan harus bersifat universal dan adaptif, berbasis prinsip inklusi: tidak satu solusi untuk semua, tetapi satu ekosistem yang bisa menyesuaikan diri dengan berbagai kebutuhan.

Ketimpangan digital juga berdampak pada pengelolaan arsip. Banyak dokumen dan informasi penting yang belum terdigitalisasi, terutama pada level komunitas dan institusi kecil. Tanpa intervensi yang tepat, arsip-arsip ini berisiko hilang, rusak, atau tidak dapat diakses publik. Digitalisasi arsip harus dipandang sebagai hak warga untuk mengakses informasi sejarah dan kebijakan. Proyek-proyek digitalisasi arsip sejarah Jakarta harus diperluas tidak hanya untuk koleksi institusional, tetapi juga untuk dokumentasi warga dan komunitas.

Kehadiran teknologi Kecerdasan Buatan dalam proses digitalisasi arsip dapat mempercepat dan meningkatkan kualitas pekerjaan. Misalnya, Kecerdasan Buatan dapat digunakan untuk pengenalan karakter optik (OCR) dari dokumen tua, klasifikasi otomatis, hingga ekstraksi metadata. Teknologi ini dapat membantu percepatan ketersediaan arsip digital yang bisa diakses publik secara daring, memperluas akses dan partisipasi warga terhadap sejarah kotanya sendiri.

Namun, semua inisiatif ini hanya akan berhasil jika terdapat kesadaran politik dan alokasi sumber daya yang memadai. Literasi dan kearsipan sering kali dianggap bukan prioritas, sehingga dukungan anggaran dan kelembagaan minim. Ini adalah tantangan yang harus diubah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menyadari bahwa literasi digital

dan pengelolaan arsip digital adalah pondasi dari pemerintahan yang modern, partisipatif, dan akuntabel.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki peluang untuk menjadi penggerak utama dalam agenda kesetaraan digital ini. Dengan mengembangkan platform layanan digital yang inklusif, memperluas jangkauan layanan ke komunitas-komunitas rentan, dan mengintegrasikan teknologi Kecerdasan Buatan ke dalam sistem kerjanya, dinas ini dapat menjembatani kesenjangan digital yang ada. Namun, kuncinya adalah kolaborasi. Tidak mungkin dinas bekerja sendiri. Harus ada sinergi dengan dinas lain, penyedia teknologi, akademisi, dan komunitas sipil.

Ketertinggalan digital tidak bisa ditangani dengan solusi jangka pendek. Ini memerlukan *roadmap* jangka panjang yang menyasar pembangunan ekosistem: dari infrastruktur, SDM, regulasi, hingga budaya digital warga. Jakarta bisa menjadi pelopor kota inklusif secara digital jika berani mengambil langkah-langkah strategis sejak sekarang.

Kesimpulannya, ketimpangan akses informasi dan literasi digital adalah tantangan serius bagi masa depan Jakarta. Namun, ini juga peluang besar. Dengan visi yang tepat, inovasi teknologi, dan komitmen inklusi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat menjadi agen perubahan yang memastikan bahwa setiap warga Jakarta (tanpa terkecuali) memiliki akses yang adil terhadap informasi, pengetahuan, dan memori kolektif kota.

3. Kecerdasan Buatan: Mengapa Perlu di Perpustakaan dan Kearsipan?

   Kecerdasan Buatan telah berkembang pesat dan menjadi elemen kunci dalam transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, keuangan, pendidikan, hingga pemerintahan. Dalam konteks perpustakaan dan kearsipan, Kecerdasan Buatan mampu menjadi katalis untuk efisiensi, akurasi, dan personalisasi layanan secara drastis. Bukan hanya alat bantu teknis, Kecerdasan Buatan adalah representasi dari tahap lanjut evolusi kelembagaan: dari lembaga yang mengandalkan tenaga manusia dan mekanisme manual, menjadi

institusi yang digerakkan oleh data, analitik prediktif, dan sistem cerdas yang terus belajar.

Implementasi Kecerdasan Buatan di bidang ini bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan strategis. Kota global seperti Jakarta tidak cukup hanya membangun gedung canggih atau jaringan internet cepat. Jakarta butuh sistem institusional yang cerdas, yang mampu menyerap informasi dari berbagai sumber, menganalisis kebutuhan publik secara *real-time*, dan memberi solusi yang tepat guna dalam hitungan detik. Di sinilah konsep "infrastruktur kecerdasan institusi" menjadi krusial, dan Kecerdasan Buatan adalah pondasinya.

Dalam sistem perpustakaan, Kecerdasan Buatan dapat digunakan untuk banyak fungsi. Mulai dari pemrosesan katalog otomatis, sistem rekomendasi buku berbasis preferensi pengguna, pengenalan suara untuk interaksi dengan pengguna tunanetra, hingga *chatbot* cerdas yang menjawab pertanyaan pengunjung perpustakaan tanpa harus menunggu layanan manual. Ini semua memungkinkan perpustakaan menjadi lebih responsif, lebih inklusif, dan lebih hemat sumber daya.

Sebagai contoh, sistem rekomendasi berbasis Kecerdasan Buatan mirip dengan yang digunakan dalam platform *e-commerce* atau *streaming* dapat diadopsi perpustakaan digital Jakarta. Sistem ini dapat menyarankan buku atau referensi berdasarkan riwayat pencarian atau minat pengguna, membantu mereka menemukan bacaan yang relevan tanpa perlu mencarinya secara manual. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengguna, tetapi juga memperpanjang waktu keterlibatan mereka dengan layanan digital perpustakaan.

Dalam konteks kearsipan, Kecerdasan Buatan dapat mengubah secara radikal bagaimana dokumen dikelola. Dengan teknologi *Optical Character Recognition* (OCR) yang ditingkatkan oleh *machine learning*, dokumen fisik yang terdigitalisasi dapat dibaca dan diklasifikasikan secara otomatis. Tidak hanya itu, Kecerdasan Buatan dapat mendeteksi pola duplikasi dokumen, menganalisis hubungan antar arsip, dan

bahkan mengidentifikasi metadata tersembunyi yang relevan untuk konteks sejarah atau hukum.

Penerapan Kecerdasan Buatan juga mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan sistem yang dapat memantau akses dan perubahan dokumen secara otomatis, risiko penyalahgunaan arsip dapat ditekan. Sistem pengingat otomatis terhadap batas waktu penyimpanan dokumen, serta peringatan terhadap pelanggaran prosedur pengarsipan, dapat dibangun berbasis Kecerdasan Buatan.

Jakarta sebagai kota global harus belajar dari kota-kota besar lain yang telah lebih dulu mengintegrasikan Kecerdasan Buatan ke dalam layanan publik mereka. Kota seperti Helsinki, Singapura, dan Seoul telah memanfaatkan Kecerdasan Buatan untuk mengelola informasi publik, mendeteksi masalah warga secara proaktif, dan mempersonalisasi interaksi antara pemerintah dan warga. Di bidang perpustakaan, Perpustakaan Umum New York (NYPL) telah mengembangkan sistem analitik pengunjung berbasis Kecerdasan Buatan untuk merancang program yang lebih sesuai dengan kebutuhan komunitasnya.

Namun, membangun infrastruktur kecerdasan institusi tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan integrasi antara sistem Kecerdasan Buatan dengan sistem informasi pemerintah daerah (SPBE), pelatihan SDM yang memadai, serta perombakan proses kerja yang selama ini bersifat hierarkis dan manual menjadi proses yang berbasis data dan *agile*. Ini bukan hanya soal membeli teknologi, tapi soal transformasi budaya kerja secara menyeluruh.

Kecerdasan Buatan juga menuntut komitmen terhadap etika dan perlindungan data. Sistem cerdas harus dirancang dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan nondiskriminatif. Data pengguna, baik itu pengunjung perpustakaan maupun pemohon akses arsip, harus dilindungi dari penyalahgunaan. Oleh karena itu, infrastruktur kecerdasan institusi tidak hanya mencakup sistem Kecerdasan Buatan

itu sendiri, tapi juga kerangka kebijakan yang mengatur penggunaannya secara adil dan aman.

Yang tak kalah penting, Kecerdasan Buatan bisa menjadi alat pemberdayaan warga jika diorientasikan secara inklusif. Misalnya, Kecerdasan Buatan dapat digunakan untuk mengidentifikasi wilayah dengan tingkat literasi rendah, dan secara otomatis merancang kampanye literasi yang tepat sasaran. Atau sistem Kecerdasan Buatan yang digunakan untuk mengenali topik-topik arsip yang sering diakses, sehingga pemerintah dapat membuat pameran arsip tematik yang lebih sesuai dengan minat warga.

Inisiatif ini tidak bisa ditunda. Jika Jakarta ingin mempertahankan daya saing globalnya, maka digitalisasi bukan lagi sekadar program tambahan, tetapi harus menjadi sistem kerja utama. Dan digitalisasi tanpa kecerdasan buatan adalah seperti tubuh tanpa otak: bergerak, tapi tidak berpikir. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor dalam membangun kecerdasan institusi ini, karena ia berada di simpul dua dunia penting: informasi dan dokumentasi.

Ke depan, perpustakaan dan kearsipan harus dirancang sebagai entitas yang bukan hanya adaptif, tapi juga prediktif. Kecerdasan Buatan dapat digunakan untuk meramalkan tren bacaan, kebutuhan literasi, hingga potensi kehilangan arsip penting. Dengan kemampuan ini, dinas bisa menyusun program preventif, bukan hanya reaktif.

Kesimpulannya, Kecerdasan Buatan bukan hanya alat bantu. Ia adalah tulang punggung dari institusi publik yang modern, efisien, dan berpihak pada warga. Infrastruktur kecerdasan institusi yang dibangun di atas teknologi Kecerdasan Buatan akan menjadikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai pionir reformasi digital di Jakarta—lembaga yang tidak hanya mengurus masa lalu dan masa kini, tetapi juga siap menyusun strategi untuk masa depan.

2.2. Permasalahan dan Isu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Di DKI Jakarta, sebagai ibu kota negara dengan jumlah penduduk lebih dari 11 juta jiwa, tantangan dalam dua sektor ini sangat kompleks. Di satu sisi, Jakarta mencatat indeks literasi yang tinggi dan telah mengadopsi sejumlah kebijakan transformasi digital. Namun di sisi lain, masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat optimalisasi layanan perpustakaan dan sistem kearsipan yang efektif.

Permasalahan ini mencakup rendahnya tingkat kunjungan ke perpustakaan, menurunnya jumlah koleksi, ketimpangan distribusi buku, minimnya SDM pustakawan dan arsiparis profesional, hingga belum meratanya transformasi digital dalam pengelolaan arsip di lingkungan perangkat daerah. Data terbaru menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara capaian indikator makro dan implementasi nyata di lapangan.

1. Rendahnya Tingkat Kunjungan Perpustakaan

   Meskipun Indeks Budaya Literasi Jakarta tergolong tinggi, tingkat kunjungan ke perpustakaan belum mencerminkan potensi tersebut. Data tahun 2024 mencatat sekitar 1.498.400 pengunjung perpustakaan di DKI Jakarta sepanjang tahun. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk DKI yang melebihi 11 juta jiwa, maka tingkat pemanfaatannya masih sangat terbatas.

   Salah satu indikator krusial dalam pengukuran budaya literasi adalah tingkat kunjungan ke perpustakaan umum dan taman bacaan. Sayangnya, statistik menunjukkan bahwa tingkat kunjungan masih rendah secara signifikan.

   Pada tahun 2025, rata-rata pengunjung harian tercatat sekitar 1.289 orang pada hari kerja, dan naik menjadi ±3.000 orang saat akhir pekan di Perpustakaan Jakarta. Lonjakan ini menunjukkan adanya ketergantungan pada waktu kunjungan yang fleksibel. Bahkan, setelah

jam operasional diperpanjang, terjadi kenaikan 53% dari rata-rata 1.900 pengunjung menjadi lebih dari 3.000 per hari. Ini membuktikan bahwa akses waktu menjadi hambatan signifikan sebelumnya.

Fakta ini menyoroti adanya kesenjangan antara indikator makro dan perilaku aktual masyarakat. Dengan kata lain, pencapaian angka-angka literasi tidak secara langsung mencerminkan praktik literasi yang nyata. Banyak warga belum menjadikan perpustakaan sebagai bagian dari gaya hidup belajar dan mencari informasi.

Kepulauan Seribu menjadi contoh nyata dari wilayah dengan tingkat pemanfaatan fasilitas perpustakaan paling rendah. Faktor geografis dan aksesibilitas menjadi penyebab utama. Transportasi yang terbatas, infrastruktur yang belum memadai, serta kurangnya promosi literasi di wilayah ini membuat perpustakaan tidak menjadi pilihan utama warga untuk memperoleh informasi atau hiburan berbasis bacaan.

Namun, jika dibandingkan dengan angka periode 2020–2022 yang mencatat 15,2 juta pengunjung, maka terlihat bahwa masih ada potensi besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama melalui optimalisasi jam layanan, kenyamanan fasilitas, dan aktivasi komunitas literasi lokal.

2. Ketercukupan dan Distribusi Koleksi yang Tidak Merata

   Permasalahan kedua yang krusial adalah rasio koleksi bacaan yang masih jauh dari standar ideal. Menurut standar IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), rasio ideal adalah 2 koleksi per penduduk. Namun, di Jakarta, rasio aktual hanya sekitar 0,06, jauh di bawah standar minimum.

   Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perpustakaan, jumlah dan variasi koleksi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Terlebih lagi, distribusi koleksi tidak merata, terutama antara pusat kota dan daerah pinggiran atau kepulauan.

   Sebagai ilustrasi, Perpustakaan HB Jassin sebagai salah satu layanan utama mencatat 141.896 judul dan 583.315 eksemplar. Namun, kesenjangan antara layanan pusat dengan perpustakaan cabang dan

komunitas sangat besar. Koleksi di tingkat kecamatan/kelurahan sering kali minim dan tidak relevan dengan kebutuhan lokal.

Selain itu, dataset BPS dan Dispusip belum menguraikan detail distribusi koleksi secara spasial, menjadikan perencanaan intervensi berbasis data menjadi sulit dilakukan.

Lebih buruk lagi, koleksi yang tersedia belum disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi lokal. Misalnya, perpustakaan di daerah maritim tidak menyediakan cukup bahan bacaan yang relevan dengan budaya dan pekerjaan nelayan, atau kurang menyediakan koleksi anak-anak di wilayah dengan populasi usia dini yang tinggi.

Sementara itu, pergeseran preferensi masyarakat ke bacaan digital juga menjadi tantangan. Saat masyarakat lebih banyak mengakses informasi melalui ponsel dan internet, upaya preservasi dan digitalisasi koleksi fisik masih terbatas. Kurangnya investasi dalam digital library, keterbatasan infrastruktur TI, dan rendahnya literasi digital turut memperparah masalah ini.

3. Kualitas dan Kompetensi SDM Perpustakaan yang Belum Ideal

   Masalah berikutnya terletak pada sumber daya manusia. Jumlah pustakawan profesional sangat tidak mencukupi, dan rasio tenaga perpustakaan terhadap jumlah penduduk masih rendah. Ini berdampak langsung pada kualitas layanan, inovasi program literasi, dan kemampuan perpustakaan untuk beradaptasi dengan kebutuhan zaman.

   Standar IFLA merekomendasikan 1 pustakawan profesional per 2.500-3.000 penduduk. Dengan populasi DKI Jakarta melebihi 11 juta jiwa, idealnya dibutuhkan sekitar 3.500-4.500 pustakawan profesional. Kenyataannya, jumlah pustakawan bersertifikasi masih jauh di bawah standar tersebut.

   Lebih dari itu, kompetensi pustakawan masih belum memadai, baik dari sisi sertifikasi formal maupun kemampuan teknis. Banyak pustakawan belum memiliki pelatihan dalam hal teknologi informasi, manajemen koleksi digital, hingga komunikasi publik.

Kondisi ini menyebabkan layanan perpustakaan cenderung statis, tidak menarik, dan kurang menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Perpustakaan tidak lagi sekadar tempat menyimpan buku, tetapi harus menjadi pusat kegiatan komunitas, inovasi, dan pembelajaran sepanjang hayat, sesuatu yang belum sepenuhnya terwujud karena keterbatasan SDM.

Kekurangan kuantitas ini berimbas pada tingginya beban kerja, rendahnya inovasi layanan, dan kurangnya pendampingan terhadap pengguna. Lebih dari itu, kompetensi teknis pustakawan juga belum memadai.

Kompetensi yang Belum Merata:

- Digitalisasi, metadata, preservasi koleksi digital
- Pelayanan inklusif dan fasilitasi pembelajaran sepanjang hayat
- Penguasaan teknologi informasi (AI, big data, MARC/INDOMARC,RDA, OPAC)

Idealnya, hingga 2029:

- 80% pustakawan bersertifikasi professional
- 100% menguasai literasi digital
- 30% memiliki keahlian khusus di bidang riset, data science, atau konten digital.

4. Kepatuhan Pengelolaan Arsip di OPD Rendah

Di sisi kearsipan, tantangan utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan pengelolaan arsip di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Banyak perangkat daerah belum secara konsisten menerapkan sistem pengelolaan arsip yang terintegrasi, padahal hal ini sangat penting untuk akuntabilitas, transparansi, dan pelestarian sejarah administrasi publik. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi umum bidang kearsipan belum diterapkan secara menyeluruh. Beberapa OPD masih mengandalkan sistem manual atau aplikasi masing-masing yang tidak terstandarisasi. Hal ini menyulitkan dalam hal pengawasan, interoperabilitas data, dan penyusutan arsip.

Akibatnya, proses penyusutan arsip yaitu proses pemilahan dan pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna belum berjalan optimal. Penumpukan arsip yang tidak terkelola menjadi beban administratif dan menyulitkan pencarian informasi ketika dibutuhkan. Belum optimalnya pelaksanaan kewajiban penyusutan dan penyerahan arsip oleh perangkat daerah turut menyebabkan jumlah arsip statis yang diserahkan kepada lembaga kearsipan masih relatif sedikit dibandingkan dengan potensi arsip yang seharusnya diserahkan. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya ketersediaan informasi bernilai sejarah serta menghambat upaya penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, penyusunan sarana bantu temu balik arsip statis (seperti indeks dan katalog arsip) juga masih sangat terbatas. Padahal, sarana ini krusial untuk menunjang pelayanan informasi publik dan mendukung transparansi pemerintahan.

5. Transformasi Digital Kearsipan yang Belum Merata

   Indonesia sudah meluncurkan aplikasi Aplikasi Umum Kearsipan sebagai bagian dari program transformasi digital kearsipan nasional. Namun dalam praktiknya, adopsi aplikasi ini belum merata di seluruh OPD. Banyak yang belum mengintegrasikan sistem internalnya dengan Aplikasi Umum Kearsipan atau belum siap secara infrastruktur dan SDM.

   Kendala terbesar adalah pada interoperabilitas data antar-OPD. Banyak sistem informasi berjalan sendiri-sendiri (silo), sehingga sulit untuk dihubungkan dalam satu ekosistem informasi. Ini menghambat efisiensi layanan dan menyulitkan proses pencarian arsip lintas lembaga.

   Padahal, dalam era digital, kecepatan dan kemudahan akses arsip sangat penting. Keterlambatan dalam transformasi digital ini menghambat modernisasi administrasi publik dan meningkatkan risiko kehilangan informasi penting akibat kelalaian atau kerusakan fisik dokumen.

6. Kapasitas SDM Arsiparis yang Masih Terbatas

   Masalah klasik juga ditemukan pada SDM, khususnya arsiparis. Saat ini, jumlah arsiparis tersertifikasi masih sangat sedikit dibandingkan kebutuhan. Banyak pegawai yang menangani kearsipan tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan formal di bidang ini.

   Lebih jauh, penguasaan teknologi informasi di kalangan arsiparis masih belum merata. Di era digital, kemampuan teknis sangat penting, termasuk dalam hal pengelolaan dokumen elektronik, keamanan siber, metadata, hingga digital preservation.

   Keterbatasan kompetensi ini menyebabkan proses digitalisasi dan modernisasi layanan arsip berjalan lambat. Padahal, kearsipan yang baik adalah fondasi penting bagi good governance, keterbukaan informasi, serta pelestarian sejarah dan identitas lembaga publik.

2.2.2 Isu-isu Strategis

Perumusan isu strategis merupakan tahapan penting dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta 2025–2029. Isu strategis dimaknai sebagai kondisi, tantangan, maupun peluang utama yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Identifikasi isu strategis dilakukan melalui telaah terhadap kebijakan nasional (RPJMN, Renstra Perpustakaan Nasional dan Renstra Arsip Nasional), analisis capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan periode sebelumnya, serta hasil evaluasi kebutuhan masyarakat dan dinamika perkembangan lingkungan strategis, termasuk perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI).

1. **Isu-isu Global**

   Hasil telaah terhadap Isu-Isu Strategis berskala internasional / Global yang erat kaitannya dengan Perpustakaan dan Kearsipan adalah berikut ini :

a. Transformasi Digital dan Otomatisasi:
   - Perpustakaan Digital dan Akses Terbuka:
     Pengembangan perpustakaan digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan menyajikan informasi tanpa hambatan geografis atau waktu.
   - Pemanfaatan Teknologi Baru:
     Adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), machine learning, dan analisis data besar untuk meningkatkan layanan, mengelola koleksi, dan menyediakan pengalaman pengguna yang lebih personal.
   - Keamanan Data dan Privasi:
     Mengatasi tantangan keamanan siber, perlindungan data pribadi pengguna, dan memastikan integritas informasi digital.

b. Peningkatan Akses, Literasi Informasi, dan Keterampilan Digital:
   - Mengatasi Kesenjangan Digital:
     Memastikan semua lapisan masyarakat memiliki akses ke sumber daya informasi digital dan keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkannya.
   - Literasi Informasi dan Keterampilan Kritis:
     Melengkapi pengguna dengan kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif, serta membedakan fakta dari misinformasi.
   - Pendidikan Sepanjang Hayat:
     Peran perpustakaan dalam mendukung pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan keterampilan profesional bagi berbagai kelompok usia dan latar belakang.

c. Pelestarian Memori Kolektif dan Arsip:
   - Pengelolaan Arsip Digital:
     Mengembangkan standar dan solusi untuk pelestarian jangka panjang arsip digital yang semakin berkembang pesat.
   - Pelestarian Budaya dan Warisan:

Memastikan bahwa warisan budaya, sejarah, dan memori kolektif tidak hilang seiring dengan perubahan teknologi dan lingkungan.

- Aksesibilitas dan Penggunaan Arsip:
  Mempermudah akses publik terhadap arsip sebagai sumber otentik untuk penelitian, pendidikan, dan pemahaman sejarah.

d. Transformasi Peran dan Fungsi Lembaga Informasi:
   - Menjadi Pusat Komunitas:
     Mengubah perpustakaan dan arsip dari sekadar gudang informasi menjadi pusat kegiatan komunitas, ruang belajar, dan pusat inkubasi inovasi.
   - Mendukung Pembangunan Berkelanjutan:
     Berkontribusi pada tujuan pembangunan global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui penyediaan data, informasi, dan literasi.
     Penelitian dan Inovasi:
     Menjadi mitra dalam penelitian dan inovasi dengan menyediakan akses ke sumber daya informasi berkualitas dan mendukung kolaborasi ilmiah.

e. Kolaborasi dan Kemitraan Global:
   - Kerja Sama Internasional: Memperkuat kerjasama antar perpustakaan dan lembaga kearsipan di seluruh dunia untuk berbagi praktik terbaik, sumber daya, dan teknologi.
   - Menangani Isu Global: Berkolaborasi untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, pandemi, dan misinformasi yang memerlukan pendekatan lintas negara.
   - Penyelarasan Kebijakan: Mengupayakan harmonisasi kebijakan dan standar internasional di bidang perpustakaan dan kearsipan untuk memudahkan kolaborasi dan pertukaran informas

2. Isu-isu Nasional

RPJMN Tahun 2025–2029 memuat delapan Prioritas Nasional yang merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029. Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional terdiri atas:

a. **Prioritas Nasional 1,** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
b. **Prioritas Nasional 2,** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
c. **Prioritas Nasional 3,** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
d. **Prioritas Nasional 4,** Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
e. **Prioritas Nasional 5**, Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
f. **Prioritas Nasional 6,** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

g. **Prioritas Nasional 7,** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
h. **Prioritas Nasional 8,** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Perpustakaan Nasional dalam RPJMN 2025-2029 mendukung pencapaian tujuan yang terdapat pada Prioritas Nasional ke-4 dan ke-8. Untuk menindaklanjuti amanat tersebut, Perpustakaan Nasional menyusun arah kebijakan dan strategi yang selaras dengan tujuan nasional, serta menetapkan strategi. Terdapat empat arah kebijakan yang dirumuskan dan akan dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional. Dari keempat arah kebijakan tersebut, tiga di antaranya ditetapkan sebagai arah kebijakan utama karena secara langsung mendukung pencapaian target RPJMN 2025-2029, yaitu:

a. Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan;
b. Peningkatan Budaya Baca dan Kecakapan Literasi; dan
c. Pemajuan Naskah Kuno Nusantara.
d. Penguatan kemitraan strategis dan integrasi sistem informasi manajemen Perpusnas

Program yang dilaksanakan antara lain : program Perpustakaan dan Literasi dengan sasaran program, yaitu:

a. Terselenggaranya layanan perpustakaan sesuai dengan standar pelayanan publik melalui pengembangan, pengolahan, pemanfaatan dan pelestarian bahan perpustakaan,
b. Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan sesuai SNP, dan
c. Terselenggaranya layanan perpustakaan sesuai dengan standar pelayanan publik melalui pengembangan, pengolahan, pemanfaatan dan pelestarian naskah kuno Nusantara.

Untuk Arsip Nasional pada Prioritas Nasional Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas di bidang kearsipan adalah PN 8 (delapan) yaitu “Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur”.

Upaya mewujudkan Prioritas Nasional 8 tersebut diintervensi melalui program prioritas (PP) “Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa”, yang diimplementasikan melalui kegiatan prioritas (KP) ”transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan” yang sasarannya adalah ”Terwujudnya kearsipan yang transformatif untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan” dengan 2 (dua) indikator capaian yaitu ”indeks budaya tertib arsip” dan ”indeks memori kolektif bangsa” yang selanjutnya diimplementasi melalui 3 (tiga) proyek prioritas. Isu-isu yang akan dihadapi ANRI dalam meningkatkan penyelenggaraan kearsipan nasional atau diperlukan sebagai mitigasi untuk menyusun strategi agar tidak menjadi halangan dalam kinerja diantaranya:

a. Transformasi ANRI sebagai Sumber Pengetahuan dan Memori Kolektif Bangsa
b. Penguatan Tata Kelola Kearsipan yang Transparan dan Akuntabel
c. Penyelenggaraan kearsipan pada Ibu Kota Nusantara (IKN)
d. Pengokohan ketahanan budaya nasional melalui arsip maritim
e. Peningkatan kolaborasi dan sinkronisasi kebijakan kearsipan baik di dalam dan luar negeri
f. Transformasi Digital dalam Penyelenggaraan Kearsipan Perluasan pelayanan kearsipan pada public
g. Perluasan pelayanan kearsipan pada publik

Arah kebijakan untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Arsip Nasional, sebagai berikut :

d. Sasaran Strategis 1 “Terwujudnya budaya tertib arsip secara nasional (SS1)”

1) Penguatan Tata Kelola Kearsipan Nasional Penguatan Tata Kelola Kearsipan Nasional
2) Percepatan Digitalisasi Arsip

e. Sasaran Strategis 2 “Terwujudnya memori kolektif bangsa Indonesia yang autentik, utuh, dan terpercaya (SS2)”
   1) Peningkatan ketersediaan arsip secara nasional
   2) Peningkatan Pelayanan Kearsipan dan Pemanfaatan Informasi Kearsipan melalui JIKN
f. Sasaran Strategis 3 “Terwujudnya kinerja ANRI yang bersih, akuntabel, dan profesional (SS3)”

3. Isu-isu RPJMD

isu-isu strategis pembangunan Jakarta periode 2025-2029 yang disusun berdasarkan hasil sintesis permasalahan capaian pembangunan periode sebelumnya (2020-2024) dengan penyelarasan isu dan kebijakan skala global, nasional, dan regional. Isu skala global yang diangkat yaitu *triple planetary crisis*, geopolitik dan ekonomi politik internasional, dan evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs); isu skala nasional meliputi kebijakan jangka panjang dan menengah nasional; sedangkan isu skala regional terkait kebijakan perencanaan wilayah aglomerasi, kebijakan tata ruang wilayah, kebijakan jangka panjang daerah, dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD sebagai berikut:

a. Modal Manusia Tinggi dan Masyarakat Madani

   Sumber daya manusia merupakan modal pembangunan utama dalam mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global yang maju dan berdaya saing. Kualitas sumber daya manusia Jakarta yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Modal Manusia (IMM) diharapkan tidak hanya unggul secara nasional, namun juga dapat setara dengan talenta global lainnya
b. Pemerataan dan Kebermanfaatan Hasil Pembangunan

   Ketimpangan pembangunan merupakan salah satu isu kewilayahan Jakarta yang salah satunya tergambar melalui distribusi tingkat

kemiskinan. Penurunan tingkat kemiskinan akan meningkatkan taraf hidup manusia sehingga pada akhirnya akan berdampak pada kemajuan ekonomi dan daya saing kota. Pemerataan pembangunan, khususnya terhadap wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, perlu menjadi perhatian utama. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya pemerataan pembangunan yang efektif dan dikoordinasikan pada tingkat Kota dan Kabupaten Administrasi.

c. Perekonomian Produktif, Kompetitif, dan Atraktif di Pasar Global

   Jakarta yang mengemban peran sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global, dituntut untuk tetap mempertahankan ritme dan produktivitas ekonominya, yang ditunjukkan oleh indikator PDRB Jakarta. Dengan meningkatkan PDRB Jakarta, kualitas hidup masyarakat Jakarta dan pendapatan asli daerah akan meningkat sehingga belanja infrastruktur maupun pendidikan dan kesehatan di Jakarta dapat turut meningkat

d. Pemerintahan Dinamis dengan Performa Layanan Prima

   Kemajuan kota, keseimbangan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat Jakarta tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai regulator dan katalisator unsur-unsur pembangunan kota. Pemerintah Jakarta perlu meninggalkan praktik business as usual dan melakukan terobosan melalui tata kelola profesional serta pemenuhan layanan yang berstandar internasional. Penerapan good governance melalui penyederhanaan birokrasi akan meningkatkan ease of doing business sehingga dapat menarik investasi ke dalam Jakarta yang selanjutnya akan menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan daya saing kota secara keseluruhan.

e. Ekosistem yang Seimbang dan Berketahanan Iklim

   Lingkungan hidup yang menjadi wadah bagi segala aktivitas di Jakarta tengah menghadapi krisis lingkungan yang juga terjadi secara global. Di samping itu, daya dukung dan daya tampung lingkungan Jakarta saat ini telah terlampaui sehingga diperlukan

upaya ekstra untuk mengembalikan fungsi ekologis yang diperlukan masyarakat, yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Peningkatan kualitas lingkungan hidup akan turut meningkatkan taraf hidup masyarakat dan daya saing kota Jakarta. Untuk itu diperlukan keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat dengan keberlanjutan ekosistem dan ketahanan terhadap musibah lingkungan.

f. Infrastruktur Kota yang Layak dan Berkelanjutan

Sebagai fondasi awal dalam mencapai visi jangka panjang Jakarta, perbaikan fundamental perlu dilakukan segera dalam mewujudkan kota layak huni dan berkelanjutan. Analisis isu strategi Jakarta mengidentifikasi beberapa upaya infrastruktur kota yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut, antara lain adalah pemenuhan ketersediaan pelayanan dasar; lingkungan hunian yang kompak dan mandiri; ketersediaan dan keragaman amenitas perkotaan; dan ruang publik yang ramah kelompok rentan. Pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan berkualitas mencakup akses air bersih, sanitasi yang layak, pengolahan sampah, dan permukiman layak huni. Kondisi kesehatan lingkungan diantaranya dapat ditinjau dari aksesibilitas penduduk terhadap air bersih, sanitasi layak, dan limbah padat berupa sampah.

g. Pergerakan Manusia, Barang, dan Informasi yang Optimal

Dalam mencapai cita-cita sebagai Kota Global, diperlukan konektivitas pergerakan manusia, barang, dan informasi yang optimal. Untuk itu diperlukan shifting pola perjalanan penduduk menuju penggunaan transportasi umum massal yang handal dan efektif, yang keberhasilannya ditandai oleh persentase Public Transport Mode Share yang meningkat. Peningkatan tersebut akan berkontribusi dalam penurunan kemacetan dan emisi gas rumah kaca yang selanjutnya dapat meningkatkan keberlanjutan lingkungan hidup. Selain itu peningkatan konektivitas perkotaan

juga tidak terbatas pada pergerakan manusia, namun juga pada aliran informasi dan sistem logistik yang akan turut meningkatkan produktivitas warga serta menarik para pendatang untuk beraktivitas dan berwisata di Jakarta.

Tabel 2. 28 Rumusan Arah Kebijakan Menurut Misi RPJMD Tahun 2025 - 2029

Misi 2025-2029	Isu Strategis 2025-2029	Arah Kebijakan	Integrasi ke Tujuan
Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera	Modal manusia tinggi dan masyarakat madani	Layanan pendidikan dasar dan menengah, Layanan Kesehatan primer, Pemenuhan gizi	Menjadi rekomendasi prioritas kebijakan di TUJUAN 1
Mewujudkan Pusat Ekonomi Inovatif dengan Pembangunan dan Akses Sumber Daya yang Merata	Pemerataan dan Kebermanfaatan Hasil Pembangunan Perekonomian Produktif, Kompetitif, dan Atraktif di Pasar Global	Sistem perlindungan sosial tepat sasaran, Pengentasan kemiskinan berbasis wilayah, Inklusivitas ekonomi,Kemudahan investasi dan membuka usaha, Tenaga kerja berdaya saing	Menjadi rekomendasi prioritas kebijakan di TUJUAN 2.1 DAN 2.2
Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal	Pemerintahan Dinamis dengan Performa Layanan Prima	Pemanfaatan teknologi untuk layanan publik dan manajemen kota	Menjadi rekomendasi prioritas kebijakan di TUJUAN 3
Mewujudkan Ruang Kota Layak Huni, Berketahanan, dan Berkelanjutan	Infrastruktur Kota yang Layak dan Berkelanjutan Ekosistem yang Seimbang dan Berketahanan	Infrastruktur dasar, Hunian terjangkau, Perbaikan kualitas air dan udara, Ruang terbuka hijau, Ketahanan terhadap bencana	Menjadi rekomendasi prioritas kebijakan di TUJUAN 4.1 DAN 4.2
Mewujudkan Konektivitas dan Sinergi Kegiatan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Pergerakan Manusia, Barang, dan Informasi yang Optimal	Kemudahan mobilitas, Koneksi internet yang cepat, *Branding* kota	Menjadi rekomendasi prioritas kebijakan di TUJUAN 5

Sumber : RPJMD 2025-2029

4. Isu-isu Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rumusan isu strategis ini menjadi dasar bagi penentuan arah kebijakan, strategi, dan program yang akan dijalankan selama periode perencanaan, sehingga seluruh intervensi pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan dapat lebih fokus, terukur, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2025–2029 maupun agenda pembangunan nasional. Berikut beberapa isu strategis dalam konteks Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

a. Penguatan Budaya Literasi dan Kegemaran Membaca

Meskipun nilai Indeks Budaya Literasi di Provinsi DKI Jakarta relatif tinggi dan melampaui target nasional, tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum dan taman bacaan masyarakat masih rendah. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara capaian indikator makro dengan realitas perilaku literasi warga. Kesenjangan juga terlihat antar wilayah, dimana wilayah Kepulauan Seribu menunjukkan angka terendah dalam pemanfaatan layanan perpustakaan. Isu strategis yang muncul adalah bagaimana Perpustakaan dan Kearsipan dapat memperluas jangkauan layanan literasi, mengintegrasikan literasi digital, serta menjangkau kelompok masyarakat rentan melalui pendekatan inklusif.

b. Pemerataan Akses dan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan

Rasio ketercukupan koleksi di Jakarta masih jauh dari standar IFLA (2:1), sementara kondisi aktual menunjukkan rasio hanya sekitar 0,06. Meskipun pengadaan koleksi telah dilakukan secara konsisten bahkan melampaui target tahunan, distribusi koleksi belum merata dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, terjadi pergeseran preferensi masyarakat terhadap bacaan digital, sementara upaya preservasi koleksi fisik masih menghadapi keterbatasan. Isu strategis yang muncul adalah bagaimana memastikan ketersediaan koleksi yang

memadai, relevan, dan terdistribusi secara merata di seluruh wilayah Jakarta, baik dalam format fisik maupun digital.

c. Kualitas dan Kompetensi SDM Perpustakaan dan Kearsipan

Jumlah pustakawan dan arsiparis di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan masih terbatas, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi. Rasio tenaga perpustakaan terhadap jumlah penduduk masih sangat rendah, sementara jumlah tenaga yang bersertifikasi belum memadai untuk memenuhi standar layanan. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan inovasi dalam pengembangan layanan serta lambatnya penerapan teknologi informasi. Isu strategis yang muncul adalah peningkatan kapasitas, sertifikasi, serta penguasaan teknologi informasi bagi pustakawan dan arsiparis agar mampu mendukung transformasi kelembagaan.

d. Kepatuhan Pengelolaan Arsip di Lingkungan OPD

Hasil pengawasan kearsipan DKI Jakarta oleh ANRI menunjukkan capaian yang sangat baik dengan kategori AA (Sangat Memuaskan). Namun demikian, masih terdapat perangkat daerah yang belum optimal dalam melakukan pemindahan arsip inaktif, penyusunan daftar arsip, serta integrasi penuh dengan sistem aplikasi umum kearsipan. Tingkat kesadaran pimpinan OPD dan pencipta arsip terkait pentingnya kepatuhan kearsipan masih beragam. Isu strategis yang perlu ditangani adalah penguatan budaya tertib arsip, peningkatan kepatuhan regulasi, serta percepatan integrasi sistem kearsipan di seluruh OPD.

e. Transformasi Digital Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah membangun infrastruktur digital seperti data center dan aplikasi Jaklitera, namun pemanfaatan arsip digital serta keterhubungan dengan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) masih terbatas. Meskipun kesiapan teknologi sudah cukup berkembang, integrasi antar-OPD belum sepenuhnya berjalan optimal. Selain itu, keterbatasan kapasitas SDM teknologi informasi juga menjadi kendala dalam

mengakselerasi transformasi digital. Isu strategis yang muncul adalah memperkuat ekosistem digital yang terintegrasi, meningkatkan literasi digital internal, serta memastikan pemanfaatan teknologi dapat mendukung layanan perpustakaan dan kearsipan secara inklusif dan berkelanjutan.

f. Pelestarian Memori Kolektif Daerah dan Naskah Kuno

   Target pelestarian naskah kuno telah tercapai sesuai rencana, namun upaya pelestarian berkelanjutan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan tenaga konservator dan minimnya alokasi anggaran. Jakarta memiliki potensi besar sebagai pusat memori kolektif bangsa dengan kekayaan arsip kolonial, sejarah kota, dan budaya Betawi. Potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, maupun diplomasi budaya. Isu strategis yang muncul adalah penguatan program pelestarian, digitalisasi, serta pemanfaatan arsip dan naskah kuno sebagai sumber pengetahuan publik dan identitas daerah.

g. Keselarasan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

   Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui penyediaan akses pembelajaran sepanjang hayat, serta SDG 16 (Kelembagaan yang Tangguh, Transparan, dan Akuntabel) melalui pengelolaan arsip yang baik. Tantangan yang muncul adalah bagaimana literasi dan kearsipan daerah dapat memberikan dampak nyata terhadap pencapaian SDGs, khususnya terkait pendidikan inklusif, pelestarian budaya, serta tata kelola pemerintahan yang transparan. Isu strategis yang perlu diperkuat adalah integrasi program literasi dan kearsipan dengan agenda pembangunan berkelanjutan sehingga keberadaannya memberikan kontribusi signifikan baik di tingkat daerah maupun nasional.

h. Perkembangan dan Penerapan kecerdasan buatan sebagai Motor Transformasi

Perkembangan teknologi digital, khususnya kecerdasan buatan, telah menjadi faktor kunci dalam membentuk wajah pelayanan publik modern. Bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, kecerdasan buatan tidak sekadar berfungsi sebagai alat bantu teknis, melainkan menjadi motor utama dalam transformasi kelembagaan menuju layanan yang inklusif, efisien, dan berdaya saing global.

Dalam konteks inklusivitas, kecerdasan buatan membuka peluang untuk menghadirkan layanan yang lebih personal, adaptif, dan ramah bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat di wilayah dengan akses terbatas. Teknologi rekomendasi bacaan, chatbot layanan publik, hingga pustaka keliling berbasis analitik dapat memastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses informasi dan pengetahuan.

Dari sisi tata kelola, kecerdasan buatan mampu mendorong efisiensi operasional dengan otomatisasi proses seperti katalogisasi koleksi, klasifikasi arsip, hingga penyusunan laporan kinerja. Sistem analitik berbasis kecerdasan buatan juga memungkinkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk melakukan perencanaan kebutuhan anggaran dan sumber daya manusia secara lebih akurat dan prediktif, sehingga mendukung prinsip pemerintahan berbasis data dan evidence-based policy.

Sementara itu, dalam aspek daya saing, penerapan kecerdasan buatan menjadikan layanan literasi dan kearsipan Jakarta setara dengan standar internasional. Pustakawan virtual yang tersedia 24/7, pameran arsip interaktif, serta sistem pembelajaran digital berbasis kecerdasan buatan merupakan bentuk inovasi yang dapat meningkatkan reputasi Jakarta sebagai kota global dengan ekosistem pengetahuan yang maju.

Dengan demikian, penerapan kecerdasan buatan dalam renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025–2029 bukan hanya merupakan respons terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga strategi untuk menjadikan literasi dan kearsipan sebagai pilar utama daya saing Jakarta. kecerdasan buatan akan menjadi pondasi dalam menciptakan institusi yang cerdas, adaptif, dan mampu memberikan dampak sosial yang nyata bagi seluruh warga.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang disampaikan saat proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi dasar penyusunan tujuan dan sasaran untuk pembangunan Provinsi DKI Jakarta periode Tahun 2025-2029.

Tujuan merupakan kondisi akhir *(ultimate outcome)* yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung dan mengawal pelaksanaan pembangunan daerah.

Visi

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2025 – 2029 adalah:

“JAKARTA KOTA GLOBAL DAN PUSAT PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN, DAN MENYEJAHTERAKAN SELURUH WARGANYA”

JAKARTA KOTA GLOBAL: merupakan aspirasi jangka panjang Jakarta untuk mensejajarkan dirinya dengan kota-kota besar lain di dunia, khususnya di kawasan Asia Tenggara, dimana Jakarta dapat menjadi *primary node*

dalam jaringan ekonomi dunia yang kompetitif dan mampu menarik sumber daya seperti manusia, modal, barang, gagasan, serta informasi yang terbaik.

PUSAT PEREKONOMIAN: merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang menempatkan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan motor penggerak perekonomian nasional. Kawasan perkotaan menyimpan potensi yang besar untuk meningkatkan pendapatan negara. GDP per kapita tumbuh seiring dengan bertambahnya persentase penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan dan *high-income countries* di dunia memiliki persentase penduduk perkotaan yang paling tinggi. Saat ini kawasan aglomerasi Jabodetabekjur merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Nasional.

BERDAYA SAING: dalam konstelasi kota global daya saing merupakan elemen penting karena tidak hanya Jakarta harus lebih baik dari dirinya di masa lampau, tetapi juga secara paralel berkompetisi dengan kota-kota lain yang terus memperbaiki kualitasnya. Kota yang memiliki daya saing tinggi mampu berkembang lebih pesat karena mampu menarik dan mempertahankan investasi, tenaga kerja, dan bisnis dibandingkan dengan kota lain.

BERKELANJUTAN: makna kota berkelanjutan adalah kota yang dirancang dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan penduduknya saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini mencakup keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar kota tetap layak huni dalam jangka panjang.

MENYEJAHTERAKAN SELURUH WARGA: memiliki makna bahwa hakikatnya seluruh proses pembangunan yang berlangsung di Jakarta adalah untuk mencapai kesejahteraan dan taraf hidup yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakat. Kesejahteraan di sini dapat diartikan luas dan tidak hanya terkait dimensi ekonomi, namun merupakan konsep *well-being* yang holistik. Setiap warga Jakarta memiliki level kebutuhan yang berbeda-beda, untuk sebagian golongan yang mampu, Pemerintah dapat tetap memberikan nilai ‘sejahtera’ seperti kualitas udara yang lebih baik dan fasilitas publik yang nyaman. Di sisi lain bagi golongan yang rentan,

Pemerintah dapat hadir menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan mengurangi beban hidup sehari-hari. Sehingga Jakarta dapat mewujudkan secara penuh konsep kota untuk semua atau *cities for all*.

Misi

Misi disusun dalam rangka merencanakan langkah-langkah yang akan diimplementasikan dalam mewujudkan visi yang telah dideskripsikan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan menjadi alat navigasi arah kebijakan yang mempengaruhi rekomendasi kerja berupa program prioritas dalam proses pencapaian kinerja yaitu tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi Jakarta pada tahun 2030, lima misi pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera
2. Mewujudkan Pusat Ekonomi Inovatif dengan Pembangunan dan Akses Sumber Daya yang Merata
3. Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal
4. Mewujudkan Ruang Kota Layak Huni, Berketahanan, dan Berkelanjutan
5. Mewujudkan Konektivitas dan Sinergi Kegiatan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Tahun 2025-2029, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam urusan perpustakaan berperan menunjang Misi ke-1 Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera dengan tujuan Tercapainya Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Megapolitan dan sasaran Menguatnya Nilai Budaya, Demokrasi, dan Kebhinekaan Masyarakat, sedangkan untuk urusan Kearsipan untuk mendukung Misi ke-3 Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal dengan tujuan Tercapainya Reformasi Manajemen dan Layanan Kota Modern dan sasaran Terakselerasinya Transformasi Digital dan Layanan Kota Berkualitas Berbasis Teknologi.

Tabel 3. 1 Keterkaitan RPJMD dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra
Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian Yang Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Menyejahterkaan Seluruh Warganya	1. Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera	Tercapainya Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Megapolitan	Menguatnya Nilai Budaya, Demokrasi, dan Kebhinekaan Masyarakat	Terwujudnya masyarakat literat yang berpengetahuan, kreatif, dan inovatif	Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat yang menguatkan daya saing kota globa
	2. Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal	Tercapainya Reformasi Manajemen dan Layanan Kota Modern	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Layanan Kota Berkualitas Berbasis Teknolog	Meningkatnya kualitas, kapabilitas, akuntabilitas, dan mutu penyelenggaraan layanan arsip yang lebih responsif	Terwujudnya tata kelola layanan kearsipan yang berkualitas efektif dan akuntabel

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merumuskan tujuan dan sasaran dalam perencanaan strategisnya sebagai berikut:

3.1.1 Tujuan

Berdasarkan visi, misi, serta hasil analisis permasalahan dan isu strategis, maka tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya masyarakat literat yang berpengetahuan, kreatif, dan inovatif

   Indikator: Nilai Tingkat Kegemaran Membaca

   Definisi: Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi dan pengetahuan dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu.

   Metode Pengukuran: Hasil Survey Tingkat Kegemaran Membaca terdiri 5 indikator utama, yaitu frekuensi membaca per minggu, durasi/lama waktu membaca per hari, jumlah bahan bacaan yang dibaca per 3 bulan, frekuensi akses internet per minggu, dan durasi akses internet per hari.
2. Meningkatnya kualitas, kapabilitas, akuntabilitas, dan mutu penyelenggaraan layanan arsip yang lebih responsive

   Indikator: Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

   Definisi Operasional : Menurut Perka ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. kegiatan pengawasan kearsipan dibentuk melalui audit kearsipan secara eksternal . audit kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

   Formula Pengukuran: Sesuai Perka ANRI Nomor 6 Tahun 2019

pengukuran dari hasil pengawasan kearsipan telah ditetapkan yaitu: > 90 - 100 AA (Sangat Memuaskan) > 80 - 90 A (Memuaskan) > 70 - 80 BB (Sangat Baik) > 60 -70 B (Baik) > 50 - 60 CC (Cukup) > 30 - 50 C (Kurang) > 0 -30 D (Sangat Kurang).

3.1.2 Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. meningkatnya pembangunan literasi masyarakat yang menguatkan daya saing kota global

   Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

   Definisi Operasional: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Formula Pengukuran: Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
2. Terwujudnya tata kelola layanan kearsipan yang berkualitas efektif dan akuntabel

   Definisi Operasional: tingkat kepatuhan pengelolaan arsip dinamis (penyusutan arsip pada Perangkat Daerah), pengelolaan arsip statis (Penyusunan sarana bantu temu balik/naskah sumber dan penyampaian informasi arsip melalui JIKN), dan penggunaan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis dalam pengelolaan arsip di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Formula Pengukuran:

   a. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan
   b. Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Penyusutan Arsip/ Jumlah Perangkat Daerah
   c. Persentase Penyusunan Sarana Bantu Temu Balik Arsip Statis dan disampaikan melalui JIKN/ Jumlah Arsip Statis yang telah diakuisisi

Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Pada Tahun ke-					Ket.
						2026	2027	2028	2029	2030	
1	Terwujudnya masyarakat literat yang berpengetahuan, kreatif, dan inovatif		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	72.93	73.93	74.43	74.93	75.43	75.93	
2		Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat yang menguatkan daya saing kota global	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	73.58	74.01	74.26	74.51	74.76	75.01	
3	Meningkatnya kualitas, kapabilitas, akuntabilitas, dan mutu penyelenggaraan layanan arsip yang lebih responsif		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	93.11	93.61	94.11	94.61	95.11	95.61	
4		Terwujudnya tata kelola layanan kearsipan yang berkualitas efektif dan akuntabel	Tingkat Pengelolaan Arsip	Persentase	67.32	92.59	93.09	93.59	94.09	94.59	

3.2 Strategi

Strategi Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat disajikan seperti gambar berikut.

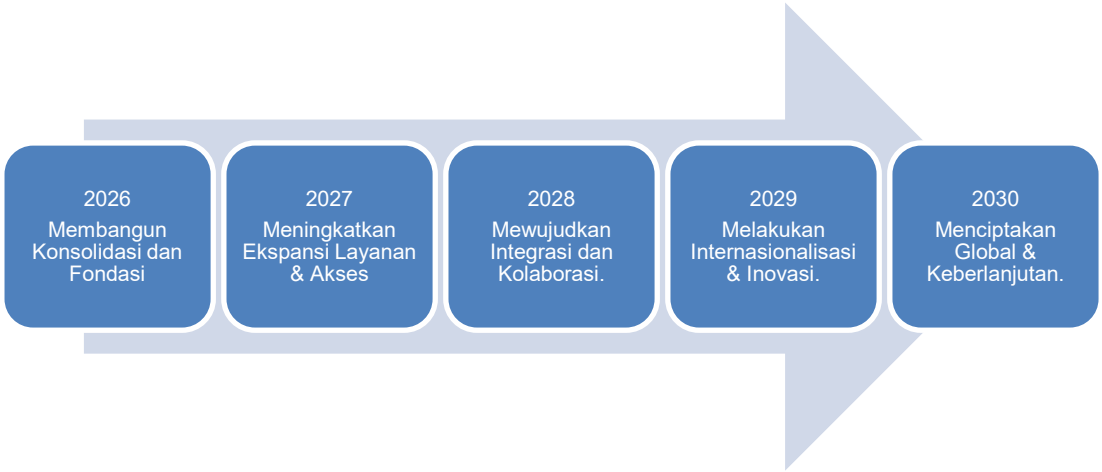

Gambar 3. 1 Penahapan Renstra Tahun 2025-2029

Tahun 2026 – Membangun Konsolidasi dan Fondasi.

Pada tahap awal ini, fokus utama diarahkan pada konsolidasi kelembagaan, pemetaan kebutuhan, serta pembangunan dasar sistem dan sumber daya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta berupaya berkomitmen memperkuat regulasi, tata kelola, dan infrastruktur digital melalui pemetaan kebutuhan literasi masyarakat serta kesiapan digitalisasi arsip di seluruh unit kerja. Langkah ini menjadi dasar penting bagi pengembangan sistem informasi terintegrasi dan perumusan kebijakan berbasis data.

Tahun 2026 juga menjadi momentum strategis untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan pustakawan dan arsiparis, penyusunan pedoman teknis digitalisasi arsip, serta pengembangan *Creative Hub Library* di wilayah kota. Seluruh inisiatif ini bertujuan membangun fondasi kokoh menuju transformasi digital dan perluasan akses layanan literasi, demi mewujudkan *Jakarta Memory City*, kota yang menjadi pusat pengetahuan, sejarah dan budaya.

Tahun 2027 – Meningkatkan Ekspansi Layanan & Akses.

Memasuki tahun kedua, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta memulai fase ekspansi layanan dan perluasan akses publik. Penerapan *Creative Hub Library* diperluas ke seluruh wilayah administrasi, disertai dengan penguatan jaringan kolaborasi lintas komunitas dan sektor. Inovasi layanan terus didorong melalui pengenalan *dashboard* layanan digital kearsipan, yang dirancang untuk mempermudah akses dan pemanfaatan data oleh masyarakat dan instansi pemerintah.

Peningkatan kapasitas SDM juga menjadi prioritas, melalui pelatihan lanjutan dan kolaborasi antarsektor, khususnya dengan lembaga pendidikan dan sosial. Upaya ini bertujuan untuk menjadikan layanan literasi, arsip, dan budaya semakin inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan ini, masyarakat mulai merasakan dampak nyata dari transformasi layanan, berupa kemudahan akses literasi digital dan kearsipan yang terintegrasi dengan teknologi.

Tahun 2028 – Mewujudkan Integrasi dan Kolaborasi.

Arah kebijakan pada tahap ini difokuskan pada integrasi lintas sistem dan kolaborasi multipihak. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta mengintegrasikan sistem layanan digital antara perpustakaan, arsip, dan data budaya dalam JakLitera+ 2.0 (satu pintu akses data literasi & sejarah Jakarta), membentuk forum literasi Jakarta (*Jakarta Literacy Network*) sebagai wadah kolaborasi antarlembaga, dan membangun kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat (NGO) dan CSR perusahaan untuk pembiayaan program pemberdayaan literasi komunitas.

Tahun 2029 – Melakukan Internasionalisasi & Inovasi.

Pada tahap ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta memperluas jejaring global melalui kerjasama dengan lembaga internasional seperti UNESCO, *International Council on Archives (ICA),* dan *British Library*, khususnya dalam program *Memory of the World* serta penerapan standar internasional, seperti ISO 15489 dan sertifikasi ICA. Di bidang literasi, akan menyelenggarakan forum tahunan inovasi sosial dan literasi kota global. Inisiatif ini tidak hanya memperkenalkan kekayaan literasi dan sejarah lokal, tetapi juga membuka ruang pertukaran ide dan inovasi lintas negara.

Dalam pengelolaan arsip, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta mulai mengimplementasikan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) tingkat lanjut untuk mendukung otomasi pencarian arsip, klasifikasi tematik, dan autentikasi data digital. Inovasi ini memperkuat posisi Jakarta sebagai percontohan nasional dalam pengelolaan arsip digital dan literasi berbasis teknologi. Jakarta juga menjajaki program *sister city* dengan kota global seperti Amsterdam, yang memungkinkan integrasi arsip sejarah kota Jakarta dengan koleksi arsip yang tersimpan di Belanda. Inisiatif ini bertujuan memperkuat konektivitas sejarah dan memperkaya narasi kota dalam konteks kota global.

Tahun 2030 – Menciptakan Global & Keberlanjutan.

Tahap akhir dari renstra ini adalah fase konsolidasi global dan penguatan keberlanjutan program. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta fokus pada pembangunan infrastruktur jangka panjang, seperti pusat data arsip mandiri dan integrasi dengan sistem *cloud* nasional, guna menjamin keamanan dan ketersediaan data dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Seluruh inovasi dan capaian terdokumentasi secara sistematis dalam sistem *Smart Archives Jakarta,* yang berfungsi sebagai platform rujukan nasional dalam transformasi digital kearsipan dan literasi. Selain keberlanjutan teknis, perhatian juga diarahkan pada strategi pendanaan berkelanjutan melalui kolaborasi CSR, dan skema *public-private partenersip*

(PPP). Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta juga mendorong replikasi model literasi dan pengelolaan kearsipan Jakarta ke daerah lain di Indonesia maupun kota-kota mitra internasional.
Melalui langkah-langkah ini, Jakarta tidak hanya tampil sebagai kota dengan sistem literasi dan arsip digital yang unggul, tetapi juga kota global yang berkelanjutan, dan berdaya saing.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta menetapkan enam strategi utama, antara lain :

Strategi 1: Transformasi Digital dan Adopsi Teknologi Kecerdasan Buatan

Dengan strategi ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak hanya membenahi aspek teknis digitalisasi, tetapi juga secara substansial memperluas fungsi kelembagaan menjadi penggerak literasi, sumber sejarah, dan fondasi kebijakan publik berbasis pengetahuan, namun juga menjadikannya bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana visi PN 8 dalam Asta Cita.

Strategi 2 : Kolaborasi Ekosistem dan Kemitraan Strategis

Dengan pengembangan ini, perpustakaan tidak lagi dipandang sebagai tempat menyimpan buku semata, melainkan sebagai pusat gravitasi sosial baru: tempat bertemunya kreativitas, kolaborasi, dan inovasi warga kota. Hal ini menjadikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan aktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, pembangunan manusia, dan kohesi sosial di Jakarta.

Strategi 3: Inklusivitas dan Pemerataan Akses

Melalui strategi ini, perpustakaan tidak hanya menjadi penyedia informasi, tetapi juga aktor penting dalam mendorong kesetaraan sosial, pembangunan manusia, dan penguatan karakter bangsa. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan memainkan peran sentral dalam mengurangi kesenjangan

literasi, membuka peluang belajar, dan memperkuat nilai-nilai solidaritas sosial di tengah masyarakat kota global seperti Jakarta.

Strategi 4 : Reformasi Tata Kelola Kelembagaan

Dengan strategi ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak hanya memperbaiki prosedur internal, tetapi juga mentransformasi diri menjadi lembaga yang berpihak pada penguatan komunitas, pemberdayaan warga, dan penciptaan ruang-ruang ekspresi budaya yang terbuka dan kolaboratif.

Strategi 5: Penguatan SDM dan Budaya Kerja

Strategi ini memastikan bahwa penguatan SDM tidak hanya berorientasi global, tetapi juga berpijak kuat pada konteks lokal Jakarta. Tujuannya,Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan menghasilkan tenaga pustakawan dan arsiparis yang adaptif, tangguh, dan relevan, serta siap menjadikan perpustakaan dan arsip sebagai pilar peradaban dan perlindungan sosial masyarakat Jakarta.

Strategi 6: Pelestarian Budaya dan Penguatan Identitas Kolektif Jakarta *(Heritage and Cultural Preservation)*

Dengan strategi ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengambil peran sentral dalam penguatan identitas kolektif warga Jakarta melalui literasi sejarah dan budaya. Pendekatan berbasis warisan ini tidak hanya menjaga memori kota, tetapi juga membentuk karakter warga yang sadar sejarah, kreatif, dan siap berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan berbasis budaya.

3.3 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 adalah rangkaian langkah operasional yang diturunkan dari NSPK, RPJPD/RPJMD, dan kebijakan nasional, serta selaras dengan fungsi dan mandat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai pengelola informasi, pengetahuan, memori kolektif, dan literasi publik di Provinsi DKI Jakarta. Arah kebijakan ini juga ditujukan untuk menjawab tantangan pembangunan kota global melalui kontribusi nyata pada dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan berbasis pengetahuan.

Berdasarkan strategi-strategi yang telah ditetapkan, arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta 2025–2029 diarahkan pada:

3.3.1 Urusan Perpustakaan

1. Mewujudkan Perpustakaan sebagai *Creative Hub* yang Menjadi Pusat Literasi, Inovasi Sosial, dan Inklusivitas

   Mendorong evolusi peran perpustakaan dari tempat penyimpanan informasi menjadi *Creative Hub* dan pusat pemberdayaan warga.

   - Menyediakan ruang aman untuk dialog, pembelajaran, dan inovasi komunitas, khususnya bagi kelompok rentan, marjinal, dan usia produktif yang tidak aktif (NEET).
   - Mengembangkan program literasi tematik lintas generasi (literasi digital, kesehatan, gizi, keuangan, reproduksi, kesetaraan gender, dll.) yang mendukung pengentasan stunting, pengangguran, dan penguatan ketahanan sosial budaya.
   - Mengintegrasikan pustakawan sebagai aktor inklusi sosial dan navigator literasi kehidupan warga dalam sistem layanan kota.

2. Mewujudkan Digitalisasi Berkelanjutan dan Adopsi Teknologi Kecerdasan Buatan secara Etis dan Inklusif

   - Mempercepat digitalisasi total seluruh layanan perpustakaan dan kearsipan, termasuk interoperabilitas data dengan OPD untuk mendukung SPBE.

- Mengembangkan dashboard layanan terpadu berbasis Kecerdasan Buatan yang mengintegrasikan perpustakaan, arsip, dan naskah kuno untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan sejarah.
- Mengimplementasikan Kecerdasan Buatan dalam layanan seperti klasifikasi arsip otomatis, rekomendasi buku, chatbot literasi, serta sistem analitik prediktif untuk penjangkauan wilayah literasi rendah.
- Menyusun pedoman etika Kecerdasan Buatan, perlindungan data, dan prinsip inklusi digital agar inovasi tetap berorientasi pada hak publik, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

3. Memperluas akses informasi/pengetahuan yang inklusif berdasarkan kesetaraan dan keragaman
   - Layanan Perpustakaan untuk Kelompok Rentan dan Marjinal
   - Program Literasi Keliling Berbasis kecerdasan buatan untuk Penargetan Presisi
   - Peningkatan Akses dan Mutu Perpustakaan Sekolah dan Komunitas
   - Integrasi Literasi Kesehatan dan Sosial dalam Perpustakaan
   - Perpustakaan Komunitas sebagai Pusat Ekspresi Budaya dan Koneksi Sosial
   - Optimalisasi Pemanfaatan Koleksi dan Literasi Berbasis Konteks Lokal
   - Penguatan Indikator Inklusivitas dan Literasi Sosial
4. Mengadopsi pendekatan kelembagaan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
   - Standarisasi mutu layanan
   - Identifikasi kebutuhan literasi masyarakat
   - Pemberdayaan komunitas pemustaka
   - Penguatan kolaborasi untuk mendukung program inklusi sosial
   - Fasilitasi dialog antarbudaya
5. Mengembangkan budaya perpustakaan yang inovatif, adaptif dan kolaboratif yang menjawab tantangan perkembangan zaman

- Meningkatkan kapasitas pustakawan dan arsiparis melalui sertifikasi internasional (IFLA, ICA, dll.), program residensi, dan pertukaran staf dengan institusi luar negeri.
- Menyusun strategi keikutsertaan dalam forum dan jejaring global di bidang literasi, warisan budaya, dan transformasi digital.
- Menjadikan perpustakaan sebagai ruang ketahanan sosial saat krisis (bencana, pandemi, guncangan sosial) melalui SDM yang tangguh, peka, dan adaptif.
- Mendorong partisipasi aktif dalam pengajuan warisan budaya dokumen Jakarta ke program UNESCO *Memory of the World* untuk memperkuat identitas global Jakarta.

6. Pelestarian Warisan Budaya dan Penguatan Identitas Kolektif Jakarta
   - Penguatan Pusat Dokumen Sastra HB Jassin
   - Pengembangan Basis Data Kearifan Lokal Terbuka
   - Internasionalisasi Warisan Budaya Jakarta melalui UNESCO *Memory of the World*
   - Revitalisasi Literasi Budaya Melalui
   - Festival Tahunan "Jakarta Pustakarsa"
   - Pelestarian naskah kuno, dan warisan budaya lokal sebagai sumber pembelajaran dan penguatan jati diri warga kota.
   - Pengkajian dan pengembangan ekosistem penelitian naskah kuno.

3.3.2 Urusan Kearsipan

1. Digitalisasi berkelanjutan yang mendorong standarisasi universal dengan mengadopsi kecerdasan buatan secara etis dan inklusif
   - Integrasi teknologi–kecerdasan buatan untuk otomatisasi layanan, otorisasi pengguna, autentikasi arsip, dan temu kembali arsip
   - Dashboard layanan digital terintegrasi untuk publik
   - Kecerdasan buatan digunakan untuk klasifikasi arsip otomatis, sistem rekomendasi, *chatbot*, dan analitik program. Disertai pedoman etika dan perlindungan data digital

2. Mewujudkan pengelolaan kearsipan berbasis jejaring dan komunitas
    - Inkubasi Komunitas dan Literasi Arsip Tematik
    - Platform Digital Kolaboratif Kearsipan Lintas Stakeholder
    - Jejaring Kearsipan Antarwilayah
3. Mengembangkan layanan kearsipan dan memperluas akses terhadap informasi arsip berbasis digital
    - Digitalisasi kearsipan
    - Menyelenggarakan pameran
    - Edukasi kearsipan pada masyarakat
    - Membangun portal informasi kearsipan
    - Memberi bimbingan dan pelatihan SDM kearsipan pada perangkat daerah, BUMD, Perusahaan, dan Ormas/Orpol
    - Meningkatkan efisiensi pelayanan melalui sistem pencarian arsip yang mudah
4. Modernisasi penyelenggaraan kearsipan sebagai sumber memori kolektif dan pengetahuan publik.
    - Digitalisasi prosedur layanan dan penerapan indikator kinerja
    - Penguatan Partisipasi masyarakat/komunitas/ perseorangan dalam pelestarian dan penyelamatan arsip
    - Pengawasan kearsipan berbasis data sebagai bahan akuntabilitas organisasi
    - Arsip dijadikan sumber pengetahuan publik melalui portal terbuka, dashboard digital, dan sejarah tematik berbasis kecerdasan buatan.
    - Penguatan kolaborasi Perangkat Daerah, BUMD, Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat dalam penyerahan arsip statis
    - Penyediaan anggaran, sarana dan prasarana kearsipan yang terstandarisasi dan SDM yang terlatih
    - Apresiasi pengelolaan arsip
    - Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA)

5. Penguatan Regulasi dan Reformasi Tata Kelola Lintas Sektor
    - Meningkatkan kapasitas arsiparis melalui sertifikasi internasional (ICA), program residensi, dan pertukaran staf dengan institusi luar negeri.
    - Menyusun strategi keikutsertaan dalam forum dan jejaring global di warisan budaya dan transformasi digital.
    - Mendorong partisipasi aktif dalam pengajuan warisan budaya dokumen Jakarta ke program Memori Kolektif Bangsa dan *Memory of the World* untuk memperkuat identitas global Jakarta.
6. Pelestarian Warisan Budaya dan Penguatan Identitas Kolektif Jakarta
    - Pembuatan galeri/diorama arsip sebagai sumber informasi
    - Internasionalisasi Warisan Budaya Jakarta melalui UNESCO Memory of the World
    - Inovasi kemas ulang informasi arsip warisan budaya dalam bentuk karya lain

Tabel 3. 3 Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Pelaksanaan
1	Terwujudnya masyarakat literat yang berpengetahuan, kreatif, dan inovatif			
	Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat yang menguatkan daya saing kota global	Strategi 1: Transformasi Digital dan Adopsi Teknologi kecerdasan buatan	Arah Kebijakan 2: Mewujudkan Digitalisasi Berkelanjutan dan Adopsi Teknologi kecerdasan buatan secara Etis dan Inklusif	● Integrasi teknologi kecerdasan buatan untuk otomatisasi layanan, dan personalisasi konten ● Dashboard layanan digital terintegrasi untuk publik ● Seluruh proses layanan perpustakaan dan kearsipan diwajibkan terdigitalisasi dan terhubung dengan sistem informasi daerah.
		Strategi 2: Kolaborasi Ekosistem dan Kemitraan Strategis	Arah Kebijakan 1: Mewujudkan Perpustakaan sebagai *Creative Hub* yang Menjadi Pusat Literasi, Inovasi Sosial, dan Inklusivitas	● Pengembangan Ruang Kreatif Inklusif di Perpustakaan ● Inkubasi Komunitas dan Literasi Tematik ● Platform Digital Kolaboratif Lintas Stakeholder ● Jejaring *Creative Hub* Antar wilayah ● Katalisator Pembangunan Ekosistem Inovasi Sosial ● Literasi digital, informasi, budaya, dan data. ● Literasi dirancang untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan partisipasi aktif masyarakat di semua usia.

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Pelaksanaan
		Strategi 3: Inklusivitas dan Pemerataan Akses	Arah Kebijakan 2: Memperluas akses informasi/pengetahuan yang inklusif berdasarkan kesetaraan dan keragaman	• Layanan Perpustakaan untuk Kelompok Rentan dan Marjinal • Program Literasi Keliling Berbasis kecerdasan buatan untuk Penargetan Presisi • Peningkatan Akses dan Mutu Perpustakaan Sekolah dan Komunitas • Integrasi Literasi Kesehatan dan Sosial dalam Perpustakaan • Perpustakaan Komunitas sebagai Pusat Ekspresi Budaya dan Koneksi Sosial • Optimalisasi Pemanfaatan Koleksi dan Literasi Berbasis Konteks Lokal • Penguatan Indikator Inklusivitas dan Literasi Sosial
		Strategi 4: Reformasi Tata Kelola Kelembagaan untuk Penguatan Koneksi dan Ekspresi Budaya	Arah Kebijakan 3 Mengadopsi pendekatan kelembagaan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	• Standarisasi mutu layanan • Identifikasi kebutuhan literasi masyarakat • Pemberdayaan komunitas pemustaka • Penguatan kolaborasi untuk mendukung program inklusi sosial • Fasilitasi dialog antarbudaya
		Strategi 5 Penguatan SDM dan budaya kerja	Arah Kebijakan 4: Mengembangkan budaya perpustakaan yang inovatif, adaptif dan kolaboratif yang menjawab tantangan perkembangan zaman	• Meningkatkan kapasitas pustakawan dan arsiparis melalui sertifikasi internasional (IFLA, ICA, dll.), program residensi, dan pertukaran staf dengan institusi luar negeri.

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Pelaksanaan
				• Menyusun strategi keikutsertaan dalam forum dan jejaring global di bidang literasi, warisan budaya, dan transformasi digital. • Menjadikan perpustakaan sebagai ruang ketahanan sosial saat krisis (bencana, pandemi, guncangan sosial) melalui SDM yang tangguh, peka, dan adaptif. • Mendorong partisipasi aktif dalam pengajuan warisan budaya dokumen Jakarta ke program UNESCO Memory of the World untuk memperkuat identitas global Jakarta.
		Strategi 6: Pelestarian Budaya dan Penguatan Identitas Kolektif Jakarta (Heritage and Cultural Preservation)	Arah Kebijakan 6: Pelestarian Warisan Budaya dan Penguatan Identitas Kolektif Jakarta	• Penguatan Pusat Dokumen Sastra HB Jassin • Pengembangan Basis Data Kearifan Lokal Terbuka • Internasionalisasi Warisan Budaya Jakarta melalui UNESCO Memory of the World • Revitalisasi Literasi Budaya Melalui Festival Tahunan "Jakarta Pustakarsa" • Pelestarian naskah kuno, dan warisan budaya lokal sebagai sumber pembelajaran dan penguatan jati diri warga kota. • Pengkajian dan pengembangan ekosistem penelitian naskah kuno.

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Pelaksanaan
2	Meningkatnya kualitas, kapabilitas, akuntabilitas, dan mutu penyelenggaraan layanan arsip yang lebih responsif			
	Terwujudnya tata kelola layanan kearsipan yang berkualitas efektif dan akuntabel	Strategi 1: Transformasi Digital dan Adopsi Teknologi ~~K~~ecerdasan buatan	Arah Kebijakan 2 Digitalisasi berkelanjutan yang mendorong standarisasi universal dengan mengadopsi kecerdasan buatan secara etis dan inklusif	● Integrasi teknologi kecerdasan buatan untuk otomatisasi layanan, otorisasi pengguna, autentikasi arsip, dan temu kembali arsip ● Dashboard layanan digital terintegrasi untuk publik ● Kecerdasan buatan digunakan untuk klasifikasi arsip otomatis, sistem rekomendasi, *chatbot*, dan analitik program. Disertai pedoman etika dan perlindungan data digital
		Strategi 2: Kolaborasi Ekosistem dan Kemitraan Strategis	Arah Kebijakan 1: Mewujudkan pengelolaan kearsipan berbasis jejaring dan komunitas	● Inkubasi Komunitas dan Literasi Arsip Tematik ● Platform Digital Kolaboratif Kearsipan Lintas Stakeholder ● Jejaring Kearsipan Antarwilayah
		Strategi 3: Inklusivitas dan Pemerataan Akses	Arah Kebijakan : Mengembangkan layanan kearsipan dan memperluas akses terhadap informasi arsip berbasis digital	● Digitalisasi kearsipan ● Menyelenggarakan pameran ● Edukasi kearsipan pada masyarakat ● Membangun portal informasi kearsipan ● Memberi bimbingan dan pelatihan SDM kearsipan pada perangkat daerah, BUMD, Perusahaan, dan Ormas/Orpol ● Meningkatkan efisiensi pelayanan melalui sistem pencarian arsip yang mudah

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Pelaksanaan
		Strategi 4: Reformasi Tata Kelola Kelembagaan	Arah Kebijakan 3: Modernisasi penyelenggaraan kearsipan sebagai sumber memori kolektif dan pengetahuan publik.	● Digitalisasi prosedur layanan dan penerapan indikator kinerja ● Penguatan Partisipasi masyarakat/komunitas/ perseorangan dalam pelestarian dan penyelamatan arsip ● Pengawasan kearsipan berbasis data sebagai bahan akuntabilitas organisasi ● Arsip dijadikan sumber pengetahuan publik melalui portal terbuka, dashboard digital, dan sejarah tematik berbasis kecerdasan buatan. ● Penguatan kolaborasi Perangkat Daerah, BUMD, Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat dalam penyerahan arsip statis ● Penyediaan anggaran, sarana dan prasarana kearsipan yang terstandarisasi dan SDM yang terlatih ● Apresiasi pengelolaan arsip ● Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA)
		Strategi 5 Penguatan SDM dan budaya kerja	Arah Kebijakan 4: Penguatan Regulasi dan Reformasi Tata Kelola Lintas Sektor	● Meningkatkan kapasitas arsiparis melalui sertifikasi internasional (ICA) , program residensi, dan pertukaran staf dengan institusi luar negeri. ● Menyusun strategi keikutsertaan dalam forum dan jejaring global di warisan budaya dan transformasi digital. ● Mendorong partisipasi aktif dalam

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Pelaksanaan
				pengajuan warisan budaya dokumen Jakarta ke program Memori Kolektif Bangsa dan Memory of the World untuk memperkuat identitas global Jakarta.
		Strategi 6: Pelestarian Budaya dan Penguatan Identitas Kolektif Jakarta (*Heritage and Cultural Preservation*)	Arah Kebijakan 6: Pelestarian Warisan Budaya dan Penguatan Identitas Kolektif Jakarta	• Pembuatan galeri/diorama arsip sebagai sumber informasi • Internasionalisasi Warisan Budaya Jakarta melalui UNESCO Memory of the World • Inovasi kemas ulang informasi arsip warisan budaya dalam bentuk karya lain

3.4 Penyusunan Pohon Kinerja

Dasar penyusunan pohon kinerja adalah Permenpan No. 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Menyusun pohon kinerja sebenarnya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Gambar 3. 2 Proses penyusunan pohon kinerja

Pohon Kinerja Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029

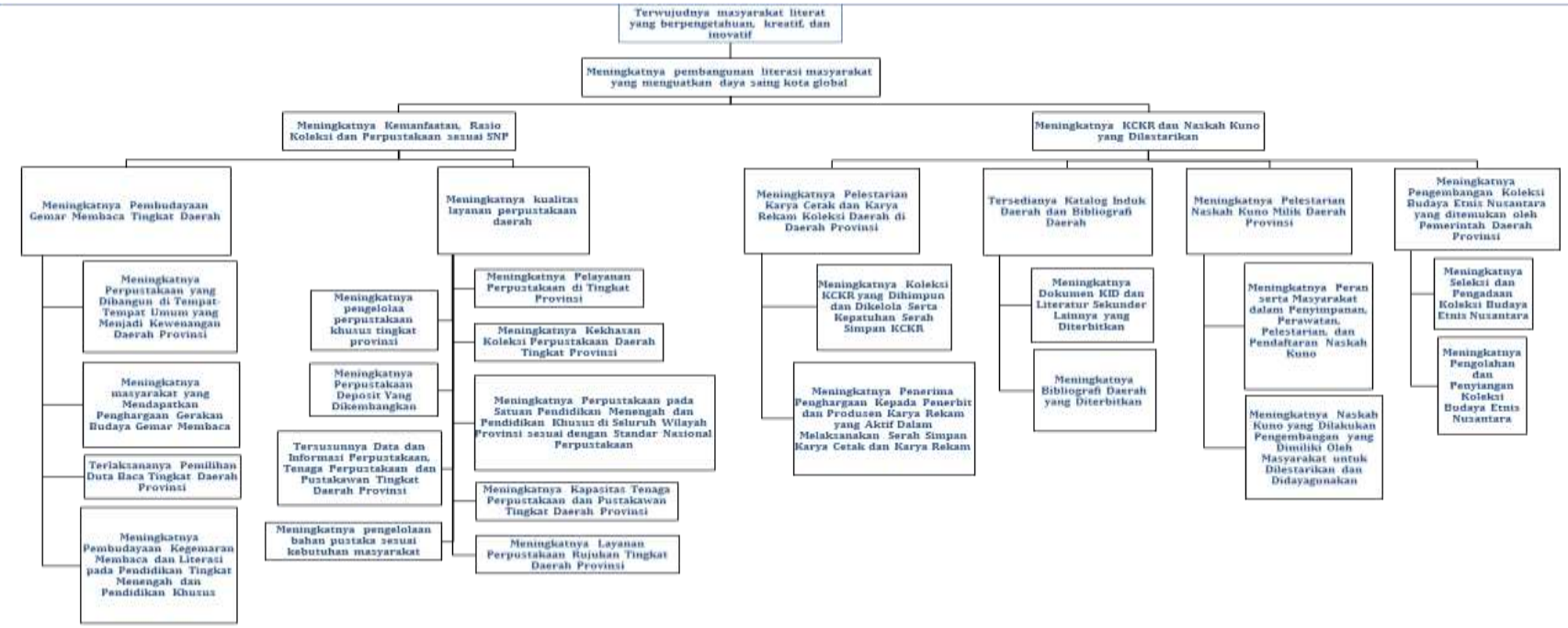

Gambar 3. 3 Pohon Kinerja Rencana Strategis Dispusip Urusan Perpustakaan

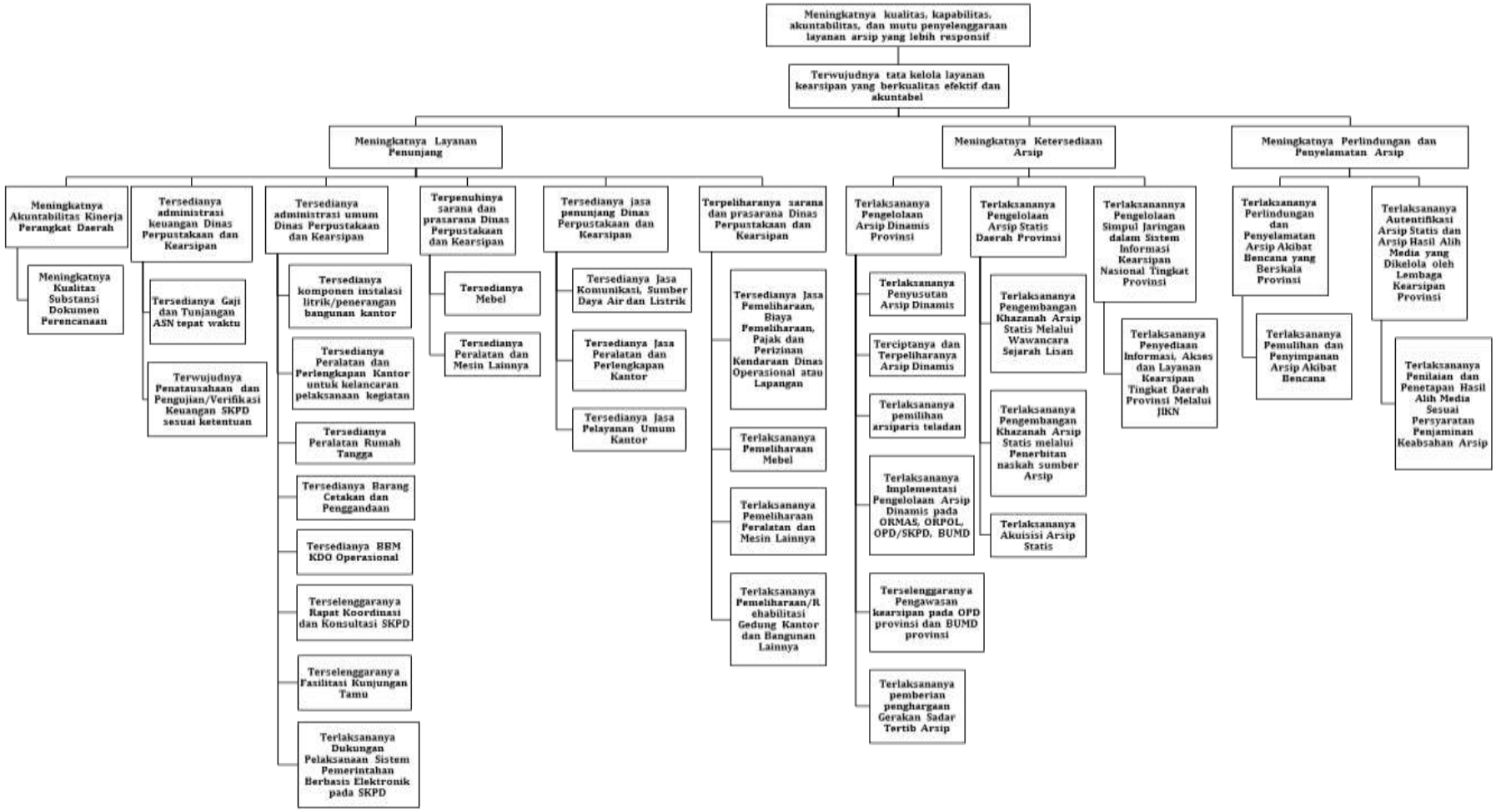

Gambar 3. 4 Pohon Kinerja Rencana Strategis Dispusip Urusan Kearsipan

Tabel 3. 4 Merumuskan Tujuan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Isu Strategis

Mandat/Dasar Hukum	(Muatan Teknokratis) Isu Strategis Perangkat Daerah	(Ultimate Outcome) Tujuan Renstra
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	Penguatan Budaya Literasi dan Kegemaran Membaca	Terwujudnya masyarakat literat yang berpengetahuan kreatif dan inovatif
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Pemerataan Akses dan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Meningkatkan kualitas kapabilitas akuntabilitas dan mutu penyelenggaraan layanan arsip yang lebih responsif
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Kualitas dan Kompetensi SDM Perpustakaan dan Kearsipan	
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah	Kepatuhan Pengelolaan Arsip di Lingkungan OPD	
Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Transformasi Digital Perpustakaan dan Kearsipan	
Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perpustakaan Elektronik iJakarta	Pelestarian Memori Kolektif Daerah dan Naskah Kuno	
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra Daerah 2025–2029	Keselarasan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	
	Perkembangan dan Penerapan kecerdasan buatan sebagai Motor Transformasi	

Harapan	Terselenggaranya layanan perpustakaan yang merata, inklusif, dan berbasis digital.	
	Terbangunnya tingkat kegemaran membaca masyarakat yang tinggi dan merata antar wilayah.	
	Terlaksananya tata kelola arsip yang akuntabel, aman, dan terdigitalisasi.	
	Terpeliharanya naskah kuno dan arsip sejarah Jakarta sebagai warisan budaya.	

Tabel 3. 5 Merumuskan Sasaran Renstra berdasarkan CSF Tujuan Renstra

(ULTIMATE OUTCOME) TUJUAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	*(CRITICAL SUCCESS FACTOR)* STRATEGI	*(INTERMEDIATE OUTCOME)* SASARAN RENSTRA
Terwujudnya masyarakat literat yang berpengetahuan, kreatif, dan inovatif	Terwujudnya Digitalisasi Berkelanjutan dan Adopsi Teknologi kecerdasan	1. Peningkatan Jumlah perpustakaan berSNP • Jumlah teknologi kecerdasan buatan yang terintegrasi dengan otomatisasi layanan, dan personalisasi konten • Jumlah Dashboard layanan digital yang terintegrasi dengan akses public • Jumlah layanan perpustakaan dan kearsipan yang terdigitalisasi dan terhubung dengan sistem informasi daerah.	Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat yang menguatkan daya saing kota global
	Terwujudnya Perpustakaan sebagai *Creative Hub* yang Menjadi Pusat Literasi, Inovasi Sosial, dan Inklusivitas	2. Peningkatan Jumlah anggota Perpustakaan • Jumlah Ruang Kreatif Inklusif yang dikembangkan di Perpustakaan • Jumlah Komunitas dan Literasi Tematik yang diinkubasi • Jumlah Platform Digital yang dikolaborasikan dengan Stakeholder • Jumlah Jejaring Creative Hub yang dikembangkan antarwilayah • Jumlah Katalisator Pembangunan Ekosistem Inovasi Sosial • Jumlah Literasi digital, informasi, budaya, dan data yang dirancang untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan partisipasi aktif masyarakat di semua usia.	

(ULTIMATE OUTCOME) TUJUAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	*(CRITICAL SUCCESS FACTOR)* STRATEGI	*(INTERMEDIATE OUTCOME)* SASARAN RENSTRA
	Meluasnya akses informasi/pengetahuan yang inklusif berdasarkan kesetaraan dan keragaman	3. Pemerataan Layanan Perpustakaan • Jumlah Layanan Perpustakaan untuk Kelompok Rentan dan Marjinal • Jumlah layanan Literasi Keliling Berbasis kecerdasan buatan untuk Penargetan Presisi • Jumlah Akses dan Mutu Perpustakaan Sekolah dan Komunitas yang ditingkatkan • Jumlah Perpustakaan Komunitas yang menjadi Pusat Ekspresi Budaya dan Koneksi Sosial • Jumlah Indikator Inklusivitas dan Literasi Sosial yang dikuatkan	
		4. Ketercukupan Koleksi • Jumlah Literasi Kesehatan dan Sosial yang terintegrasi dalam Perpustakaan • Jumlah Pemanfaatan Koleksi dan Literasi Berbasis Konteks Lokal yang dioptimalisasi	
	Teradopsinya pendekatan kelembagaan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	5. Tingkat Kunjungan Masyarakat perhari • Jumlah Standarisasi mutu layanan • Jumlah kebutuhan literasi masyarakat yang teridentifikasi • Jumlah komunitas pemustaka yang diberdayakan • Jumlah kolaborasi untuk mendukung program inklusi sosial yang dikuatkan • Jumlah dialog antarbudaya yang difasilitasi	

(ULTIMATE OUTCOME) TUJUAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	*(CRITICAL SUCCESS FACTOR)* STRATEGI	*(INTERMEDIATE OUTCOME)* SASARAN RENSTRA
	Berkembangnya budaya perpustakaan yang inovatif, adaptif dan kolaboratif yang menjawab tantangan perkembangan zaman	6. Ketercukupan tenaga pustakawan • Jumlah Kapasitas pustakawan dan arsiparis melalui sertifikasi internasional (IFLA, ICA, dll.), program residensi, dan pertukaran staf dengan institusi luar negeri yang ditingkatkan • Jumlah strategi yang disusun untuk keikutsertaan dalam forum dan jejaring global di bidang literasi, warisan budaya, dan transformasi digital. • Jumlah perpustakaan yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang ketahanan sosial saat krisis (bencana, pandemi, guncangan sosial) • Jumlah partisipasi aktif pustakawan yang mendorong pengajuan warisan budaya dokumen Jakarta ke program UNESCO Memory of the World untuk memperkuat identitas global Jakarta.	
	Terlestarikannya Warisan Budaya dan Penguatan Identitas Kolektif Jakarta	7. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi atau promosi • Jumlah koleksi Pusat Dokumen Sastra HB Jassin yang dikuatkan oleh masyarakat • Jumlah Basis Data Kearifan Lokal Terbuka yang dikembangkan • Jumlah Warisan Budaya Jakarta yang diinternasionalisasikan melalui UNESCO Memory of the World • Jumlah Literasi Budaya Melalui Festival Tahunan "Jakarta Pustakarsa"	

(ULTIMATE OUTCOME) TUJUAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	*(CRITICAL SUCCESS FACTOR)* STRATEGI	*(INTERMEDIATE OUTCOME)* SASARAN RENSTRA
		• Jumlah naskah kuno, dan warisan budaya lokal yang dilestarikan sebagai sumber pembelajaran dan penguatan jati diri warga kota. • Jumlah ekosistem penelitian naskah kuno yang dikembangkan	
Meningkatnya kualitas, kapabilitas, akuntabilitas, dan mutu penyelenggaraan layanan arsip yang lebih responsif	Terwujudnya pengelolaan kearsipan berbasis jejaring dan komunitas	1. Budaya tertib arsip non pemerintah • Jumlah Inkubasi Komunitas dan Literasi Arsip Tematik • Jumlah Platform Digital Kolaboratif Kearsipan Lintas Stakeholder • Jumlah Jejaring Kearsipan Antarwilayah	Terwujudnya tata kelola layanan kearsipan yang berkualitas efektif dan akuntabel
	Terwujudnya Modernisasi penyelenggaraan kearsipan sebagai sumber memori kolektif dan pengetahuan publik.	2. Budaya tertib arsip pemerintah • Jumlah prosedur layanan dan penerapan indikator kinerja yang terdigitalisasi • Jumlah Partisipasi masyarakat/komunitas/ perseorangan dalam pelestarian dan penyelamatan arsip • Jumlah Pengawasan kearsipan berbasis data sebagai bahan akuntabilitas organisasi • Jumlah Arsip dijadikan sebagai sumber pengetahuan publik melalui portal terbuka, dashboard digital, dan sejarah tematik berbasis kecerdasan buatan. • Jumlah kolaborasi Perangkat Daerah, BUMD, Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat dalam penyerahan arsip statis yang dikuatkan	

(ULTIMATE OUTCOME) TUJUAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	*(CRITICAL SUCCESS FACTOR)* STRATEGI	*(INTERMEDIATE OUTCOME)* SASARAN RENSTRA
		• Jumlah anggaran, sarana dan prasarana kearsipan yang terstandarisasi dan SDM yang terlatih • Jumlah pengelolaan arsip yang diapresiasi • Jumlah Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) yang dilaksanakan	
	Menguatnya Regulasi dan Reformasi Tata Kelola Lintas Sektor	3. Budaya tertib arsip dari sisi kinerja SDMK Kearsipan • Jumlah kapasitas arsiparis melalui sertifikasi internasional (ICA), program residensi, dan pertukaran staf dengan institusi luar negeri, yang ditingkatkan • Jumlah strategi keikutsertaan dalam forum dan jejaring global di warisan budaya dan transformasi digital Jumlah partisipasi aktif dalam pengajuan warisan budaya dokumen Jakarta ke program Memori Kolektif Bangsa dan Memory of the World untuk memperkuat identitas global Jakarta.	
	Terwujudnya Digitalisasi berkelanjutan yang mendorong standarisasi universal dengan mengadopsi kecerdasan buatan secara etis dan inklusif	4. Aspek ketersediaan arsip • Jumlah teknologi kecerdasan buatan untuk otomatisasi layanan, otorisasi pengguna, autentikasi arsip, dan temukembali arsip yang terintegrasi • Jumlah Dashboard layanan digital terintegrasi untuk public	

(ULTIMATE OUTCOME) TUJUAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	*(CRITICAL SUCCESS FACTOR)* STRATEGI	*(INTERMEDIATE OUTCOME)* SASARAN RENSTRA
		• Jumlah Kecerdasan buatan yang digunakan untuk klasifikasi arsip otomatis, sistem rekomendasi, chatbot, dan analitik program. Disertai pedoman etika dan perlindungan data digital	
	Berkembangnya layanan kearsipan dan memperluas akses terhadap informasi arsip berbasis digital	5. Aspek akses/ layanan pada masy • Jumlah kearsipan yang terdigitalisasi • Jumlah pameran yang diselenggarakan • Jumlah Edukasi kearsipan pada masyarakat • Jumlah portal informasi kearsipan yang dibangun • Jumlah bimbingan dan pelatihan SDM kearsipan pada perangkat daerah, BUMD, Perusahaan, dan Ormas/Orpol yang diberikan • Jumlah efisiensi pelayanan melalui sistem pencarian arsip yang ditingkakan	
	Terlestarikannya Warisan Budaya dan Penguatan Identitas Kolektif Jakarta	6. Aspek registrasi arsip MKB di lembaga arsip dengan arsip di masyarakat • Jumlah galeri/diorama arsip sebagai sumber informasi yang dibuat • Jumlah Warisan Budaya Jakarta melalui UNESCO Memory of the World yang diinternasionalisasi • Jumlah Inovasi kemas ulang informasi arsip warisan budaya dalam bentuk karya lain	

Tabel 3. 6 Mengidentifikasi Program Perangkat Daerah dan Program Pendukung Lainnya berdasarkan CSF Sasaran Renstra

(ULTIMATE OUTCOME) SASARAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	*(CRITICAL SUCCESS FACTOR)* STRATEGI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG PADA PERANGKAT DAERAH LAIN
Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat yang menguatkan daya saing kota global	Terwujudnya Digitalisasi Berkelanjutan dan Adopsi Teknologi kecerdasan	1. Peningkatan Jumlah perpustakaan berSNP · Jumlah teknologi kecerdasan buatan yang terintegrasi dengan otomatisasi layanan, dan personalisasi konten · Jumlah Dashboard layanan digital yang terintegrasi dengan akses public · Jumlah layanan perpustakaan dan kearsipan yang terdigitalisasi dan terhubung dengan sistem informasi daerah.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

(ULTIMATE OUTCOME) SASARAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	*(CRITICAL SUCCESS FACTOR)* STRATEGI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG PADA PERANGKAT DAERAH LAIN
	Terwujudnya Perpustakaan sebagai *Creative Hub* yang Menjadi Pusat Literasi, Inovasi Sosial, dan Inklusivitas	2. Peningkatan Jumlah anggota Perpustakaan · Jumlah Ruang Kreatif Inklusif yang dikembangkan di Perpustakaan · Jumlah Komunitas dan Literasi Tematik yang diinkubasi · Jumlah Platform Digital yang dikolaborasikan dengan Stakeholder · Jumlah Jejaring Creative Hub yang dikembangkan antarwilayah · Jumlah Katalisator Pembangunan Ekosistem Inovasi Sosial · Jumlah Literasi digital, informasi, budaya, dan data yang dirancang untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan partisipasi aktif masyarakat di semua usia.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	

(ULTIMATE OUTCOME) SASARAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	*(CRITICAL SUCCESS FACTOR)* STRATEGI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG PADA PERANGKAT DAERAH LAIN
	Meluasnya akses informasi/pengetahuan yang inklusif berdasarkan kesetaraan dan keragaman	3. Pemerataan Layanan Perpustakaan · Jumlah Layanan Perpustakaan untuk Kelompok Rentan dan Marjinal · Jumlah layanan Literasi Keliling Berbasis kecerdasan buatan untuk Penargetan Presisi · Jumlah Akses dan Mutu Perpustakaan Sekolah dan Komunitas yang ditingkatkan · Jumlah Perpustakaan Komunitas yang menjadi Pusat Ekspresi Budaya dan Koneksi Sosial · Jumlah Indikator Inklusivitas dan Literasi Sosial yang dikuatkan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		4. Ketercukupan Koleksi · Jumlah Literasi Kesehatan dan Sosial yang terintegrasi dalam Perpustakaan · Jumlah Pemanfaatan Koleksi dan Literasi Berbasis Konteks Lokal yang dioptimalisasi	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	

(ULTIMATE OUTCOME) SASARAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	*(CRITICAL SUCCESS FACTOR)* STRATEGI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG PADA PERANGKAT DAERAH LAIN
	Teradopsinya pendekatan kelembagaan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	5. Tingkat Kunjungan Masyarakat perhari · Jumlah Standarisasi mutu layanan · Jumlah kebutuhan literasi masyarakat yang teridentifikasi · Jumlah komunitas pemustaka yang diberdayakan · Jumlah kolaborasi untuk mendukung program inklusi sosial yang dikuatkan · Jumlah dialog antarbudaya yang difasilitasi	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	

(ULTIMATE OUTCOME) SASARAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	*(CRITICAL SUCCESS FACTOR)* STRATEGI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG PADA PERANGKAT DAERAH LAIN
	Berkembangnya budaya perpustakaan yang inovatif, adaptif dan kolaboratif yang menjawab tantangan perkembangan zaman	6. Ketercukupan tenaga pustakawan – Jumlah Kapasitas pustakawan dan arsiparis melalui sertifikasi internasional (IFLA, ICA, dll.), program residensi, dan pertukaran staf dengan institusi luar negeri yang ditingkatkan – Jumlah strategi yang disusun untuk keikutsertaan dalam forum dan jejaring global di bidang literasi, warisan budaya, dan transformasi digital. – Jumlah perpustakaan yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang ketahanan sosial saat krisis (bencana, pandemi, guncangan sosial) – Jumlah partisipasi aktif pustakawan yang mendorong pengajuan warisan budaya dokumen Jakarta ke program UNESCO Memory of the World untuk memperkuat identitas global Jakarta.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	

(ULTIMATE OUTCOME) SASARAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	*(CRITICAL SUCCESS FACTOR)* STRATEGI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG PADA PERANGKAT DAERAH LAIN
	Terlestarikannya Warisan Budaya dan Penguatan Identitas Kolektif Jakarta	2. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi atau promosi – Jumlah koleksi Pusat Dokumen Sastra HB Jassin yang dikuatkan oleh masyarakat – Jumlah Basis Data Kearifan Lokal Terbuka yang dikembangkan – Jumlah Warisan Budaya Jakarta yang diinternasionalisasikan melalui UNESCO Memory of the World – Jumlah Literasi Budaya Melalui Festival Tahunan "Jakarta Pustakarsa" – Jumlah naskah kuno, dan warisan budaya lokal yang dilestarikan sebagai sumber pembelajaran dan penguatan jati diri warga kota. – Jumlah ekosistem penelitian naskah kuno yang dikembangkan	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	

(ULTIMATE OUTCOME) SASARAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	*(CRITICAL SUCCESS FACTOR)* STRATEGI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG PADA PERANGKAT DAERAH LAIN
Terwujudnya tata kelola layanan kearsipan yang berkualitas efektif dan akuntabel	Terwujudnya pengelolaan kearsipan berbasis jejaring dan komunitas	3. Budaya tertib arsip non pemerintah – Jumlah Inkubasi Komunitas dan Literasi Arsip Tematik – Jumlah Platform Digital Kolaboratif Kearsipan Lintas Stakeholder – Jumlah Jejaring Kearsipan Antarwilayah	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
	Terwujudnya Modernisasi penyelenggaraan kearsipan sebagai sumber memori kolektif dan pengetahuan publik.	4. Budaya tertib arsip pemerintah – Jumlah prosedur layanan dan penerapan indikator kinerja yang terdigitalisasi – Jumlah Partisipasi masyarakat/ komunitas/ perseorangan dalam pelestarian dan penyelamatan arsip – Jumlah Pengawasan kearsipan berbasis data sebagai bahan akuntabilitas organisasi – Jumlah Arsip dijadikan sebagai sumber pengetahuan publik melalui portal terbuka, dashboard digital, dan sejarah tematik berbasis kecerdasan buatan.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	

(ULTIMATE OUTCOME) SASARAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	*(CRITICAL SUCCESS FACTOR)* STRATEGI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG PADA PERANGKAT DAERAH LAIN
		– Jumlah kolaborasi Perangkat Daerah, BUMD, Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat dalam penyerahan arsip statis yang dikuatkan – Jumlah anggaran, sarana dan prasarana kearsipan yang terstandarisasi dan SDM yang terlatih – Jumlah pengelolaan arsip yang diapresiasi – Jumlah Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) yang dilaksanakan		

(ULTIMATE OUTCOME) SASARAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	*(CRITICAL SUCCESS FACTOR)* STRATEGI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG PADA PERANGKAT DAERAH LAIN
	Menguatnya Regulasi dan Reformasi Tata Kelola Lintas Sektor	5. Budaya tertib arsip dari sisi kinerja SDMK Kearsipan – Jumlah kapasitas arsiparis melalui sertifikasi internasional (ICA), program residensi, dan pertukaran staf dengan institusi luar negeri, yang ditingkatkan – Jumlah strategi keikutsertaan dalam forum dan jejaring global di warisan budaya dan transformasi digital – Jumlah partisipasi aktif dalam pengajuan warisan budaya dokumen Jakarta ke program Memori Kolektif Bangsa dan Memory of the World untuk memperkuat identitas global Jakarta.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	

(ULTIMATE OUTCOME) SASARAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	*(CRITICAL SUCCESS FACTOR)* STRATEGI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG PADA PERANGKAT DAERAH LAIN
	Terwujudnya Digitalisasi berkelanjutan yang mendorong standarisasi universal dengan mengadopsi kecerdasan buatan secara etis dan inklusif	6. Aspek ketersediaan arsip – Jumlah teknologi kecerdasan buatan untuk otomatisasi layanan, otorisasi pengguna, autentikasi arsip, dan temukembali arsip yang terintegrasi – Jumlah Dashboard layanan digital terintegrasi untuk public – Jumlah Kecerdasan buatan yang digunakan untuk klasifikasi arsip otomatis, sistem rekomendasi, chatbot, dan analitik program. Disertai pedoman etika dan perlindungan data digital	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	

(ULTIMATE OUTCOME) SASARAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	*(CRITICAL SUCCESS FACTOR)* STRATEGI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG PADA PERANGKAT DAERAH LAIN
	Berkembangnya layanan kearsipan dan memperluas akses terhadap informasi arsip berbasis digital	7. Aspek akses/ layanan pada masy – Jumlah kearsipan yang terdigitalisasi – Jumlah pameran yang diselenggarakan – Jumlah Edukasi kearsipan pada masyarakat – Jumlah portal informasi kearsipan yang dibangun – Jumlah bimbingan dan pelatihan SDM kearsipan pada perangkat daerah, BUMD, Perusahaan, dan Ormas/Orpol yang diberikan – Jumlah efisiensi pelayanan melalui sistem pencarian arsip yang ditingkakan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	

(ULTIMATE OUTCOME) SASARAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	*(CRITICAL SUCCESS FACTOR)* STRATEGI	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG PADA PERANGKAT DAERAH LAIN
	Terlestarikannya Warisan Budaya dan Penguatan Identitas Kolektif Jakarta	8. Aspek registrasi arsip MKB di lembaga arsip dengan arsip di masyarakat – Jumlah galeri/diorama arsip sebagai sumber informasi yang dibuat – Jumlah Warisan Budaya Jakarta melalui UNESCO Memory of the World yang diinternasionalisasi – Jumlah Inovasi kemas ulang informasi arsip warisan budaya dalam bentuk karya lain	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome* dan *output*. Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.1 Uraian Program Kegiatan dan Subkegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan mendukung Program Pembangunan Daerah sebagai bagian dari Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam rangka mencapai Visi dan Misinya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit
2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan
2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi
2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi
2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
2.23.03.1.01.0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah
2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah
2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah
2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi
2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
2.23.03.1.03.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
2.23.03.1.04.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2.24.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.24.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.24.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.24.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.24.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.24.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.24.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.24.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.24.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.24.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.24.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material
2.24.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.24.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.24.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
2.24.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.24.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel
2.24.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.24.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.24.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.24.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.24.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.24.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.24.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.24.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
2.24.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.24.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis
2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis
2.24.02.1.01.0007	Pemilihan Arsiparis Teladan
2.24.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi
2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi
2.24.02.1.01.0013	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
2.24.02.1.02.0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan
2.24.02.1.02.0004	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip
2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis
2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
2.24.03.1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi
2.24.03.1.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana
2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi
2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

Tabel 4. 2 Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Fokus Pelaksanaan dan Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Pelaksanaan	Program	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya masyarakat literat yang berpengetahuan, kreatif, dan inovatif					
	Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat yang menguatkan daya saing kota global	Strategi 1: Transformasi Digital dan Adopsi Teknologi kecerdasan buatan	Arah Kebijakan 2: Mewujudkan Digitalisasi Berkelanjutan dan Adopsi Teknologi kecerdasan buatan secara Etis dan Inklusif	• Integrasi teknologi kecerdasan buatan untuk otomatisasi layanan, dan personalisasi konten • Dashboard layanan digital terintegrasi untuk publik • Seluruh proses layanan perpustakaan dan kearsipan diwajibkan terdigitalisasi dan terhubung dengan sistem informasi daerah.	Program Pembinaan Perpustakaan	• Tingkat • Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat • Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk • Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar
		Strategi 2: Kolaborasi Ekosistem dan Kemitraan Strategis	Arah Kebijakan 1: Mewujudkan Perpustakaan sebagai Creative Hub yang Menjadi Pusat Literasi, Inovasi Sosial, dan Inklusivitas	• Pengembangan Ruang Kreatif Inklusif di Perpustakaan • Inkubasi Komunitas dan Literasi Tematik • Platform Digital Kolaboratif Lintas Stakeholder • Jejaring Creative Hub Antarwilayah • Katalisator Pembangunan Ekosistem Inovasi Sosial • Literasi digital, informasi, budaya, dan data.	• Program Pembinaan Perpustakaan • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	• Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat • Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk • Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Pelaksanaan	Program	Indikator Kinerja
				• Literasi dirancang untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan partisipasi aktif masyarakat di semua usia.		Pemerintahan Daerah
		Strategi 3: Inklusivitas dan Pemerataan Akses	Arah Kebijakan akan ditambahkan Memperluas akses informasi/pengetahuan yang inklusif berdasarkan kesetaraan dan keragaman	• Layanan Perpustakaan untuk Kelompok Rentan dan Marjinal • Program Literasi Keliling Berbasis kecerdasan buatan untuk Penargetan Presisi • Peningkatan Akses dan Mutu Perpustakaan Sekolah dan Komunitas • Integrasi Literasi Kesehatan dan Sosial dalam Perpustakaan • Perpustakaan Komunitas sebagai Pusat Ekspresi Budaya dan Koneksi Sosial • Optimalisasi Pemanfaatan Koleksi dan Literasi Berbasis Konteks Lokal • Penguatan Indikator Inklusivitas dan Literasi Sosial	• Program Pembinaan Perpustakaan	• Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat • Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk
		Strategi 4: Reformasi Tata Kelola	Arah Kebijakan ....: Mengadopsi pendekatan kelembagaan	• Standarisasi mutu layanan • Identifikasi kebutuhan literasi masyarakat	• Program pembinaan perpustakaan	• Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Pelaksanaan	Program	Indikator Kinerja
		Kelembagaan untuk Penguatan Koneksi dan Ekspresi Budaya	Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	● Pemberdayaan komunitas pemustaka ● Penguatan kolaborasi untuk mendukung program inklusi sosial ● Fasilitasi dialog antarbudaya		oleh Masyarakat ● Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk
		Strategi 5 Penguatan SDM dan budaya kerja	Arah Kebijakan 4: Mengembangkan budaya perpustakaan yang inovatif, adaptif dan kolaboratif yang menjawab tantangan perkembangan zaman	● Meningkatkan kapasitas pustakawan dan arsiparis melalui sertifikasi internasional (IFLA, ICA, dll.), program residensi, dan pertukaran staf dengan institusi luar negeri. ● Menyusun strategi keikutsertaan dalam forum dan jejaring global di bidang literasi, warisan budaya, dan transformasi digital. ● Menjadikan perpustakaan sebagai ruang ketahanan sosial saat krisis (bencana, pandemi, guncangan sosial) melalui SDM yang tangguh, peka, dan adaptif. ● Mendorong partisipasi aktif dalam pengajuan warisan budaya dokumen Jakarta ke program UNESCO *Memory of the World* untuk	● Program Pembinaan Perpustakaan ● Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	● Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat ● Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk ● Persentase Capaian naskah kuno milik daerah yang dilestarikan

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Pelaksanaan	Program	Indikator Kinerja
				memperkuat identitas global Jakarta.		
		Strategi 6: Pelestarian Budaya dan Penguatan Identitas Kolektif Jakarta (Heritage and Cultural Preservation)	Arah Kebijakan 6: Pelestarian Warisan Budaya dan Penguatan Identitas Kolektif Jakarta	● Penguatan Pusat Dokumen Sastra HB Jassin ● Pengembangan Basis Data Kearifan Lokal Terbuka ● Internasionalisasi Warisan Budaya Jakarta melalui UNESCO Memory of the World ● Revitalisasi Literasi Budaya Melalui Festival Tahunan "Jakarta Pustakarsa" ● Pelestarian naskah kuno, dan warisan budaya lokal sebagai sumber pembelajaran dan penguatan jati diri warga kota. ● Pengkajian dan pengembangan ekosistem penelitian naskah kuno.	● Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	● Persentase Capaian Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang Menjadi Koleksi Daerah ● Persentase Capaian naskah kuno milik daerah yang dilestarikan
2	Meningkatnya kualitas, kapabilitas, akuntabilitas, dan mutu penyelenggaraan layanan arsip yang lebih responsif					
	Terwujudnya tata kelola layanan kearsipan yang berkualitas efektif	Strategi 1: Transformasi Digital dan Adopsi Teknologi	Arah Kebijakan 2 Digitalisasi berkelanjutan yang mendorong standarisasi universal	● Integrasi teknologi kecerdasan buatan untuk otomatisasi layanan, otorisasi pengguna,	● Program Penunjang Urusan Pemerintahan	● Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Pelaksanaan	Program	Indikator Kinerja
	dan akuntabel	~~K~~ecerdasan buatan	dengan mengadopsi kecerdasan buatan secara etis dan inklusif	autentikasi arsip, dan temukembali arsip ● Dashboard layanan digital terintegrasi untuk publik ● Kecerdasan buatan digunakan untuk klasifikasi arsip otomatis, sistem rekomendasi, *chatbot*, dan analitik program. Disertai pedoman etika dan perlindungan data digital	Daerah Provinsi ● Program Pengelolaan Arsip ● Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pemerintahan Daerah ● Tingkat Ketersediaan Arsip ● Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip
		Strategi 2: Kolaborasi Ekosistem dan Kemitraan Strategis	Arah Kebijakan 1: Mewujudkan pengelolaan kearsipan berbasis jejaring dan komunitas	● Inkubasi Komunitas dan Literasi Arsip Tematik ● Platform Digital Kolaboratif Kearsipan Lintas Stakeholder ● Jejaring Kearsipan Antarwilayah	● Program pengelolaan arsip	● Tingkat Ketersediaan Arsip ● Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip
		Strategi 3: Inklusivitas dan Pemerataan Akses	Arah Kebijakan : Mengembangkan layanan kearsipan dan memperluas akses terhadap informasi arsip berbasis digital	● Digitalisasi kearsipan ● Menyelenggarakan pameran ● Edukasi kearsipan pada masyarakat ● Membangun portal informasi kearsipan ● Memberi bimbingan dan pelatihan SDM kearsipan pada perangkat daerah, BUMD, Perusahaan, dan	● Program pengelolaan arsip ● Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	● Tingkat Ketersediaan Arsip ● Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Pelaksanaan	Program	Indikator Kinerja
				Ormas/Orpol ● Meningkatkan efisiensi pelayanan melalui sistem pencarian arsip yang mudah		
		Strategi 4: Reformasi Tata Kelola Kelembagaan	Arah Kebijakan 3: Modernisasi penyelenggaraan kearsipan sebagai sumber memori kolektif dan pengetahuan publik.	● Digitalisasi prosedur layanan dan penerapan indikator kinerja ● Penguatan Partisipasi masyarakat/komunitas/ perseorangan dalam pelestarian dan penyelamatan arsip ● Pengawasan kearsipan berbasis data sebagai bahan akuntabilitas organisasi ● Arsip dijadikan sumber pengetahuan publik melalui portal terbuka, dashboard digital, dan sejarah tematik berbasis kecerdasan buatan. ● Penguatan kolaborasi Perangkat Daerah, BUMD, Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat dalam penyerahan arsip statis ● Penyediaan anggaran, sarana dan prasarana	● Program Pengelolaan Arsip	● Tingkat Ketersediaan Arsip

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Pelaksanaan	Program	Indikator Kinerja
				kearsipan yang terstandarisasi dan SDM yang terlatih ● Apresiasi pengelolaan arsip ● Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA)		
		Strategi 5 Penguatan SDM dan budaya kerja	Arah Kebijakan 4: Penguatan Regulasi dan Reformasi Tata Kelola Lintas Sektor	● Meningkatkan kapasitas arsiparis melalui sertifikasi internasional (ICA) , program residensi, dan pertukaran staf dengan institusi luar negeri. ● Menyusun strategi keikutsertaan dalam forum dan jejaring global di warisan budaya dan transformasi digital. ● Mendorong partisipasi aktif dalam pengajuan warisan budaya dokumen Jakarta ke program Memori Kolektif Bangsa dan Memory of the World untuk memperkuat identitas global Jakarta.	● Program Pengelolaan Arsip	● Tingkat Ketersediaan Arsip
		Strategi 6: Pelestarian Budaya dan Penguatan Identitas Kolektif Jakarta (*Heritage*	Arah Kebijakan 6: Pelestarian Warisan Budaya dan Penguatan Identitas Kolektif Jakarta	● Pembuatan galeri/diorama arsip sebagai sumber informasi ● Internasionalisasi Warisan Budaya Jakarta melalui	● Program Pengelolaan Arsip ● Program Perlindungan	● Tingkat Ketersediaan Arsip ● Persentase cakupan

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Pelaksanaan	Program	Indikator Kinerja
		and Cultural Preservation)		UNESCO Memory of the World ● Inovasi kemas ulang informasi arsip warisan budaya dalam bentuk karya lain	dan Penyelamatan Arsip	perlindungan dan penyelamatan arsip

Tabel 4. 3 Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
TERWUJUDNYA MASYARAKAT LITERAT YANG BERPENGETAHUAN, KREATIF, INOVATIF, DAN BERKARAKTER	**NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA**	**72.93**	**73.93**	**86,361,189,194**	**74.43**	**90,456,094,236**	**74.93**	**94,550,999,278**	**75.43**	**98,645,904,320**	**75.93**	**102,740,809,362**	
MENINGKATNYA PEMBANGUNAN LITERASI DAN KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT YANG MENGUATKAN DAYA SAING KOTA GLOBAL	**INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT**	**73.58**	**74.01**	**86,361,189,194**	**74.26**	**90,456,094,236**	**74.51**	**94,550,999,278**	**74.76**	**98,645,904,320**	**75.01**	**102,740,809,362**	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	25.25	25.5	84,834,306,323	25.75	88,863,170,974	26	92,889,657,427	26.25	96,913,614,995	26.5	100,934,882,269	BIDANG DEBANGPUS. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA. UP PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PDS HB JASSIN.
	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0.0667	0.0714		0.0825		0.08845		0.09419		0.09988		BIDANG DEBANGPUS. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA.

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar	11.4	20		28.6		37.2		45.8		54.4		BIDANG P2PKM. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA.
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase perpustakaan daerah yang memenuhi akreditasi A	100	100	54,218,630,551	100	56,975,658,517	100	60,289,696,991	100	63,321,512,226	100	67,084,893,677	BIDANG P2PKM. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA. UP PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PDS HB JASSIN.
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	6	7	38,533,780,283	7	40,782,519,489	7	43,588,269,203	7	46,111,795,675	7	49,366,888,364	BIDANG DEBANGPUS. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA. UP PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PDS HB JASSIN.
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	60500	13,000	1,147,486,000	13,000	1,184,671,834	13,000	1,221,857,668	13,000	1,259,043,502	13,000	1,296,229,336	BIDANG DEBANGPUS. UP PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PDS HB JASSIN.
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan	4517	986	974,029,362	1036	1,005,594,100	1086	1,037,158,835	1137	1,068,723,574	1176	1,100,288,311	BIDANG P2PKM. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA.

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan												
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	5375	2,452	640,373,000	2657	661,125,152	2862	681,877,304	3068	702,629,456	3274	723,381,608	BIDANG P2PKM.
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	1	1	564,281,457	1	582,567,759	1	600,854,062	1	619,140,365	1	637,426,668	BIDANG DEBANGPUS.

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	1	1	564,281,457	1	582,567,759	1	600,854,062	1	619,140,365	1	637,426,668	BIDANG DEBANGPUS
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1,567,414	129,000	11,422,184,588	129,000	11,792,335,910	129,000	12,162,487,232	129,000	12,532,638,554	129,000	12,902,789,876	BIDANG DEBANGPUS. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA.
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	2	8	50,000,000	8	51,620,317	8	53,240,635	8	54,860,952	8	56,481,270	BIDANG DEBANGPUS. BIDANG P2PKM.
Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	233	552	322,214,404	657	332,656,197	762	343,097,990	868	353,539,783	974	363,981,576	BIDANG P2PKM.
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase masyarakat yang mengikuti pembudayaan gemar membaca	10.1	10.6	30,615,675,772	11.1	31,887,512,457	11.6	32,599,960,436	12.1	33,592,102,769	12.6	33,849,988,592	BIDANG P2PKM. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA. UP PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PDS HB JASSIN.

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	233	255	16,975,165,088	315	17,525,268,245	315	18,075,371,402	315	18,625,474,559	315	19,175,577,716	BIDANG P2PKM. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA. UP PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PDS HB JASSIN.
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	732	600	10,043,458,537	600	10,645,733,271	600	10,694,402,220	600	11,019,874,062	600	11,345,345,904	BIDANG DEBANGPUS. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA.
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	160	220	2,650,000,000	240	2,738,768,290	260	2,821,753,659	280	2,907,630,489	300	2,259,250,807	BIDANG P2PKM. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA.
Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	12	12	947,052,147	12	977,742,651	12	1,008,433,155	12	1,039,123,659	12	1,069,814,165	BIDANG P2PKM. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA.

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Capaian Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang Menjadi Koleksi Daerah	30	32.5	1,526,882,871	35	1,592,923,262	37.5	1,661,341,851	40	1,732,289,325	42.5	1,805,927,093	BIDANG DEBANGPUS.
	Persentase Capaian naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	0	20		40		40		60		60		BIDANG DEBANGPUS.
Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Persentase KCKR Koleksi daerah yang di lestarikan	30	32.5	934,032,950	35	976,564,788	37.5	1,020,839,192	40	1,066,943,290	42.5	1,114,968,568	BIDANG DEBANGPUS.
Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	56500	6,500	237,006,514	6600	244,687,030	6700	252,367,546	6800	260,048,062	6900	267,728,579	BIDANG DEBANGPUS.
Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak	10	10	697,026,436	10	731,877,758	10	768,471,646	10	806,895,228	10	847,239,989	BIDANG DEBANGPUS.

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	dan Karya Rekam												
Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Persentase Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan	100	100	127,645,920	100	136,078,910	100	145,147,531	100	154,915,344	100	165,452,269	BIDANG DEBANGPUS.
Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	50000	250	63,562,960	400	69,919,256	550	76,911,182	700	84,602,300	850	93,062,530	BIDANG DEBANGPUS.
Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	1	1	64,082,960	1	66,159,654	1	68,236,349	1	70,313,044	1	72,389,739	BIDANG DEBANGPUS.
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Yang Dilestarikan	0	20	274,931,840	40	283,841,377	60	292,750,915	80	301,660,452	100	310,569,990	BIDANG DEBANGPUS.
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	25	4	124,931,840	4	128,980,425	4	133,029,010	4	137,077,595	4	141,126,180	BIDANG DEBANGPUS.

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	0	100	150,000,000	125	154,860,952	150	159,721,905	175	164,582,857	200	169,443,810	BIDANG DEBANGPUS.
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dikembangkan	0	20	190,272,161	40	196,438,187	60	202,604,213	80	208,770,239	100	214,936,266	BIDANG DEBANGPUS.
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	2000	500	140,000,000	500	144,536,889	500	149,073,778	500	153,610,667	500	158,147,556	BIDANG DEBANGPUS.
Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	2000	500	50,272,161	500	51,901,298	500	53,530,435	500	55,159,572	500	56,788,710	BIDANG DEBANGPUS.

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
MENINGKATNYA KUALITAS, KAPABILITAS, AKUNTABILITAS, DAN MUTU PENYELENGGARAAN LAYANAN ARSIP YANG LEBIH RESPONSIF	**NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN**	**93.11**	**93.61**	**121,529,870,356**	**94.11**	**124,171,955,947**	**94.61**	**126,814,041,537**	**95.11**	**129,456,127,128**	**95.61**	**132,098,212,719**	
TERWUJUDNYA TATA KELOLA LAYANAN KEARSIPAN YANG BERKUALITAS EFEKTIF DAN AKUNTABEL	**TINGKAT PENGELOLAAN ARSIP**	**67.32**	**92.59**	**121,529,870,356**	**93.09**	**124,171,955,947**	**93.59**	**126,814,041,537**	**94.09**	**129,456,127,128**	**94.59**	**132,098,212,719**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	108,849,735,157	4	111,182,194,266	4	113,317,979,962	4	115,756,612,474	4	117,986,224,760	SEKRETARIAT. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA. UP PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PDS HB JASSIN.
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	100	55,000,000	100	55,000,000	100	55,000,000	100	55,000,000	100	155,000,000	SEKRETARIAT
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	55,000,000	1	55,000,000	1	55,000,000	1	55,000,000	2	155,000,000	SEKRETARIAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4	4	90,818,951,359	4	92,048,157,432	4	93,332,678,105	4	94,106,569,579	4	95,535,766,653	SEKRETARIAT. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA. UP PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PDS HB JASSIN.
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	211	221	90,773,086,359	228	92,000,806,115	235	93,283,840,471	240	94,056,245,628	245	95,483,956,384	SEKRETARIAT
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	84	84	45,865,000	84	47,351,317	84	48,837,634	84	50,323,951	84	51,810,269	SEKRETARIAT. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA. UP PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PDS HB JASSIN.
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4	4	2,043,405,761	4	2,108,854,454	4	2,174,303,148	4	2,039,751,845	4	2,172,092,288	SEKRETARIAT. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA. UP PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PDS HB JASSIN.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	6	7	188,583,095	7	194,694,384	7	200,805,674	7	206,916,964	7	279,920,002	SEKRETARIAT. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA.

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kantor yang Disediakan												UP PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PDS HB JASSIN.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	22	247,798,962	18	255,829,222	18	263,859,482	18	271,889,742	18	279,920,002	SEKRETARIAT. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA. UP PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PDS HB JASSIN.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	7	131,746,382	7	136,015,801	7	140,285,220	7	144,554,640	7	148,824,059	SEKRETARIAT. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA. UP PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PDS HB JASSIN.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	7	86,488,513	7	89,291,290	7	92,094,067	7	94,896,844	7	97,699,621	SEKRETARIAT. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA. UP PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PDS HB JASSIN.
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6	7	433,901,809	7	447,962,983	7	462,024,157	7	276,085,331	7	290,146,506	SEKRETARIAT. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA. UP PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PDS HB JASSIN.

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	24	120,280,000	24	124,177,835	24	128,075,671	24	131,973,507	24	135,871,343	SEKRETARIAT. UP PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PDS HB JASSIN.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28	84	72,250,000	84	73,820,731	84	75,391,461	84	76,962,192	84	78,532,922	SEKRETARIAT. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA. UP PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PDS HB JASSIN.
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	3	762,357,000	3	787,062,208	3	811,767,416	3	836,472,625	3	861,177,833	BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	4	353,175,000	4	360,853,101	4	368,531,201	4	276,209,302	4	183,887,403	SEKRETARIAT. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA. UP PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PDS HB JASSIN.

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	1	74,250,000	7	75,864,211	7	77,478,422	7	79,092,633	7	80,706,844	SEKRETARIAT. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA. UP PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PDS HB JASSIN.
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	93	278,925,000	94	284,988,890	77	291,052,779	108	197,116,669	120	103,180,559	SEKRETARIAT. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA. UP PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PDS HB JASSIN.
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	13,897,296,342	4	14,459,044,005	4	17,020,791,667	4	18,904,766,461	4	19,044,286,994	SEKRETARIAT. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA. UP PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PDS HB JASSIN.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84	84	4,996,127,082	84	5,190,439,680	84	5,384,752,278	84	6,579,064,877	84	5,273,377,475	SEKRETARIAT. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA. UP PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PDS HB JASSIN.

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84	84	116,950,250	84	119,492,774	84	122,035,297	84	124,577,821	84	127,120,345	SEKRETARIAT. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA. UP PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PDS HB JASSIN.
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84	84	8,784,219,010	84	9,149,111,551	84	11,514,004,092	84	12,201,123,763	84	13,643,789,174	SEKRETARIAT. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA. UP PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PDS HB JASSIN.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	1,681,906,695	4	2,150,285,274	4	366,675,841	4	374,315,287	4	895,191,422	SEKRETARIAT. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA. UP PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PDS HB JASSIN.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	113	126,950,250	113	129,710,176	113	132,470,102	113	135,230,027	113	137,989,953	SEKRETARIAT. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA. UP PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PDS HB JASSIN.

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	111	54,260,850	118	55,440,493	111	56,620,135	116	57,799,778	116	58,979,420	SEKRETARIAT. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA. UP PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PDS HB JASSIN.
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	208	43,260,850	204	44,201,350	206	45,141,850	227	46,082,351	226	47,022,851	SEKRETARIAT. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA. UP PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PDS HB JASSIN.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10	11	1,457,434,745	11	1,920,933,255	11	132,443,754	11	135,203,131	11	651,199,198	SEKRETARIAT. SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA. UP PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PDS HB JASSIN.
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip	43.21	70.74%	11,456,985,199	70.8%	11,370,584,457	70.86 %	12,193,635,919	70.92%	12,427,949,506	70.98 %	12,730,286,647	BIDANG LANSIP BIDANG BINWAS SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA.
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif dengan Retensi Sekurang-kurangnya 10 Tahun di Depot Arsip	0	100	10,185,115,311	100	10,413,887,305	100	10,839,332,710	100	10,961,931,298	100	11,293,550,114	BIDANG LANSIP SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA.

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase lembaga pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan pengawasan kearsipan dan mendapatkan nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dengan kategori minimal A (Memuaskan)	16.67%	26.67		40		57.08		78.33		100		BIDANG BINWAS
Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	11629	10,000	96,904,890	10000	100,045,223	10000	103,185,557	10000	106,325,891	10000	109,466,225	BIDANG LANSIP
Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	50000	60,000	6,901,463,364	60000	7,125,114,607	60000	7,348,765,851	60000	7,572,417,095	60000	7,796,068,339	BIDANG LANSIP SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA.
Pemilihan Arsiparis Teladan	Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan	0	45	95,250,000	-	-	55	101,423,409	-	-	65	107,596,819	BIDANG BINWAS

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	40	64	924,552,200	96	954,513,563	137	984,474,926	188	1,014,436,289	240	1,044,397,652	BIDANG BINWAS SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA.
Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	54	240	1,326,065,543	240	1,366,084,768	240	1,406,103,993	240	1,346,123,219	240	1,286,142,445	BIDANG BINWAS
Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip	0	33	840,879,314	27	868,129,144	33	895,378,974	27	922,628,804	33	949,878,634	BIDANG BINWAS SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA.
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Arsip Statis yang dikelola	84.38%	100.00%	546,869,888	100%	564,591,944	100%	582,314,001	100%	600,036,059	100%	617,758,116	BIDANG LANSIP SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA.
Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Orang yang diwawancarai	16	6	118,500,000	6	122,340,152	6	126,180,305	6	130,020,457	6	133,860,610	BIDANG LANSIP
Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip	2	2	153,243,000	2	158,209,046	2	163,175,092	2	168,141,139	2	173,107,185	BIDANG LANSIP
Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	3000	4,000	275,126,888	5000	284,042,746	6000	292,958,604	7000	301,874,463	8000	310,790,321	BIDANG LANSIP SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA.

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase simpul jaringan sistem informasi kearsipan yang dikelola	100	100	725,000,000	100	748,494,604	100	771,989,208	100	795,483,813	100	818,978,417	BIDANG LANSIP SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA.
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	16127	17,000	725,000,000	17,425	748,494,604	17,861	771,989,208	18,307	795,483,813	18,765	818,978,417	BIDANG LANSIP SUDIN PUSIP LIMA WILAYAH KOTA.
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	0	100	1,223,150,000	100	1,262,787,828	100	1,302,425,656	100	1,342,063,484	100	1,381,701,312	BIDANG LANSIP
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	0	100	910,750,000	100	940,264,084	100	969,778,168	100	999,292,252	100	1,028,806,336	BIDANG LANSIP
Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	0	3,500	910,750,000	4200	940,264,084	4200	969,778,168	4200	999,292,252	4200	1,028,806,336	BIDANG LANSIP

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Persentase autentikasi arsip statis yang dialihmediakan	0	100	312,400,000	100	322,523,744	100	332,647,488	100	342,771,232	100	352,894,976	BIDANG LANSIP
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	0	1,000	312,400,000	1000	322,523,744	1000	332,647,488	1000	342,771,232	1000	352,894,976	BIDANG LANSIP

4.2 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah disusun dengan menyelaraskan program kerja sesuai dengan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Misi RPJMD, yang kemudian menjadi *outcome* prioritas setiap Tujuan dan Sasaran RPJMD yang bersifat *cross-cutting* dan pencapaiannya ditunjang oleh kinerja lintas bidang urusan. Selain itu, *outcome* prioritas pembangunan juga disusun berdasarkan hasil kajian peta jalan kota global yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 294 tahun 2025, yang dikelompokkan ke dalam DKI *Strategic Project* (DSP) dan *Global City Project* (GCP) untuk memenuhi amanat perbaikan fundamental. Berdasarkan penjelasan di atas, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendukung Program Prioritas pada:

Tabel 4. 4 Penentuan Program Prioritas Tujuan

Misi 1	Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera:	
Tujuan 1	Tercapainya Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Megapolitan	
Sasaran	*Outcome*	Program Prioritas
Menguatnya Nilai Budaya, Demokrasi, dan Kebhinekaan Masyarakat	Pengoptimalan peran perpustakaan daerah sebagai pusat informasi dan pembelajaran melalui fitur Jaklitera	Program Pembinaan Perpustakaan

Untuk Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah berikut ini adalah Rincian Aktivitas dari Sub kegiatan Prioritas sebagai berikut:

1. Program pembinaan perpustakaan
    a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
        1) Sub kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi

           Perpustakaan yang dikembangkan oleh pemerintah provinsi, pemerintah , maupun pihak terkait lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, koleksi, sarana prasarana, sumber daya manusia, serta pengelolaan perpustakaan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Perpustakaan (SNP), sebagaimana diatur dalam UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Perpusnas RI No. 6 Tahun 2021.
        2) Sub kegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi

           Pengembangan koleksi kesusastraan yang dilaksanakan melalui penyediaan buku koleksi sastra dan aktivitas lainnya seperti pengelolaan dokumen sastra, perawatan koleksi serta kegiatan pengembangan kesusastraan.
        3) Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi

           Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah /Pendidikan khusus merupakan perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan pendidikan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Pendidikan Khusus yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. Pembinaan meliputi pembinaan teknis dan pengelolaan perpustakaan untuk dapat menyelenggarakan perpustakaan sesuai dengan SNP, perlu dilakukan Bimtek NSPK dan sosialisasi akreditasi bagi perpustakaan sekolah. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi terdiri dari aktivitas Pembinaan Tenaga

Pengelola Perpustakaan Sekolah dan Pembinaan Tenaga Pengelola Perpustakaan Umum, Khusus dan Perguruan Tinggi

4) Sub kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

Bahan perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan mencakup koleksi buku tercetak (konvensional), koleksi buku elektronik, koleksi audio visual bagi penyandang disabilitas, koleksi terbitan berkala, dan peningkatan bahan pustaka melalui survei kebutuhan pemustaka serta kebermanfaatan koleksi perpustakaan.

b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi

1) Sub kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

Jumlah Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta masyarakat yang mengikuti pemasyarakatan, sosialisasi, promosi dan apresiasi pembudayaan kegemaran membaca

2) Sub kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Perpustakaan yang dibangun sesuai dengan kewenangan perpustakaan provinsi dalam rangka menciptakan pojok baca masyarakat dan perluasan akses layanan. Pembangunan perpustakaan tersebut meliputi sarana perpustakaan (rak buku dan buku perpustakaan) dan titik baca digital untuk mengakomodir aspirasi masyarakat (Usulan langsung, Reses, Musrenbang), pelayanan di ruang publik, serta kebutuhan masyarakat yang diakomodir wilayah kota, RPTRA, TBM, Kantor RW, SKKT dan yang didorong ke tingkat provinsi.

3) Sub kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca

Penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca adalah pemberian apresiasi / hadiah kepada para pemangku kepentingan seperti masyarakat, perseorangan, kelompok dan

/atau lembaga yang telah berhasil meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca masyarakat melalui berbagai sumber daya yang dimiliki (Pergub No. 76 Tahun 2018). Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca dilaksanakan melalui kompetisi dan apresiasi

4) Sub kegiatan Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi

   Duta Baca dan bunda literasi merupakan sosok inspiratif untuk menjadi motivator dalam membangkitkan kegemaran membaca dan mengkampanyekan pembudayaan kegemaran membaca melalui berbagai media. Pemilihan duta baca dilakukan melalui seleksi, dan menjalankan tugas dalam periode tertentu. Bunda literasi merupakan istri pimpinan daerah. Jumlah Duta Pembudayaan Kegemaran Membaca yang Terpilih di Tingkat Daerah Provinsi sesuai Kriteria Penilaian dalam Pedoman dan didukung kegiatannya

Tabel 4. 5 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1	Program Pembinaan Perpustakaan	4.1.1.1.1.1.1 Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat 4.1.1.1.1.1.2 Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk 4.1.1.1.1.1.3 Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		
				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	
				Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	
				Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	
				Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	
				Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi		
				Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	
				Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
				Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	
				Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan indikator kinerja utama adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan kinerja secara baik dan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator kinerja utama memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan berjalan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kegemaran membaca masyarakat dan tertib pengelolaan arsip. Indikator kinerja utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut:

1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)

   Target meningkat dari 73,21 (2025) menjadi 75,43 (2029); arah perbaikan konsisten hingga 75,93 (2030) sebagai proyeksi jangka menengah. Dampak yang diharapkan: naiknya intensitas membaca, diversifikasi media baca, dan peningkatan partisipasi layanan.

2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

   Target ekuivalen 73,58 (2025) menuju 75,01 (2030); konversi awal 2025 dinyatakan 19,91 setara 73,58. Dampak: penguatan kemampuan literasi dasar–informasi, inklusi literasi digital, serta kenaikan kualitas interaksi warga dengan sumber informasi kota.

3. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

   Target meningkat 90,06 (2025) menjadi 95,61 (2030), mencerminkan perbaikan kepatuhan, pembinaan, dan maturitas pengelolaan kearsipan. Dampak: integritas dokumen pemerintah lebih terjaga, risiko kepatuhan menurun.

4. Tingkat Pengelolaan Arsip

   Ditargetkan 92,59 (2026) naik ke 94,59 (2030). Dampak: efisiensi siklus hidup arsip, pemangkasan waktu temu kembali, dan peningkatan kualitas layanan informasi kearsipan.

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	73.21	73.93	74.43	74.93	75.43	75.93	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	(19.91) 73.58	74.01	74.26	74.51	74.76	75.01	pada tahun 2025 target 19.91 atau jika dikonversi setara 73.58
3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	90.06	93.61	94.11	94.61	95.11	95.61	
4	Tingkat Pengelolaan Arsip	Persentase	-	92.59	93.09	93.59	94.09	94.59	Indikator baru

4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK digunakan untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator kinerja kunci yang digunakan dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antar Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku pengampu Urusan Perpustakaan dan Kearsipan di Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdapat 2 (dua) IKK *Outcome* Urusan Perpustakaan Provinsi dan 2 (dua) IKK *Outcome* Urusan Kearsipan, antara lain :

1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)
   Target meningkat dari 73,21 (2025) menjadi 75,43 (2029); arah perbaikan konsisten hingga 75,93 (2030) sebagai proyeksi jangka menengah. Dampak yang diharapkan: naiknya intensitas membaca, diversifikasi media baca, dan peningkatan partisipasi layanan.
2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
   Target ekuivalen 73,58 (2025) menuju 75,01 (2030); konversi awal 2025 dinyatakan 19,91 setara 73,58. Dampak: penguatan kemampuan literasi dasar–informasi, inklusi literasi digital, serta kenaikan kualitas interaksi warga dengan sumber informasi kota.
3. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
   Target bertahap dari **70,68 (2025)** menuju **71,00 (2030)**. Dampak: tersedianya bukti sah layanan publik dan akuntabilitas kinerja, memperkuat transparansi pemerintahan daerah.

4. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

   Dipertahankan **100% (2025–2030)** sebagai standar layanan minimal. Dampak: kontinuitas layanan, mitigasi kehilangan data/dokumen, dan kepastian hukum.

Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	73.21	73.93	74.43	74.93	75.43	75.93	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	(19.91) 73.58	74.01	74.26	74.51	74.76	75.01	Target 2025 sebesar 19.91 atau jika dikonversi setara 73.58
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persentase	70.68	70.74	70.80	70.86	70.92	71.00	
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persentase	100	100	100	100	100	100	

4.5 Mekanisme Penilaian dan Sumber Data

1. Sumber data utama: survei TGM dan IPLM, hasil pengawasan kearsipan, serta audit/evaluasi kinerja urusan yang dilaksanakan sesuai pedoman LPPD. Konsistensi definisi indikator mengikuti standar pusat agar komparabel antar daerah.
2. Frekuensi**:** pemutakhiran tahunan dengan *mid-term review* (2027) untuk koreksi strategi bila terjadi deviasi target.
3. Triangulasi: penggabungan data administrasi layanan (kunjungan, sirkulasi, peminjaman digital), temu kembali arsip, dan survei kepuasan pemustaka/ pengakses arsip untuk mengaitkan *output–outcome.*

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 ini adalah dokumen perencanaan yang dinamis dari yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029.

Rencana strategis ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029. Melalui enam strategi utama: transformasi digital dan adopsi teknologi kecerdasan buatan, kolaborasi ekosistem dan kemitraan strategis, inklusivitas dan pemerataan akses, reformasi tata kelola kelembagaan, penguatan sumber daya manusia dan budaya kerja, dan pelestarian budaya dan penguatan identitas kolektif Jakarta *(Heritage and Cultural Preservation),* Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta diarahkan untuk:

1. Meningkatkan akses dan kualitas literasi masyarakat berbasis keadilan sosial.
2. Menjadikan arsip sebagai infrastruktur memori kolektif yang terbuka dan digunakan secara aktif untuk riset, kebijakan, dan penguatan jati diri.
3. Menjadi pusat kolaborasi pengetahuan dan inovasi sosial di tingkat lokal maupun global.

Dalam pelaksanaan rencana strategis tersebut perlu diperhatikan antara lain :

1. Dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta ini menjadi acuan resmi penilain kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.
2. Dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan bahan penyusunan Rancangan RKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3. Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, maka dilakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap rencana, pelaksanaan dan hasil kinerja dalam Renstra.

Pada akhirnya, komitmen dan semangat untuk meningkatkan kinerja adalah yang utama dalam keberhasilan pencapaian target kinerja dan pemerintahan yang baik.Dengan semangat kolaboratif dan inklusif, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta akan berperan sebagai pelopor dalam menciptakan Jakarta sebagai kota cerdas, berbudaya, dan berdaya tahan sosial yang unggul di tingkat nasional dan global.